

**PELAKSANAAN PERAN TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA (PKK) DALAM MEMBERDAYAKAN
PEREMPUAN**

**(Studi tentang Program Pendidikan dan Keterampilan di Kecamatan Kaliori
Kabupaten Rembang)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**NINA ROSA RIANA
NIM. 105030100111090**



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLK

MALANG

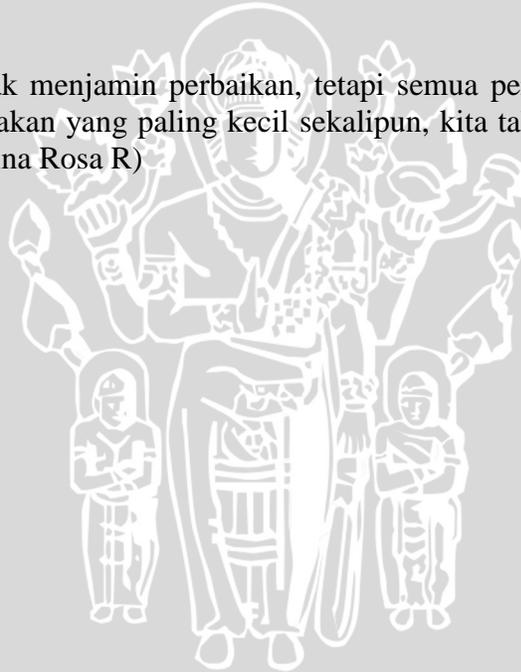
2014

MOTTO

Sesungguhnya, sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap (QS. Al-Insyirah 5-8)

Tak ada usaha tanpa niat, Tak ada keberhasilan tanpa usaha, tak ada kesuksesan tanpa doa dan yang terpenting restu dari kedua orang tua, karena restu orang tua adalah restu Allah SWT. (Nina Rosa R)

Perubahan memang tidak menjamin perbaikan, tetapi semua perbaikan diawali dari perubahan. Dengan tindakan yang paling kecil sekalipun, kita takkan pernah tau apa yang bisa kita rubah. (Nina Rosa R)



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Pelaksanaan Peran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Memberdayakan Perempuan. (Studi tentang Program Pendidikan dan Keterampilan di Kecamatan Kaliore Kabupaten Rembang)

Disusun oleh : Nina Rosa Riana

NIM : 105030100111090

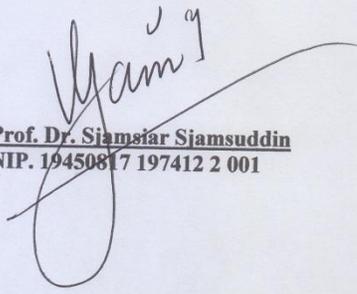
Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

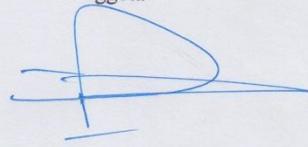
Malang, April 2014

Komisi Pembimbing

Ketua


Prof. Dr. Samsiar Samsuddin
NIP. 19450817 197412 2 001

Anggota


Ainul Hayat, S.Pd, M.Si
NIP. 19730713 200604 1 001

TANDA PENGESAHAN

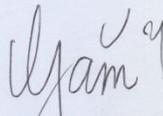
Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Selasa
 Tanggal : 10 Juni 2014
 Jam : 10.00 – 11.00 WIB
 Skripsi atas nama : Nina Rosa Riana
 Judul : Pelaksanaan Peran Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Memberdayakan Perempuan (Studi Tentang Program Pendidikan Dan Keterampilan Di Kecamatan Kaliore Kabupaten Rembang)

Malang, 10 Juni 2014

DINYATAKAN LULUS
 MAJELIS PENGUJI

Ketua



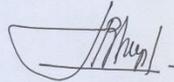
Prof. Dr. Sjamsiar Sjamsuddin
 NIP. 19450817 197412 2 001

Anggota



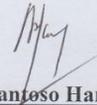
Ainul Hayat, S.Pd M.Si
 NIP.19730713 200604 1 001

Anggota



Dr. Ratih Nur Pratiwi, M. Si
 NIP. 19530807 197903 2 001

Anggota



Dr. Bambang Sanjoso Haryono, MS
 NIP. 19610204 198601 1 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2)

Malang,

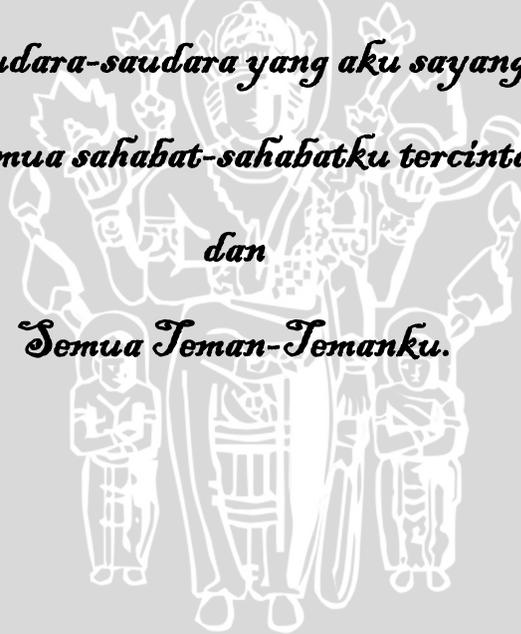
Mahasiswa



Nama : Nina Rosa Riana
NIM : 105030100111090

LEMBAR PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan Hasil Karyaaku
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana/S1
Untuk Ayahanda dan Ibunda Tercinta
Kakak dan Adikku Tercinta
Orang yang telah menyayangiku
Saudara-saudara yang aku sayangi
Semua sahabat-sahabatku tercinta
dan
Semua Teman-Temanku.*



RINGKASAN

Nina Rosa Riana, 2014. **Pelaksanaan Peran Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Memberdayakan Perempuan (Studi tentang Program Pendidikan dan Keterampilan di Kecamatan Kaliore Kabupaten Rembang)**, Prof. Dr. Sjamsiar Sjamsuddin dan Ainul Hayat S.Pd, M.Si
146 Hal + xvii

Kondisi keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat mempunyai arti yang besar dalam proses pembangunan, karena kondisi keluarga merupakan barometer bagi kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Untuk dapat membina keluarga secara langsung dan menjangkau sasaran sebanyak mungkin, maka dibentuk Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, yang mekanisme gerakannya dikelola dan dilaksanakan oleh suatu Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP.PKK) di setiap jenjang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis peranan, faktor penghambat dan pendorong PKK dalam memberdayakan perempuan program pendidikan dan keterampilan di Kecamatan kaliore. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisis yang digunakan adalah model analisa interaktif dari Miles dan Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Peran TP. PKK khususnya program pendidikan dan keterampilan di Kecamatan Kaliore sudah terlaksana dan berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari prioritas dari program tersebut yaitu (a) peningkatan pengetahuan kader dan minat baca masyarakat dengan menggelar bimbingan teknis, sosialisasi, pelatihan kepada para kader, (b) peningkatan, peningkatan kualitas tenaga pendidik/kader pos PAUD dengan memberikan pembinaan, (c) peningkatan keterampilan usaha dengan adanya pelatihan usaha (d) kerjasama dengan pemerintah yaitu dengan adanya perjanjian MOU yang terjalin dengan baik. Namun dalam pelaksanaannya ditemui beberapa kendala diantaranya semakin kurangnya tenaga sukarela/Kader PKK di desa-desa, terbatasnya kemampuan dan rendahnya tingkat pendidikan kader, serta kurang adanya sarana dan prasarana yang memadai.

Saran yang direkomendasikan antara lain: perlunya campur tangan tokoh masyarakat, meningkatkan sarana dan prasarana dan koordinasi dengan Dewan Penyantun, mendidik tenaga penyuluh secara professional, perlunya peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat untuk pembangunan desa masing-masing, meningkatkan kemampuan masyarakat dengan diberikan keterampilan dan pendidikan yang berkualitas dan memadai, serta perlunya meningkatkan sumber pendanaan juga agar kegiatan yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar.

Kata kunci : PKK, Pemberdayaan perempuan, Pendidikan dan Keterampilan

SUMMARY

Nina Rosa Riana, 2014. **The Implementation of Driving Team of Empowerment and Family Welfare (PKK) Role in Empowering Women (Study of Educational and Skills Program in District Kaliori Rembang Regency)**, Prof. Dr. Sjamsiar Sjamsuddin and Ainul Hayat S.Pd, M.Si 146 pages + xvii

The conditions of the family as the smallest unit in society have a great meaning in the development process, because it is a barometer for society welfare at large. To be able to live and raise a family as much as possible to reach the target, then formed Empowerment and Family Welfare Movement, the movement mechanism is managed and implemented by a team of driving Empowerment and Family Welfare (TP.PKK) at every level. This study aims to determine, describe and analyze the implementation of PKK role, and what kind of the factors that make supported and obstacle of PKK organization for empowering women in education and skills programs in District kaliori. The method used is descriptive method with qualitative approach. The analysis used is interactive analysis model of Miles and Huberman.

The results of this research shows that the role of TP. PKK especially educational and skills program in the District Kaliori already implemented and running well. It can be seen from the priorities of the program are (a) increased knowledge of cadres and public interest by holding technical guidance, socialization, training cadres, (b) enhancement, improvement of the quality of teachers / PAUD cadre post by providing coaching, (c) improvement of business skills with business training (d) cooperation with the government, namely the existence of the MOU agreement is established. However, in practice increasingly encountered several obstacles including a lack of volunteers / PKK cadres in the villages, the limited ability and low levels of education of cadres, as well as the lack of adequate infrastructure.

Researcher give recommendation as follows : the need for the intervention of community leaders, improving infrastructure and coordination with the Board of Trustees, professionally educate extension workers, the need for active participation from all walks of life for each rural development, improving the ability of people to be given the skills and education quality and adequate, and also the need to increase funding sources for activities that can be run smoothly.

Key word : PKK, Woman Empowerment, Educational and Skills Program

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Peran Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Memberdayakan Perempuan (Studi tentang Program Pendidikan dan Keterampilan di Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang).”**

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

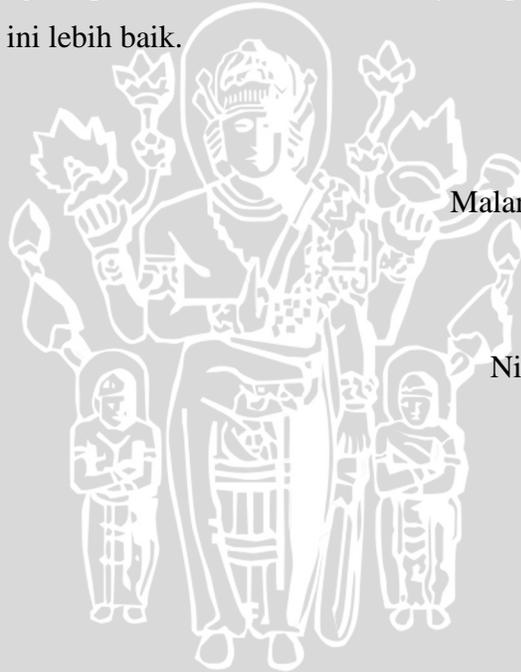
1. Orang tua tercinta, yang senantiasa memberikan kasih sayang serta doa dan dukungan kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S., selaku Dekan fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
3. Bapak Dr. Choirul Shaleh, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
4. Ibu Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya
5. Ibu Prof. Dr. Sjamsiar Sjamsuddin selaku dosen pembimbing I yang telah membimbing dengan sabar dan memberikan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Ainul Hayat, S.Pd, M.Si selaku dosen pembimbing II yang banyak memberikan arahan, masukan dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh dosen Ilmu Administrasi Publik yang telah memberikan bimbingan serta ilmu yang bermanfaat selama proses perkuliahan.
8. Para narasumber yang telah memberikan masukan, informasi serta petunjuk di dalam menambah keilmuan skripsi ini yaitu:

- a. Ibu Suharti, Ibu Asih, dan Ibu Alfi selaku narasumber dari Tim Penggerak PKK kabupaten Rembang.
- b. Ibu Sri, Ibu Sutasmi selaku narasumber dari Tim Penggerak PKK Kecamatan Kaliori.
- c. Ibu Titik dan Ibu Suremi selaku narasumber dari Kader PKK desa Dresi Kulon.

9. Kepada saudara-saudaraku, sahabat, dan teman-teman yang telah memberikan doa, dukungan, motivasi, menemani, membantu penyusunan skripsi ini.

Tak ada gading yang tak retak, skripsi ini tentu saja masih belum sempurna.

Untuk itu penulis mengharapkan masukan dari banyak pihak yang bersifat membangun agar skripsi ini lebih baik.



Malang, April 2014

penulis

Nina Rosa Riana



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
MOTTO	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
TANDA PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
RINGKASAN	vii
SUMMARY	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kontribusi Penelitian.....	12
E. Sistematika Pembahasan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perempuan dan Pembangunan Nasional	14
1. Pembangunan Nasional	14
2. Peran Perempuan dalam Pembangunan Nasional	16
B. Pengarusutamaan Gender (PUG)	18
1. Pengertian Pengarusutamaan Gender (PUG)	18
2. Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan	19
3. Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG)	20
C. Pemberdayaan	23
1. Pengertian Pemberdayaan	23
2. Strategi Pemberdayaan.....	24
3. Tahap Pemberdayaan	26
4. Indikator Pemberdayaan.....	27
5. Pemberdayaan dalam Konsep Pembangunan.....	30
6. Pemberdayaan Perempuan	31
D. Kesejahteraan Keluarga	34
1. Konsep Keluarga Sejahtera	34
2. Kesejahteraan Keluarga	35
E. Pendidikan dan Keterampilan	38

1. Pengertian Pendidikan dan Keterampilan	38
2. Jenis-jenis Pendidikan	39

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	40
B. Fokus Penelitian	41
C. Lokasi dan Situs Penelitian	42
D. Sumber Data	43
E. Teknik Pengumpulan Data	44
1. Observasi	45
2. Wawancara	45
3. Dokumentasi	45
F. Instrumen Penelitian	46
G. Analisis Data	47

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kecamatan kaliori	49
1. Gambaran Umum Kecamatan Kaliori	49
a. Keadaan Geografi	49
b. Kondisi Penduduk	50
c. Keadaan Sosial Masyarakat	52
2. Gambaran Umum Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	53
a. Pengertian Gerakan PKK	53
b. Tujuan Gerakan PKK	56
c. Sasaran Gerakan PKK	56
d. Sistem Perencanaan PKK	56
e. Tugas dan Fungsi PKK	57
f. Organisasi PKK	58
g. Program Pendidikan dan Keterampilan	59
h. Rincian Tugas dan Fungsi TP. PKK Desa/kelurahan	62
3. Gambaran Umum Desa Dresi Kulon	65
a. Keadaan Geografis	66
b. Perkembangan Kependudukan	66
c. Bidang Organisasi PKK	66
d. Ekonomi Masyarakat	67
e. Pelaksanaan Program Pendidikan dan Keterampilan di desa Dresi Kulon	71

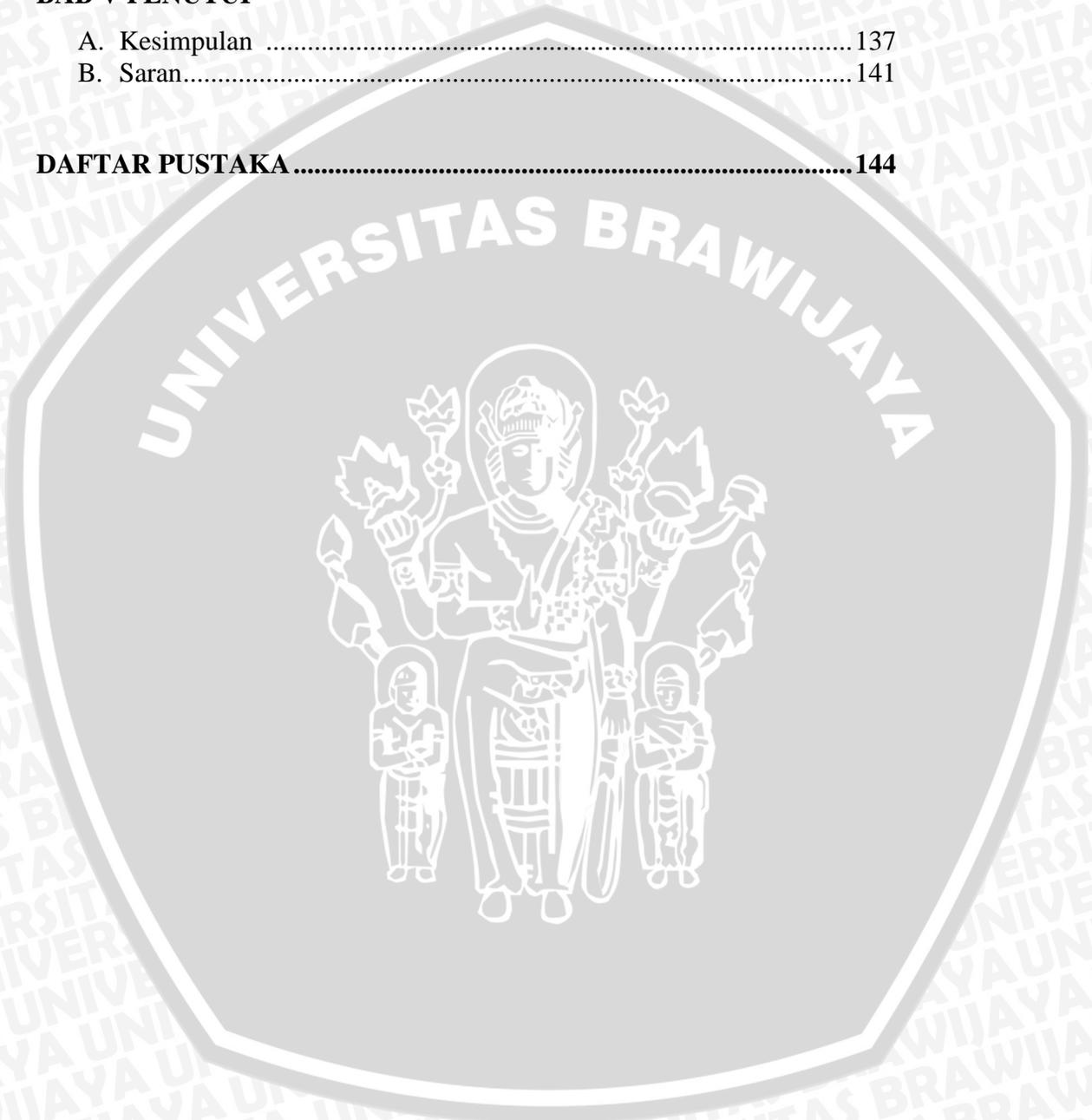
B. Penyajian Data Fokus.....	79
1. Pelaksanaan Peran Tim Penggerak PKK dalam Memberdayakan Perempuan Program Pendidikan dan Keterampilan	79
a. Peningkatan pengetahuan kader dan minat baca masyarakat..	79
b. Peningkatan kualitas tenaga pendidik/kader pos PAUD.....	83
c. Peningkatan keterampilan usaha	86
d. Kerjasama dengan Pemerintah	89
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Peran Tim Penggerak PKK dalam Memberdayakan Perempuan	106
a. Faktor Pendukung	106
1) Adanya Program Kerja yang seragam dan terpadu.....	106
2) Sumber Daya Manusia yang bertanggungjawab.....	107
3) Adanya bantuan dana dari Pemerintah.....	108
b. Faktor Penghambat.....	109
1) Semakin kurangnya tenaga sukarela/kader PKK di desa-desa.....	109
2) Terbatasnya kemampuan dan rendahnya tingkat Pendidikan kader	110
3) Kurangnya dukungan dari Dewan Penyantun di desa-desa	111
C. Pembahasan.....	112
1. Pelaksanan Peran Tim Penggerak PKK dalam Memberdayakan Perempuan Program Pendidikan dan Keterampilan	112
a. Peningkatan pengetahuan kader dan minat baca masyarakat	113
b. Peningkatan kualitas tenaga pendidik/kader pos PAUD.....	118
c. Peningkatan keterampilan usaha	120
d. Kerjasama dengan Pemerintah.....	122
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Peran Tim Penggerak PKK dalam Memberdayakan Perempuan.....	125
a. Faktor Pendukung	125
1) Adanya Program Kerja yang seragam dan terpadu.....	126
2) Sumber Daya Manusia yang bertanggungjawab.....	127
3) Adanya bantuan dana dari Pemerintah.....	128
c. Faktor Penghambat.....	129
1) Semakin kurangnya tenaga sukarela/kader PKK di desa-desa.....	129
2) Terbatsanya kemampuan dan rendahnya tingkat Pendidikan kader	133

3) Kurangnya dukungan dari Dewan Penyantun di desa-desa 135

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 137
B. Saran..... 141

DAFTAR PUSTAKA 144



DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
1.	Jumlah rumah tangga dan penduduk Kecamatan kaliori Tahun 2012	51
2.	Tingkat pengangguran di Desa Dresi Kulon	67
3.	Tingkat kesejahteraan keluarga	68
4.	Tingkat pendidikan masyarakat	69
5.	Susunan keanggotaan Tim Penggerak PKK Desa Dresi Kulon Tahun 2013	70
6.	Program kerja TP PKK Desa Dresi Kulon tahun 2013.....	
7.	Susunan keanggotaan TP PKK Kecamatan Kaliori Periode 2010-2015	98
8.	Data kegiatan PKK Kecamatan Kaliori program Pendidikan dan ketrampilan tahun 2013.....	101



DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
1.	Intervensi terhadap Institusi-institusi Strategis	23
2.	Tahap-tahap Pemberdayaan	27
3.	Tahap-tahap Analisis Data Kualitatif	51
4.	Bagan mekanisme gerakan PKK di Desa/Kelurahan	63
5.	Pelatihan kader BKB Desa Binaan Kecamatan Kaliori	72
6.	Temu kader pos PAUD	74
7.	Pembinaan pelaksanaan 10 program pokok PKK	80
8.	Pembinaan 10 program pokok PKK di Desa Sendangagung Kecamatan Kaliori.....	82
9.	Sosialisasi dari UPT Dinas Pendidikan.....	85
10.	Suasana sosialisasi dari UPT Dinas Pendidikan	86
11.	Dokumentasi Pelatihan pembuatan kue	88
12.	Dokumentasi Pelatihan menjahit.....	91
13.	Dokumentasi Pelatihan Bordir	91
14.	Kantor secretariat PKK Kecamatan kaliori.....	96
15.	Data umum PKK.....	96

DAFTAR LAMPIRAN

- | No. | Judul |
|-----|--|
| 1. | Surat Ijin Riset PKK Kabupaten Rembang |
| 2. | Surat Ijin Riset PKK Kecamatan Kaliori |
| 3. | Surat Ijin Riset Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rembang |
| 4. | Perjanjian Kerjasama (MOU) TP PKK dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang |
| 5. | Perjanjian Kerjasama (MOU) TP PKK dengan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (Disperindagkop dan UMKM) |
| 6. | Perjanjian Kerjasama (MOU) TP PKK dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) |
| 7. | Surat Keputusan Bupati Rembang tentang Desa/Kelurahan Binaan Tahun 2013 |
| 8. | <i>Interview guide</i> |
| 9. | <i>Curriculum Vitae</i> |
| 10. | Surat Keterangan Telah Melaksanakan Riset |



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat, jiwa, semangat, nilai dan konsensus dasar berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia kedepan adalah Indonesia yang maju dan berkembang, tahan menghadapi guncangan perubahan-perubahan, baik yang berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri sendiri. Bangsa Indonesia telah memasuki era globalisasi dan demokrasi yang maju serta desentralisasi yang luas dengan pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan guna tercapainya kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, kita masih menghadapi berbagai permasalahan pada berbagai aspek, seperti masalah moral, ekonomi kerakyatan, pendidikan, kesehatan, kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan perempuan dan anak dan sebagainya yang semuanya memerlukan prioritas untuk penanganan dan penanggulangannya.

Berbagai ancaman seperti tidak terpenuhinya secara baik kebutuhan dasar masyarakat, menjadi salah satu penyebab sulitnya atau melemahnya partisipasi masyarakat. Pendapatan keluarga yang relatif masih rendah, menyebabkan kurang terpenuhinya kebutuhan dasar keluarga sehingga produktivitas kerja rendah. Otonomi daerah merupakan suatu langkah awal pemerintah untuk mendorong daerah-daerah di Indonesia berkembang dengan memaksimalkan potensi sumberdaya yang terdapat di daerahnya masing-masing, baik berupa sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia.

Selanjutnya, keberhasilan suatu bangsa salah satunya ditentukan oleh perempuan. Perempuan mempunyai andil besar dalam membentuk sebuah keluarga yang bermartabat. Lebih dari itu, perempuan juga mempunyai andil besar dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dan kelompok yaitu dengan pendidikan dan keterampilan yang dimiliki. Salah satu buktinya, bahwa perempuan mampu meningkatkan kesejahteraan keluarganya dengan melakukan kegiatan usaha produktif rumah tangga.

Perempuan juga dipahami sebagai konsep biologis yaitu sebagai sosok ibu tapi karena perkembangan zaman perempuan tidak hanya sebagai konsep biologis tapi sebagai konsep perilaku, dimana perempuan merupakan tiang masyarakat, apabila baik perempuannya maka baik masyarakatnya. Selain itu juga perempuan merupakan agen pembaharu/perubahan sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki. Pendidikan perempuan secara stimulan dapat meningkatkan kemampuan, kualitas hidup keluarga dan masyarakat dan mengubah lingkaran kemiskinan pada masyarakat. Perempuan harus dibangun, ditingkatkan dan diberdayakan perekonomiannya agar memiliki pendapatan, sehingga bisa membantu kesejahteraan keluarga.

Kondisi keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat mempunyai arti yang besar dalam proses pembangunan, karena kondisi keluarga merupakan barometer bagi kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Untuk dapat membina keluarga secara langsung dan menjangkau sasaran sebanyak mungkin, maka dibentuk Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, yang mekanisme

gerakannya dikelola dan dilaksanakan oleh suatu Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP.PKK) di setiap jenjang.

Menurut sejarahnya, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai gerakan pembangunan masyarakat bermula dari Seminar *Home Economic* di Bogor tahun 1957. Sebagai tindak lanjut dari seminar tersebut, pada tahun 1961 Panitia Penyusunan Tata Susunan Pelajaran pada Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Kementerian Pendidikan bersama Kementerian-kementerian lainnya menyusun 10 Segi Kehidupan Keluarga. Gerakan PKK dimasyarakatkan berawal dari kepedulian isteri Gubernur Jawa Tengah pada tahun 1967 (Ibu Isriati Moenadi) setelah melihat keadaan masyarakat yang menderita busung lapar.

Pada tanggal 27 Desember 1972 Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Kawat No. Sus 3/6/12 kepada seluruh Gubernur KDH Tk. I Jawa Tengah dengan tembusan Gubernur KDH seluruh Indonesia, agar merubah nama Pendidikan Kesejahteraan Keluarga menjadi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga. Sejak itu Gerakan PKK dilaksanakan di seluruh Indonesia dengan nama Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan mendapat perubahan nama lagi menjadi Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang mana nama tersebut masih digunakan hingga sekarang.

PKK dapat dikatakan sebagai salah satu gerakan yang berupaya untuk meningkatkan kehidupan perempuan terutama di golongan bawah, yang diprakarsai oleh perempuan golongan atas. Gerakan ini merupakan usaha nasional yang mendapat subsidi dari pemerintah. Lingkup kegiatan gerakan perempuan ini dilakukan di seluruh Indonesia, terutama di daerah pedesaan dan golongan

menengah ke bawah. Fokus gerakan ini diarahkan pada upaya pembinaan kesehatan, gizi, *higiene* dan menambah pengetahuan tentang pendidikan anak serta menambah ketrampilan untuk menambah penghasilan. Sumbangan PKK dalam berbagai program pembangunan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat bagi sejumlah wilayah cukup positif dan sangat membantu pemerintah dalam menjalankan fungsinya.

Sebagaimana diketahui, PKK sudah begitu melembaga baik di tingkat propinsi, kabupaten, kecamatan maupun desa. Bahkan belakangan PKK dengan berbagai kegiatannya telah merambah hingga ke tingkat dusun dan Rukun Tetangga (RT). Agar pengelolaannya efektif maka di tingkat propinsi, kabupaten, kecamatan dan desa telah dibentuk Tim Penggerak (TP) PKK yang fungsinya selain mengkoordinir kegiatan, juga memfasilitasi berbagai kegiatan dalam rangka menunjang berbagai kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di wilayahnya masing-masing, termasuk di antaranya adalah dalam rangka membangun keluarga yang sejahtera. TP PKK baik di tingkat propinsi, kabupaten, kecamatan maupun desa selalu bergerak aktif melakukan pembinaan dan penyuluhan pada masyarakat dan ibu-ibu anggota dengan harapan hasil pembinaan dan penyuluhan tersebut dapat diterapkan oleh ibu-ibu di keluarganya masing-masing.

Selama lebih dari dua dasa warsa, pemerintah telah melaksanakan pemberdayaan perempuan yang hasilnya terlihat dari adanya peningkatan peran dan kedudukan perempuan di berbagai bidang kehidupan. Guna meningkatkan kualitas SDM perempuan Indonesia dan mewujudkan kemitrasejajaran antara

laki-laki dan perempuan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, pemerintah telah membentuk berbagai program dan sarana yang dapat membantu; salah satunya adalah organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di seluruh wilayah Indonesia. Organisasi ini telah diakui oleh masyarakat, bahkan PKK pada tahun 2007 mendapat penghargaan dari beberapa lembaga internasional (WHO, UNICEF, UNESCO, dan sebagainya) karena melalui 10 program pokoknya PKK telah mampu melibatkan perempuan (dan laki-laki) dalam upaya mewujudkan keluarga yang sejahtera, maju dan mandiri (Lilik, 2009).

Kesepuluh program pokok tersebut meliputi :

- a. Penghayatan dan Pengamalan Pancasila;
- b. Gotong Royong;
- c. Pangan;
- d. Sandang;
- e. Perumahan dan tata laksana rumah tangga;
- f. Pendidikan dan keterampilan;
- g. Kesehatan;
- h. Pengembangan kehidupan berkoperasi;
- i. Kelestarian lingkungan hidup; dan
- j. Perencanaan sehat.

(Permendagri nomor 1 tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga)

Dengan sepuluh program pokok PKK tersebut dapat diketahui secara jelas bahwa TP PKK memiliki agenda dan tujuan yang sangat mulia, yaitu ingin mencapai kemajuan dan kesejahteraan keluarga yang menjadi dambaan setiap keluarga. Supaya dalam pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka TP PKK membentuk Kelompok Kerja (Pokja) dengan spesifikasi penanganan yang khusus. Pokja-pokja tersebut (sekarang ada empat pokja)

berjalan seiring dan saling melengkapi sehingga koordinasi di antara keempat pokja tersebut sangat diperlukan untuk mencapai hasil yang optimal.

Dari sisi programnya, PKK pada awalnya diarahkan untuk mendorong kemajuan perempuan agar dapat memainkan peran gandanya secara baik, yaitu sebagai pengelola keluarga, pencari nafkah dan pelaku pembangunan. Akan tetapi sesuai dengan perkembangannya, program pemberdayaan perempuan kemudian diarahkan untuk mewujudkan kemitrasejajaran antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian sasarannya ditujukan untuk mengembangkan dan mengangkat berbagai potensi yang ada pada diri perempuan yang memungkinkan dirinya dapat memanfaatkan hak dan kesempatan yang sama terhadap sumber pembangunan (Biro Pemberdayaan Perempuan Kementerian Peranan Wanita, 2007). Hal tersebut diperkuat dengan komitmen pemerintah Indonesia terhadap Deklarasi Milenium yang ditandatangani dalam *United Nations Millenium Summit* di New York Amerika tahun 2000. Tujuan Pembangunan Milenium yang harus dicapai tahun 2015 antara lain adalah kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Perubahan politik, ekonomi, dan sosial di Indonesia dan komitmen Indonesia untuk mencapai Tujuan Pembangunan Milenium, berdampak pada perkembangan dan pelaksanaan operasional PKK. Tuntutan akan fleksibilitas PKK untuk menjadi agen pembangunan dan agen perubahan semakin kuat. Munculnya krisis ekonomi global dan lingkungan hidup (*eco system*) yang harus diatasi oleh pemerintah, menjadikan organisasi PKK sebagai agen pembangunan dan agen perubahan terdepan terutama dalam peningkatan kesejahteraan keluarga.

Berdasarkan data Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, tingkat kemiskinan di Kabupaten Rembang masih diatas rata-rata. Data 2010 lalu, beberapa kabupaten mempunyai prosentase diatas 16,11 persen masyarakat miskin Jawa Tengah. Tingkat kemiskinan di Rembang yakni mencapai 23,41 persen (www.sapa.or.id). Selain termasuk dalam daerah yang miskin, Di Jawa Tengah kabupaten yang termasuk kategori daerah tertinggal adalah Rembang, Banjarnegara, dan Wonogiri (Kepmen PDT No. 01 Tahun 2005).

Keberadaan PKK di Kabupaten Rembang dilihat sebagai organisasi yang hidup dan banyak memberikan kontribusi bagi sebagian masyarakat Rembang. Selama 41 tahun pelaksanaan gerakan PKK di Kabupaten Rembang dalam mendukung proses pembangunan bangsa ternyata mendapat dukungan dari berbagai pihak. Keberadaan Tim Penggerak PKK di setiap jenjang sendiri dapat membantu pemerintah dalam mengurangi kemiskinan yaitu dengan memberdayakan perempuan untuk bisa mencari penghasilan sendiri untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Hal ini mengandung makna bahwa eksistensi gerakan PKK telah diakui secara luas sebagai gerakan dari dan oleh masyarakat, merupakan mitra kerja pemerintah dalam melaksanakan pembangunan.

Gerakan PKK sebagai gerakan dari bawah, bermanfaat bagi masyarakat terutama di daerah pedesaan. Selain itu juga turut berperan dalam membangun dunia pendidikan khususnya pada pendidikan Usia Dini (PAUD), Bidang Kesehatan PKK dituntut menghidupkan Posyandu dan membantu membantu ibu yang melahirkan dan akan melahirkan sehingga mengurangi angka kematian ibu

dan anak saat proses persalinan, di bidang ekonomi diharapkan PKK dapat membantu usaha kecil menengah yang dilakukan kaum ibu. Hal terpenting yaitu menyiapkan kader-kader PKK di setiap perkampungan serta dapat melakukan pembinaan kadernya sendiri untuk dapat menyesuaikan sumberdaya sesuai dengan tuntutan dinamika yang berkembang dewasa ini.

Gerakan yang dimotori oleh kaum perempuan ini juga terbukti mendukung secara nyata terhadap akselerasi pembangunan melalui 10 program pokok yang dilaksanakan oleh organisasi ini. SDM yang terdiri dari kaum ibu dan wanita ini merupakan potensi yang cukup strategis perlu dilibatkan untuk berperan aktif dalam pembangunan desa, kecamatan maupun kabupaten. Kaum ibu juga berfungsi sebagai motor penggerak bagi keluarga yang harus terus dilatih dan ditingkatkan pengetahuan dan kemampuannya dalam memberdayakan dan mensejahterakan keluarganya. Dikatakan Ruslan Abdul Gani :

“meskipun telah banyak peran yang dilakukan, namun tentunya tim penggerak PKK senantiasa berkewajiban untuk meningkatkan perannya, guna mengantisipasi permasalahan yang berkembang dan menjawab berbagai tantangan yang semakin kompleks yang menuntut perhatian yang lebih besar, agar eksistensi dan peran tim penggerak PKK mendapatkan legitimasi yang kuat dari seluruh komponen pembangunan dan masyarakat pada umumnya. untuk itu, anggota PKK sebagai agen informasi dan agen pembaharu dalam pembangunan, harus senantiasa meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan serta sikap mental agar dapat mengikuti perkembangan sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat.”
(www.kabargayo.com)

Dari 10 program pokok PKK yang ada, peneliti tertarik memfokuskan penelitian pada salah satu program yaitu program pendidikan dan keterampilan di Kecamatan Kaliori. Kecamatan Kaliori merupakan kecamatan yang berada paling ujung barat Kabupaten Rembang yang memiliki 23 desa yang terbagi ke dalam 70

Rukun Warga (RW) dan 255 Rukun Tetangga (RT). Sebagaimana masyarakat bermata pencaharian sebagai nelayan, petani tambak dan petani sawah yang pengasilannya musiman. Untuk itu maka PKK melalui program pendidikan dan keterampilan memberdayakan ibu-ibu di kecamatan setempat, harapannya yaitu untuk menambah penghasilan keluarga. Selain itu, kecamatan yang terdiri dari desa-desa tersebut juga masih banyak masyarakatnya yang menyandang status buta aksara.

Dengan kondisi masyarakatnya yang seperti itu, Kecamatan Kaliore ternyata memiliki keunggulan dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan yang lain di Kabupaten Rembang. Berdasarkan data yang ada di sekeratariat, Tim penggerak PKK kecamatan Kaliore secara berturut-turut kurun waktu 4 tahun mulai 2007 hingga 2010 Juara I Tingkat Kabupaten dan ditetapkan menjadi juara umum. Selain itu Tim Penggerak PKK Kecamatan Kaliore dan Tim Penggerak PKK Desa Dresi wetan kecamatan Kaliore menjadi pelaksana terbaik sepuluh program Pokok PKK tingkat Kecamatan dan Desa tahun 2011.

Pemberdayaan yang diberikan oleh Tim Penggerak (TP) PKK dapat berupa pemberian keterampilan menjahit kepada ibu-ibu, pembuatan tas, penuntasan masyarakat penyandang buta aksara, dan lain-lain. Mutu pendidikan juga ada peningkatan berkat didikan seorang Ibu yang baik dan banyak lagi hal-hal yang telah dikerjakan sehingga bisa menambah kesejahteraan keluarganya, dan tidak kalah pentingnya pendidikan budi pekerti luhur dan penanaman ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa selalu diprioritaskan dalam pelaksanaan program kerjanya.

Pada pelaksanaan temu kader ditingkat Provinsi tahun 2012 TP PKK kabupaten Rembang berhasil meraih Juara 1 lomba membuat Alat Permainan Edukatif (APE) atas nama Retno Sulistyowati dari TP PKK Desa Tambak Agung Kecamatan Kaliori dan Juara II Lomba Pidato atas nama Sarinten dari TP PKK Desa Wirotto Kecamatan Kaliori sehingga yang bersangkutan akan mewakili TP PKK Jawa Tengah pada pelaksanaan Temu Kader PKK tingkat nasional di Jakarta. (www.tp-pkkkabrembang.org)

Dengan permasalahan yang ada, maka peneliti mengambil penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Peran Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (Pkk) dalam Memberdayakan Perempuan (Studi tentang Program Pendidikan dan Keterampilan di Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang)”**.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Peran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Memberdayakan Perempuan Program Pendidikan dan Keterampilan di Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang ?
2. Apa sajakah faktor-faktor pendukung dan penghambat Pelaksanaan Peran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Memberdayakan Perempuan Program Pendidikan dan Keterampilan di Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis Pelaksanaan Peran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam memberdayakan perempuan program pendidikan dan keterampilan di Kecamatan Kaliore Kabupaten Rembang.
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat Pelaksanaan Peran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam memberdayakan perempuan program pendidikan dan keterampilan di Kecamatan Kaliore Kabupaten Rembang.

D. Kontribusi Penelitian

Kontribusi yang berhubungan dengan penyusunan skripsi adalah sebagai berikut :

1. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Administrasi Publik dan memberikan informasi ilmiah berupa pengembangan teoritis khususnya mengenai penanganan masalah pembangunan dengan adanya kontribusi dari organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam memberdayakan perempuan sehingga

dapat membantu mengurangi kemiskinan khususnya di pedesaan dan menciptakan kesejahteraan keluarga.

2. Secara Praktis

Diharapkan penelitian ini berguna bagi :

- a. Masyarakat pemerhati kajian tentang pembangunan khususnya pembangunan sosial dan ekonomi yang diarahkan kepada organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
- b. Menjadikan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Rembang khususnya bagi Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan informasi untuk lebih meningkatkan kualitas hidup dan perekonomian di Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang.

E. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian serta sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan mengenai landasan-landasan teori yang akan digunakan untuk mendasari penulisan skripsi.

BAB III : METODE PENELITIAN

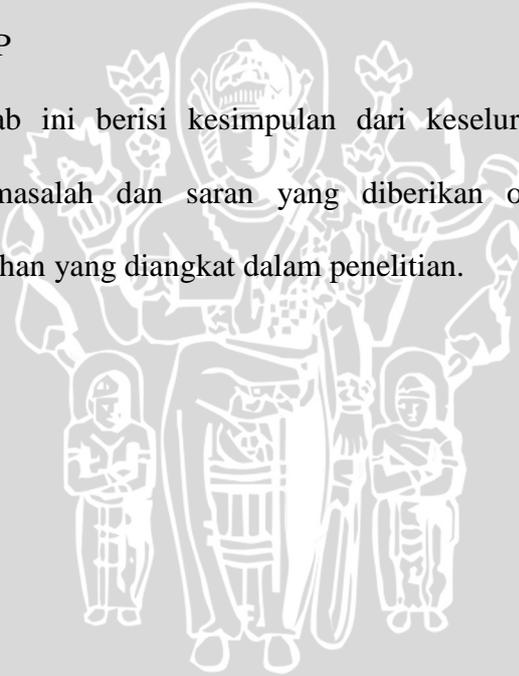
Dalam bab ini diuraikan tentang jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian serta metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan hasil penelitian yang merupakan olahan bahan-bahan dan data oleh peneliti setelah melakukan penelitian di lapangan.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan analisis masalah dan saran yang diberikan oleh penulis pada permasalahan yang diangkat dalam penelitian.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Perempuan dan Pembangunan Nasional

1. Pembangunan Nasional

Pembangunan Nasional sebagai pengamalan Pancasila diselenggarakan oleh pemerintah bersama seluruh rakyat. Pembangunan nasional adalah pembangunan dari, oleh dan untuk rakyat, yang dilaksanakan di semua aspek kehidupan bangsa yang meliputi aspek politik, ekonomi, social budaya dan aspek pertahanan keamanan. Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus-menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis berdasarkan pancasila. Dalam rangka pembangunan nasional, pemerintah tidak hanya melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan tetapi juga sekaligus melaksanakan tugas pembangunan, yaitu untuk mengarahkan, menggerakkan dan mengendalikan pembangunan secara lancar, serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan.

Tugas umum pemerintahan adalah kegiatan yang secara rutin dilakukan oleh pemerintah pada umumnya dalam rangka pemberian pengayoman dan pelayanan untuk mewujudkan ketertiban, ketentraman, dan kesejahteraan seluruh rakyat. Dalam rangka fungsi pengayoman dan pelayanan tersebut tercakup tugas pokok perumusan dan penetapan kebijaksanaan nasional, kebijaksanaan umum,

kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis; pemberian bimbingan, pembinaan dan perizinan; pengelolaan kekayaan milik negara; penyediaan informasi dan sebagainya. Sedang tugas-tugas pembangunan adalah tugas-tugas pemerintah dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pembangunan yang meliputi kegiatan-kegiatan penyusunan rencana, pemrograman, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional secara efisien dan efektif.

Dalam hubungannya dengan tugas pembangunan, pemerintah berkewajiban dan mengutamakan ketelibatannya dalam pemberian pengarahan, bimbingan dan menciptakan iklim yang menggairahkan masyarakat untuk membangun serta menumbuhkembangkan prakarsa, kreativitas, oto-aktivitas dan partisipasi masyarakat untuk membangun. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah berperan sebagai pembaharu/inovator, stabilisator, penggerak pembangunan (*agent of development*), penggerak modernisasi (*agent of modernization*) dan penggerak perubahan (*agent of change*).

Sistem administrasi publik Indonesia adalah keseluruhan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia, dengan memanfaatkan dan mendayagunakan segala kemampuan aparatur negara serta segenap dana dan daya demi terciptanya tujuan nasional dan terlaksananya tugas Negara Republik Indonesia seperti ditetapkan dalam UUD 1945. Dengan demikian, tugas, fungsi dan peranan administrasi publik dalam pembangunan adalah identik dengan tugas, fungsi serta peranan pemerintah negara itu sendiri, dan dilaksanakan oleh aparatur negara. Memperhatikan tugas dan fungsi administrasi publik tersebut, maka dapat

dikatakan bahwa keberhasilan pembangunan nasional sebagian besar ditentukan oleh kemampuan administrasi publik.

2. Peran Perempuan dalam Pembangunan Nasional

Pengertian “peran” menurut W.J.S. Poerwadarminta yang ditulis di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1985:735) berarti “sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan yang terutama”. Peran juga bisa berkembang menjadi kata “peranan”. “Peranan” menurut Levinson sebagaimana dikutip oleh Soejono Soekamto (1982:238), sebagai berikut :

“Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat, peranan meliputi norma-norma yang dikembangkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.”

Sedangkan menurut Daryanto (1997:478) “peranan” adalah yang diperbuat, tugas, hal yang besar pengaruhnya pada suatu peristiwa. Menurut Mukijat (1983:136) menyatakan “peranan” adalah fungsi-fungsi yang menunjukkan kegiatan pada pekerjaan yang diusulkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan yang dimaksud dengan “peran” adalah sesuatu yang menjadi bagian atau menjadi pelaku yang mengarahkan berdasarkan peraturan-peraturan atau prinsip-prinsip guna mencapai tujuan yang diinginkan baik secara perseorangan maupun kelompok. Sedangkan maksud dari “peran” jika dihubungkan dengan dengan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) adalah tindakan, usaha-usaha yang dilakukan oleh PKK untuk mensejahterakan keluarga.

Dalam perspektif administrasi publik, salah satu fungsi administrasi negara adalah pembangunan nasional. Untuk mewujudkan pembangunan nasional sendiri membutuhkan banyak peranan salah satunya adalah perempuan. Menurut Hidayat (1980:103), Peranan perempuan dalam pembangunan nasional dilandaskan kepada beberapa landasan : landasaan idiil adalah Pancasila; landasan konstitusional adalah Undang-Undang Dasar 1945; landasan operasional adalah Garis-Garis Besar Haluan Negara, Sapta Krida Kabinet Pembangunan III, Pidato Kenegaraan Presiden Soeharto pada tanggal 1978 di depan Sidang DPR RI, dimana antara lain dijabarkan delapan Jalur Pemerataan, demikian pula kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diaturinya peranan wanita di dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara, sebagai produk MPR yang merupakan Lembaga Tinggi Negara, memberikan dasar yang sangat kokoh bagi peranan wanita dalam pembangunan. Di dalam GBHN tahun 1973 (Tap MPR No.IV/MPR73) peranan wanita diatur di dalam bagian tentang Pembinaan Keluarga Sejahtera dengan redaksi sebagai berikut :

“Pembinaan keluarga yang sejahtera adalah sarana bagi pembinaan Generasi Muda. Untuk pembinaan keluarga yang sedemikian itu maka hak-hak wanita dijamin serta kedudukannya dalam keluarga dan masyarakat dilindungi“.

Di dalam GBHN 1978 (Tap MPR No.IV/MPR/78) peranan perempuan diatur di dalam bagian khusus dengan ketentuan yang lebih luas dan lebih jelas.

Secara lengkapnya ditetapkan sebagai berikut :

Peranan perempuan dalam Pembangunan dan Pembinaan Bangsa

- a. Pembangunan yang menyeluruh mensyaratkan ikut sertanya laki-laki maupun perempuan secara maksimal di segala bidang, oleh karena itu perempuan mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk ikut serta sepenuhnya dalam segala kegiatan pembangunan.
- b. Peranan perempuan dalam pembangunan tidak mengurangi peranannya dalam pembinaan keluarga sejahtera umumnya dan pembinaan generasi muda khususnya, dalam rangka pembinaan manusia Indonesia seutuhnya.
- c. Untuk lebih memberikan peranan dan tanggung jawab kepada kaum perempuan dalam pembangunan, maka pengetahuan dan keterampilan wanita perlu ditingkatkan di berbagai bidang yang sesuai dengan kebutuhannya.

B. Pengarusutamaan Gender (PUG)

1. Pengertian Pengarusutamaan Gender (PUG)

- a. Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah.
- b. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

- c. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

(Permendagri Nomor 15 Tahun 2008)

2. Pengarusutamaan Gender Dalam pembangunan

Mufidah (2013:89), mengatakan bahwa kesetaraan dan keadilan gender merupakan bagian dari penegakan Hak-hak Asasi Manusia yang menjadi pembahasan khusus dalam forum-forum internasional sejak tahun 1980-an. Perhatian dunia semakin meningkat terhadap kesetaraan gender sebagai bagian penting dalam mencapai kesejahteraan dan keberhasilan pembangunan. Gender dalam konteks ini diintegrasikan ke dalam pendekatan kesejahteraan universal yang menjadi bagian dari perangkat hukum dan kesepakatan internasional di bawah PBB. Adapaun kesetaraan dan keadilan gender diterapkan melalui strategi *Gender Mainstreaming* atau Pengarusutamaan Gender (PUG) yang merupakan pematangan dari strategi *Gender and development*.

Selama ini, pendekatan pembangunan belum secara khusus mempertimbangkan manfaat pembangunan secara adil terhadap perempuan dan laki-laki sehingga turut memberi kontribusi terhadap timbulnya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender. Adapun kesenjangan gender dalam pembangunan ditandai dengan :

1. Kesenjangan bidang pendidikan baik pada akses dan partisipasi, terutama pada tingkat perguruan tinggi, dan masih adanya gender *stereotype* dalam pilihan jurusan akibat pemberian peran dikotomis (seksis) terhadap keduanya. Dengan demikian semakin tinggi jenjang pendidikan maka semakin kecil jumlah partisipasi perempuan, dan pengelompokkan bidang studi yang ditekuni keduanya atas dasar jenis kelamin.
2. Masih rendahnya peluang bagi perempuan untuk bekerja dan berusaha, akses dan peran di bidang ekonomi, teknologi informasi, pasar, kredit dan modal kerja. Meskipun sebagian perempuan telah banyak berperan pada sektor ekonomi, tetapi masih dianggap sebagai pencari nafkah tambahan yang berakibat pada penghargaan terhadap mereka masih tidak setara dengan laki-laki.
3. Kesehatan reproduksi bagi perempuan di Indonesia masih perlu memperoleh perhatian khusus. Angka kematian ibu melahirkan masih tinggi, belum terpenuhinya gizi bagi ibu dan anak serta kelangsungan hidup anak, penggunaan alat kontrasepsi aman dan sebagainya.
4. Belum terwujudnya keseimbangan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan publik sehingga kebutuhan gender praktis maupun kebutuhan gender strategis masih belum terpenuhi.

Untuk itu, strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional menjadi pilihan tepat sebagai solusi atas problem kesenjangan gender tersebut.

(Inpres Nomor 9 tahun 2000)

3. Strategi PUG

Menurut Nugroho (2008:183-185), Konsep strategis dalam pengarus-utamaan gender nasional Indonesia yang disusun oleh Kantor Meneg PP bekerja sama dengan UNDP berkenaan dengan tiga sektor pokok yang diacu dalam Indikator Pembangunan Manusia atau *Human Development Index* (HDI), yaitu :

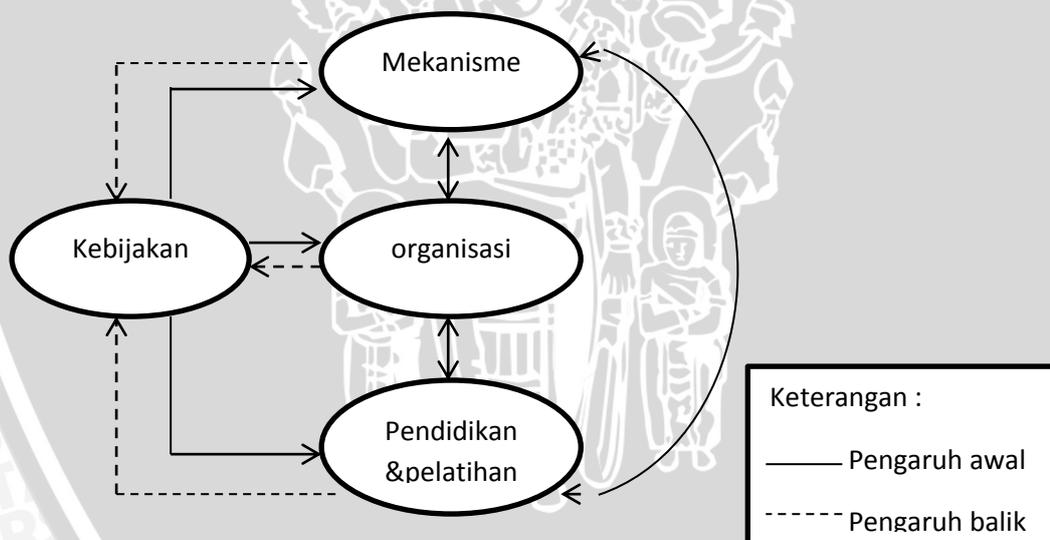
- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Ekonomi

Mengingat terdapat satu sektor yang strategis dan dapat dipergunakan sebagai payung dari ketiga sektor strategis, yaitu dalam administrasi publik dan desentralisasi, maka sektor ini ditambahkan sebagai sektor keempat. Konsep strategis yang dipergunakan di sini mengedepankan beberapa prinsip pokok yang menjadi acuan dari pembangunan hari ini yaitu:

1. Adanya kemitraan antara negara dan masyarakat, khususnya dengan tujuan pembangunan masyarakat yang madani (*civil society*). Pendekatan ini merupakan pendekatan yang melihat bahwa pembangunan hari ini khususnya pengarus-utamaan gender tidak lagi bisa dengan pola *government* (atau *state driven*), melainkan *government* (atau *state*) and *society driven*. Di sini unsur-unsur masyarakat, khususnya lembaga swadaya masyarakat baik yang berbasiskan massa, menjadi mitra yang strategis.
2. Mengedepankan pemberdayaan sebagai inti pendekatan. Pemberdayaan adalah sebuah konsep yang berdekatan dengan demokrasi dan penegakan Hak Asasi Manusia, karena mempunyai empat unsur pokok : kesamaan hak bagi

perempuan dan laki-laki untuk melakukan askes terhadap sumberdaya pembangunan, untuk berpartisipasi dalam pembangunan, untuk ikut mengontrol proses pembangunan, dan untuk ikut menikmati hasil-hasil pembangunan.

3. Melakukan intervensi terhadap institusi-institusi yang paling strategis untuk mencapai kesiapan (*critical mass*) dan menuju pembangunan yang berkesetaraan gender. Merujuk pada latar belakang kesenjangan gender, maka institusi strategis yang menjadi fokus untervensi adalah kebijakan, meknisme, organisasi, dan pendidikan & pelatihan. Dalam gambar strategis, keempatnya dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1 : Intervensi terhadap Institusi-institusi Strategis
 Sumber : Nugroho (2008:185)

4. Mengenai faktor-faktor faktual sebagai batas-batas tujuan ideal yang hendak dicapai. Faktor yang dinilai paling utama adalah kebijakan desentralisasi melalui UU No 32 tahun 2004 mengenai Otonomi Daerah beserta kebijakan

pendukung dan yang terkait dengan kebijakan tersebut, baik ditingkat pusat maupun daerah.

C. Pemberdayaan

1. Pengertian Pemberdayaan

Menurut Lie sebagaimana dikutip Huraerah (2008:82) menyatakan bahwa “Pemberdayaan berasal dari bahasa inggris *empowerment*, yang secara harfiah bisa diartikan sebagai pemberi kekuasaan, dalam arti pemberian atau peningkatan kekuasaan kepada masyarakat yang lemah atau tidak beruntung”. Menurut Sumodiningrat (1996: 185) menyatakan memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkat kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain pemberdayaan bermaksud untuk mengembangkan kemampuan masyarakat agar secara mandiri memiliki keterampilan untuk mengatasi masalah-masalah mereka sendiri. Sedangkan Suharto (2006:58-59) menyebutkan beberapa definisi yang diambil dari beberapa ahli, yaitu :

- 1) Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah dan tidak beruntung.
- 2) Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagai pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya.
- 3) Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial.
- 4) Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya.

Dengan demikian dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan seseorang atau kelompok baik yang bersifat pendidikan, sosial, ekonomi, maupun lingkungan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan melibatkan lembaga-lembaga tertentu.

2. Strategi Pemberdayaan

Upaya pemberdayaan masyarakat memerlukan proses dan tahapan-tahapan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam pemberdayaan masyarakat harus tersusun dengan baik, baik itu rencana, implementasi, maupun evaluasi yang akan dilakukan nantinya agar pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan baik dan tercapainya tujuan sebagaimana yang diharapkan. Menurut Aziz (dalam Huraerah, 2008:88) merinci tahapan strategi yang harus dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu sebagai berikut :

- a) Membantu masyarakat dalam menemukan masalahnya.
- b) Melakukan analisis (kajian) terhadap permasalahan tersebut secara partisipatif. Kegiatan ini biasanya dilakukan dengan cara curah pendapat, membentuk kelompok-kelompok diskusi, dan mengadakan pertemuan warga secara periodik (terus-menerus).
- c) Menentukan skala prioritas masalah, dalam arti memilah dan memilih setiap masalah yang paling mendesak untuk diselesaikan.
- d) Mencari penyelesaian masalah yang sedang dihadapi, antara lain dengan pendekatan sosio-kultural yang ada dalam masyarakat.
- e) Melaksanakan tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi.
- f) Mengevaluasi seluruh rangkaian dan proses pemberdayaan itu untuk dinilai sejauh mana keberhasilan dan kegagalannya.

Didalam strategi pemberdayaan masyarakat dikenal juga dengan pendekatan pemberdayaan. “Didalam pendekatan pemberdayaan pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan dapat dicapai melalui penerapan

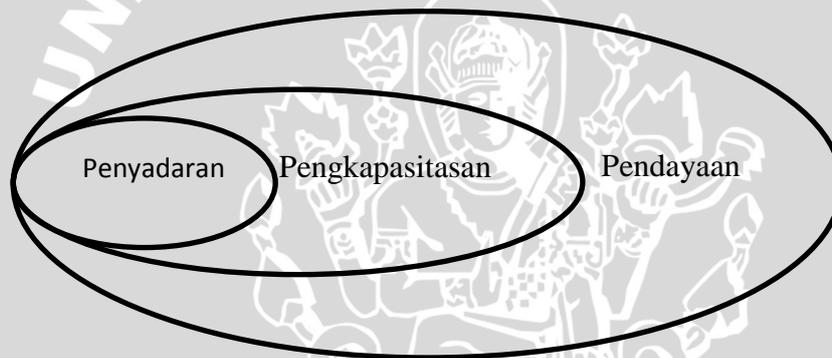
pendekatan pemberdayaan yang disingkat 5P, yaitu: Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan, dan pemeliharaan” (Suharto 1997:218-219). Hal itu dapat diuraikan sbagai berikut :

- 1) Pemungkinan : menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.
- 2) Penguatan : memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh-kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
- 3) Perlindungan : melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah adanya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Arahkan pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
- 4) Penyokongan : memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi semakin lemah dan terpingirkan.

- 5) Pemeliharaan : memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antar kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

3. Tahap Pemberdayaan

“Pemberdayaan adalah sebuah proses menjadi, bukan sebuah proses instant. Sebagai proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan: penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan” (Wrihatnolo dan Nugroho, 2007:2)



Gambar 2 : Tahap Pemberdayaan

Sumber : Wrihatnolo dan Nugroho (2007:3)

Tahap pertama adalah penyadaran. Pada tahap ini target yang hendak diberdayakan diberikan pencerahan dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk memiliki sesuatu. Misalnya, target adalah kelompok masyarakat miskin, kepada masyarakat miskin diberikan pemahaman bahwa mereka dapat menjadi berada, dan itu dapat dilakukan jika mereka mempunyai kapasitas untuk keluar dari kemiskinan.

Tahap kedua adalah pengkapasitasan. Inilah yang sering disebut *capacity building* atau dalam bahasa yang lebih sederhana yaitu memampukan atau

enabling. Untuk memberikan daya atau kuasa, yang bersangkutan harus mampu terlebih dahulu. Proses *capacity building* terdiri atas tiga jenis, yaitu manusia, organisasi dan sistem nilai. pengkapasitasan manusia artinya memampukan manusia baik dalam konteks individu maupun keompok seperti melalui pelatihan, *workshop*, seminar dan lain sebagainya. Pengkapasitasan organisasi dilakukan dalam bentuk restrukturisasi organisasi yang hendak menerima daya atau kapasitas tersebut. Misalnya untuk kelompok miskin dibuatkan badan usaha. Pengkapasitasan selanjutnya adalah sistem nilai. Setelah orang dan wadahnya dikapitasikan maka begitu pula dengan sistem nilainya atau sering disebut juga dengan aturan main. Dalam cakupan organisasi sistem nilai sering pula disebut dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Pengkapasitasan sistem nilai dilakukan dengan membantu target dan membuatkan aturan main di antara mereka sendiri.

Tahap ketiga adalah pemberian daya itu sendiri atau *empowerment* dalam makna yang lebih sempit. Pada tahap ini target diberikan daya, kekuasaan, otoritas maupun peluang. Pemberian ini sesuai dengan kecakapan dan kualitas yang telah dimiliki.

4. Indikator Pemberdayaan

Sculer, Hasbemi dan Riley sebagaimana dikutip oleh Suharto (2004) mengembangkan delapan indikator pemberdayaan, yang mereka sebut sebagai *empowerment index*. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, kemampuan kultural dan politis. Ketiga aspek tersebut

dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan, yaitu: kekuasaan di dalam (*power within*), kekuasaan untuk (*power to*), kekuasaan atas (*power over*) dan kekuasaan dengan (*power with*), yakni sebagai berikut :

- a. Kebebasan mobilitas: kemampuan individu untuk pergi keluar rumah atau wilayah tempat tinggalnya, seperti ke pasar, fasilitas medis, bioskop, rumah ibadah, ke rumah tetangga. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendiri.
- b. Kemampuan membeli komoditas kecil. Kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari (beras, minyak tanah, minyak goreng, bumbu), kebutuhan dirinya (minyak rambut, sabun mandi, shampo). Individu dapat melakukan kegiatan ini terutama jika dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta izin pasangannya, terlebih jika dapat membeli barang-barang tersebut dengan uangnya sendiri.
- c. Kemampuan membeli komoditas besar. Kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier (lemari pakaian, TV, radio, koran, majalah, pakaian keluarga. Seperti halnya indikator diatas, poin tinggi diberikan terhadap individu yang dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta izin pasangannya, terlebih jika dapat membeli barang-barang tersebut dengan uangnya sendiri.
- d. Terlibat dalam keputusan-keputusan rumah tangga, mampu membuat keputusan sendiri maupun bersama suami/istri mengenai keputusan-keputusan rumah keluarga misalnya mengenai renovasi rumah, pembelian kambing untuk ditanam, memperoleh kredit usaha.
- e. Kebebasan reatif dari dominasi keluarga: responden ditanya mengenai apakah dalam satu tahun terakhir ada seseorang (suami,istri,anak-anak,mertua) yang mengambil uang, tanah, perhiasan dari dia tanpa ijinnya, yang melarang mempunyai anak atau melarang bekerja di luar rumah.
- f. Kesadaran hukum dan politik: mengetahui nama salah seorang pegawai pemerintahan desa/kelurahan, seorang anggota DPRD setempat, nama presiden, mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hukum-hukum waris.
- g. Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes: seorang dianggap berdaya jika di atermelibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes, misalnya terhadap suami yang memukul istri, istri yang mengabaikan suami dan keluarganya, gaji yang tidak adil, penyalahgunaan bantuan sosial, atau penyalahgunaan kekuasaan polisi dan pegawai pemerintahan.
- h. Jaminan ekonomi dalam kontribusi terhadap keluarga: memiliki rumah, aset produktif, tabungan, seseorang dianggap memiliki poin tinggi jika dia memiliki aspek-aspek tertentu secara sendiri atau terpisah dari pasangannya.

Upaya pemberdayaan tidak berhenti pada pencapaian kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari tetapi lebih pada peningkatan kapasitas individu tersebut agar mampu melaksanakan fungsi yang lebih. Pembangunan masyarakat dan pemberdayaan tidak mungkin dipisahkan dari arena konteks dimana ia beroperasi. Pemberdayaan masyarakat melakukan bagian dari strategi dan program kesejahteraan sosial.

Kebijaksanaan langsung diarahkan pada pemberdayaan masyarakat secara nasional dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung kebutuhan dasar berupa pangan, sandang, perumahan, kesehatan, dan pendidikan, peningkatan produktifitas dan pendapatan khusus bagi masyarakat yang berpendapatan rendah. Indikator keberhasilan yang dipakai untuk mengukur pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat sesuai dengan apa yang dicanangkan oleh pemerintah mencakup :

1. Berkurangnya jumlah penduduk miskin,
2. Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia,
3. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya,
4. Meningkatkan kemandirian kelompok yang ditandai dengan semakin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, semakin kuatnya permodalan kelompok, semakin rapinya sistem administrasi kelompok, serta semakin luasnya interaksi kelompok lain di masyarakat, serta

5. Meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai oleh peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasarnya.

Secara umum pendekatan pemberdayaan pada intinya memberikan tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, langsung (melalui partisipasi) demokratis dan pembelajaran sosial melalui pengalaman langsung. Sebagai titik fokus dari pemberdayaan ini adalah aspek lokalitas, sebab *civil society* akan merasa lebih siap diberdayakan lewat isu-isu lokal, sangat tidak realistis apabila kekuatan-kekuatan ekonomi dan struktur-struktur di luar *civil society* diabaikan.

5. Pemberdayaan dalam Konsep Pembangunan

Konsep pemberdayaan masyarakat dalam konteks perkembangan paradigma pembangunan ada sejak munculnya model pembangunan Harrod Domar hingga model pembangunan manusia Chinery. Dalam model Harrod Domar “pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh dua unsur pokok yaitu tingkat tabungan (investasi) dan produktivitas kapital (*capital output ratio*)” (Wrihatnolo dan Nugroho, 2007:62), Chenery dan Syrquin (1975) dalam (Wrihatnolo dan Nugroho, 2007:59) mengatakan bahwa “perkembangan perekonomian akan mengalami transformasi (konsumsi, produksi, dan lapangan kerja) dari perekonomian yang didominasi sektor pertanian menjadi perekonomian yang didominasi sektor industri dan jasa”. Artinya dalam perkembangan konteks pembangunan selanjutnya masyarakat harus siap menerima perubahan-perubahan.

Maka dari itu masyarakat perlu menjadi mampu dalam menerima itu semua, dan diperlukannya apa yang disebut konsep pemberdayaan.

“Konsep *Empowerment* (pemberdayaan) muncul karena dua premis mayor, yakni kegagalan dan harapan (Friedmann, 1992). Kegagalan yang dimaksud adalah gagalnya model-model pembangunan ekonomi dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan lingkungan yang berkelanjutan. Sementara itu, harapan muncul karena adanya alternatif-alternatif pembangunan yang memasukan nilai-nilai demokrasi, persamaan gender, persamaan antar generasi, dan pertumbuhan ekonomi yang memadai”. (Wrihatnolo dan Nugroho, 2007:59)

Konsep pemberdayaan (*empowerment*) merupakan suatu konsep dari pembangunan. Didalam pembangunan masyarakat harus berubah secara sadar dan terencana untuk menuju ke arah yang lebih baik. Perubahan kearah masyarakat yang lebih baik ada di dalam konsep pemberdayaan.

6. Pemberdayaan Perempuan

Menurut Nugroho (2008:163) Pemberdayaan perempuan merupakan tuntutan hak asasi manusia. Ketika paradigma pembangunan ditekankan pada pentingnya manusia dan nilai-nilai kemanusiaan, maka mau tidak mau perhatian terhadap kebutuhan kaum perempuan menjadi agenda penting bagi negara. Selama kondisi perempuan masih terpuruk dan diwarnai kerentanan akibat ketidakadilan gender yang dihadapinya, negara dan masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk melakukan berbagai upaya agar hak perempuan sebagai anggota masyarakat dapat terpenuhi.

Berbagai bentuk ketidakadilan yang seringkali dialami perempuan dalam berbagai bentuk, seperti marjinalisasi, beban kerja yang panjang dan berat, diskriminasi upah, pengabaian hingga pelanggaran hak-hak reproduksi perempuan, penganiayaan serta berbagai bentuk kekerasan, harus dapat

dihilangkan dari masyarakat yang dalam slogan-slogannya sangat peduli terhadap manusia dan nilai-nilai kemanusiaan. Program pemberdayaan perempuan harus segera dilakukan serentak, berkesinambungan, dan melibatkan semua elemen masyarakat. Upaya pemberdayaan perempuan juga harus dilakukan secara nyata, tidak hanya bersifat slogan dan berhenti pada tingkat wacana. Untuk itu, dirancang program pemberdayaan perempuan dalam pembangunan yang antara lain bertujuan untuk :

1. Meningkatkan kemampuan kaum perempuan untuk melibatkan diri dalam program pembangunan, sebagai partisipan aktif (subjek) agar tidak sekedar menjadi objek pembangunan seperti yang terjadi selama ini;
2. Meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam kepemimpinan, untuk meningkatkan posisi tawar-menawar dan keterlibatan dalam setiap program pembangunan baik sebagai perencana, pelaksana, maupun melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan;
3. Meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam mengelola usaha skala rumah tangga, industri kecil maupun besar untuk menunjang peningkatan kebutuhan rumah tangga, maupun untuk membuka peluang kerja produktif dan mandiri;
4. Meningkatkan peran dan fungsi organisasi perempuan di tingkat lokal sebagai wadah pemberdayaan kaum perempuan agar dapat terlibat secara aktif dalam program pembangunan pada wilayah tempat tinggalnya.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, beberapa program diusulkan sebagai program pemberdayaan perempuan. Paket-paket kegiatan yang ditawarkan dalam program-program tersebut meliputi :

1. Penguatan organisasi kelompok perempuan di segala tingkat mulai dari kampung hingga nasional. Selama ini kita kenal adalah kegiatan PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) serta kelompok-kelompok sosial keagamaan seperti pengajian, persekutuan doa, koperasi dan yayasan sosial. Penguatan kelembagaan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan lembaga, agar dapat berperan aktif sebagai perencana, pelaksana, maupun pengontrol.
2. Peningkatan fungsi dan peran organisasi perempuan, dalam pemasaran sosial program-program pemberdayaan masyarakat. Hal ini penting mengingat selama ini program pembangunan yang ada, kurang disosialisasikan dan kurang melibatkan peran masyarakat.
3. Pelibatan kelompok perempuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring semua program pembangunan yang ada. Keterlibatan perempuan meliputi program pembangunan fisik, penguatan ekonomi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan yang ada harus mampu memenuhi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok perempuan. Pembangunan untuk kepentingan perempuan tentu harus pula melibatkan perempuan. Dengan melibatkan kaum perempuan secara aktif sejak tahap perencanaan, pemenuhan kebutuhan gender secara

praktis (jangka pendek) maupun strategis (jangka panjang) diharapkan dapat terwujud.

4. Peningkatan kemampuan kepemimpinan perempuan, agar dapat mempunyai posisi tawar yang setara serta memiliki akses dan peluang untuk terlibat dalam pembangunan. Para perempuan yang mempunyai kemampuan sebagai pemimpin, diharapkan dapat memperjuangkan kepentingan kaum perempuan dalam proses pembangunan di wilayahnya.
5. Peningkatan kemampuan anggota kelompok perempuan dalam bidang usaha (skala industri kecil/rumah tangga hingga skala industri besar) dengan berbagai ketrampilan yang menunjang seperti; kemampuan produksi, kemampuan manajemen usaha, serta kemampuan untuk mengakses kredit dan pemasaran yang lebih luas.

D. Kesejahteraan Keluarga

1. Konsep Keluarga Sejahtera

Keluarga sejahtera merupakan idaman bagi setiap orang yang berniat membentuk rumah tangga. Kriteria dan arti sejahtera antara satu sama lainnya berbeda-beda. Untuk memahami tentang keluarga sejahtera diperlukan beberapa pengertian mengenai konsep dan persepsi masyarakat terhadap keluarga sejahtera. Hidup berkeluarga ternyata menurut Hadiwardoyo (1994:8) tidak dilihat sebagai urusan yang bersifat pribadi atau masyarakat, melainkan juga berkaitan dengan cara hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam kehidupan sosial keluarga merupakan cara hidup yang didukung oleh masyarakat. Dalam arti yang lebih

luas, keluarga hidup ditengah-tengah perkembangan peradaban dari tradisional sampai era globalisasi. Pembentukan keluarga ini tidak akan terlepas dari kondisi dan lingkungan yang terdapat disekitarnya. Berkaitan dengan hal ini tentunya pembentukan keluarga sejahtera sangat ditentukan oleh lingkungan tempat tinggal masyarakat tersebut.

2. Kesejahteraan Keluarga

Prioritas utama dalam kesejahteraan sosial adalah, kelompok-kelompok yang kurang beruntung (*disadvantage groups*), khususnya keluarga miskin. Di mana dalam kesejahteraan sosial ini, dilakukan berbagai cara dan pelayanan agar keluarga-keluarga miskin dapat meningkatkan kualitas hidupnya menuju pada keluarga sejahtera lahir dan batin, yaitu dengan dapat terpenuhi semua kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Namun, istilah kesejahteraan sosial tidak merujuk pada suatu kondisi yang baku dan tetap. Istilah ini dapat berubah-ubah karena ukuran sejahtera atau tidak sejahtera kadang-kadang berbeda antara satu ahli dengan ahli yang lain. Pada umumnya, orang kaya dan segala kebutuhannya tercukupi itulah yang disebut orang yang sejahtera. Namun demikian, di lain pihak orang yang miskin dan segala kebutuhannya tidak terpenuhi kadang juga dianggap justru lebih bahagia karena tidak memiliki masalah yang pelik sebagaimana umumnya orang kaya. Artinya, kondisi sejahtera dari seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat disesuaikan dengan sudut pandang yang dipakai.

Kesejahteraan sosial pada intinya mencakup konsepsi antara lain, yaitu :
“*Kondisi kehidupan atau keadaan sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial*”. Dengan demikian, secara umum,

istilah kesejahteraan sosial sering diartikan sebagai kondisi “sejahtera”, yaitu suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan perawatan kesehatan. Pengertian seperti ini, menempatkan kesejahteraan sosial sebagai tujuan (*end*) dari suatu kegiatan pembangunan. Misalnya, tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf kesejahteraan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat. Dengan demikian, prioritas utama pembangunan kesejahteraan sosial adalah kelompok-kelompok yang kurang beruntung (*disadvantage groups*), khususnya yang terkait dengan masalah kemiskinan (Suharto, 2005:1-5).

Di dalam rangka membangun keluarga sejahtera yang bertujuan untuk mengembangkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram dan harapan masa depan yang baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin, maka suami dan isteri harus melaksanakan peranan dan/atau fungsi sesuai dengan kedudukannya. Dengan demikian, keluarga akan merupakan suatu unit terkecil dalam masyarakat yang bukan hanya berfungsi sosial budaya, tetapi juga berfungsi ekonomi. Apabila tekanan fungsi keluarga secara tradisional adalah fungsi reproduktif - yang dari generasi ke generasi mengulangi fungsi yang sama – kemudian telah berkembang ke fungsi sosial budaya. Namun, belakangan ini keluarga diandalkan untuk suatu tugas yang lebih luhur yaitu, sebagai wahana mencapai tujuan pembangunan. Hal ini menyebabkan keluarga perlu mempersiapkan diri dalam keterlibatannya sebagai agen pembangunan di sektor ekonomi produktif (Yaumil C. Agus Achir, 1994).

Menurut Soetjipto (1992), kesejahteraan keluarga adalah terciptanya suatu keadaan yang harmonis dan terpenuhinya kebutuhan jasmani serta sosial bagi anggota keluarga, tanpa mengalami hambatan yang serius di dalam keluarga, dan dalam menghadapi masalah-masalah keluarga akan mudah untuk di atasi secara bersama oleh anggota keluarga, sehingga standar kehidupan keluarga dapat terwujud. Konsepsi tersebut mengandung arti bahwa, kesejahteraan keluarga adalah suatu kondisi yang harus diciptakan oleh keluarga dalam membentuk keluarga yang sejahtera. Adapun keluarga sejahtera merupakan model yang dihasilkan dari usaha kesejahteraan keluarga.

Mengingat kesejahteraan keluarga sifatnya kondisional, tentu perlu adanya ukuran-ukuran dari keadaan tersebut. Dengan kata lain, ada indikator-indikator minimal yang harus dicapai oleh setiap keluarga. Dengan demikian, sebuah keluarga yang dapat memenuhi indikator-indikator yang ada, yaitu indikator-indikator yang digunakan untuk mencapai taraf keluarga sejahtera seperti apa yang tercantum dalam Buku Panduan Pembangunan Keluarga Sejahtera (seperti yang ditetapkan oleh BKKBN, terdapat 22 indikator), maka keluarga tersebut dapat dikatakan keluarga yang sejahtera (Prisma, 1994).

E. Pendidikan dan Keterampilan

1. Pengertian Pendidikan dan keterampilan

Menurut Dahlan dan Sumarsono (2009:3), Pendidikan adalah melatih seseorang untuk melakukan sesuatu pekerjaan/kegiatan yang berbeda dengan apa yang dilakukan sekarang. Program pendidikan sering dikaitkan dengan orang-

orang dewasa yang memiliki segudang pengalaman, sehingga diperlukan pendekatan andragogi dan pendekatan partisipatif dalam setiap tahapan kegiatan dari perencanaan sampai penilaian.

Sedangkan keterampilan adalah kemampuan untuk mengerjakan atau melaksanakan sesuatu dengan baik (Nasution, 1975: 28). Maksud dari pendapat tersebut bahwa kemampuan adalah kecakapan dan potensi yang dimiliki oleh seseorang untuk menguasai suatu keahlian yang dimilikinya sejak lahir. Kemampuan tersebut merupakan suatu hasil latihan yang digunakan untuk melakukan sesuatu. Melalui pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan seseorang itu dapat tumbuh melalui latihan-latihan yang dilakukan oleh orang itu sendiri.

Keterampilan (*skill*) dalam arti sempit yaitu kemudahan, kecepatan, dan ketepatan dalam tingkah laku motorik yang disebut juga normal skill. Sedangkan dalam arti luas, keterampilan meliputi aspek normal skill, intelektual skill, dan sosial skill (Vembriarto, 1981:52).. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa keterampilan adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan baik, cepat, dan tepat. Keterampilan akan dapat dicapai atau ditingkatkan dengan latihan tindakan secara berkesinambungan.

2. Jenis-Jenis Pendidikan

Banyak sekali dan bercorak-ragam kebutuhan akan pendidikan untuk usaha pembangunan pedesaan, namun untuk keperluan praktis seluruh kebutuhan itu menurut Philip dan Manzoor (1985:21-22) dapat dibagi dalam empat kelompok :

1. *Pendidikan Umum dan Dasar* : melek-aksara, melek-angka, pengertian dasar mengenai ilmu pengetahuan dan lingkungan dan sebagainya, yang pada umumnya diusahakan oleh sekolah dasar dan sekolah lanjutan umum.
2. *Pendidikan Kesejahteraan Keluarga* : terutama dirancang untuk menyebarkan pengetahuan, keterampilan dan watak yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, mencakup mata pelajaran seperti ilmu kesehatan, ilmu gizi, kepandaian rumah tangga dan mengasuh anak-anak, pemeliharaan dan penyempurnaan perumahan, KB dan sebagainya.
3. *Pendidikan Kemasyarakatan* : yang bertujuan mengokohkan dan menyempurnakan lembaga-lembaga dan proses-proses daerah dan nasional melalui pengajaran tentang soal-soal pemerintah daerah dan negara, gerakan koperasi, proyek pembangunan masyarakat dan sebagainya.
4. *Pendidikan Kejuruan* : dirancang untuk membina kepandaian atau keterampilan tertentu, yang berkaitan dengan berbagai kegiatan dalam bidang ekonomi, dan yang berfaedah untuk mencari nafkah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul, rumusan masalah, dan tujuan masalah, maka peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif menurut Sugiyono (2011:9) adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data bersifat induktif / kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Penggunaan metode dengan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif didasarkan atas anggapan bahwa dengan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, peneliti dapat memaparkan mengenai Pelaksanaan Peran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Memberdayakan Perempuan yang mengambil studi tentang Program Pendidikan dan Keterampilan di Kecamatan Kaliore Kabupaten Rembang. Selain itu, dengan jenis penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif dimaksudkan agar dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di rumusan masalah dapat dilakukan secara langsung di lapangan.

B. Fokus Penelitian

Menurut Moleong (2002:81-82), penentuan fokus penelitian memiliki dua tujuan. Pertama, pembatasan masalah melalui fokus. Disamping itu diperlukan sebagai kriteria inklusi-eksklusi. Sifat perumusan masalah sebelum penelitian akhirnya tentatif, yang berarti masih dapat berkembang sekaligus disempurnakan sewaktu peneliti sudah berada di lapangan. Kedua, memberikan gambaran lengkap mengenai berbagai cara dan gaya dalam merumuskan masalah penelitian. Sehubungan dengan penelitian tentang Pelaksanaan Peran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Memberdayakan Perempuan Studi tentang Pendidikan dan Keterampilan di Kecamatan Kaliore Kabupaten Rembang maka peneliti memberi batasan fokus berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan di atas, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Peran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Memberdayakan Perempuan Program Pendidikan dan Keterampilan di Kecamatan Kaliore Kabupaten Rembang.
 - a. Peningkatan pengetahuan kader dan minat baca masyarakat
 - b. Peningkatan kualitas tenaga pendidik/ kader pos PAUD
 - c. Peningkatan keterampilan usaha
 - d. Kerjasama PKK dengan pemerintah
2. Faktor pendukung dan penghambat Pelaksanaan Peran Tim Penggerak PKK dalam Memberdayakan Perempuan Program Pendidikan Dan Keterampilan di Kecamatan Kaliore Kabupaten Rembang.

a. Faktor pendukung

- 1) Adanya penyuluhan dan pelatihan
- 2) Sumber Daya Manusia yang bertanggungjawab
- 3) Adanya bantuan dari Pemerintah

b. Faktor penghambat

- 1) Semakin kurangnya tenaga sukarela/kader PKK di desa-desa
- 2) Terbatasnya kemampuan dan rendahnya tingkat pendidikan kader
- 3) Sarana dan prasarana yang kurang memadai

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi dan situs penelitian adalah tempat dimana penulis akan menangkap keadaan yang sebenarnya dari obyek yang hendak diteliti untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan. Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah di Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang.

Lokasi ini dipilih dengan pertimbangan :

1. Kecamatan Kaliori merupakan Kecamatan unggulan dalam melaksanakan program-program yang dilaksanakan oleh PKK termasuk program pendidikan dan keterampilan.
2. Alasan praktis bahwa penelitian ini dilakukan untuk efisiensi biaya, waktu dan tenaga sehingga hasil penelitian dapat dioptimalkan. Mengingat peneliti berdomisili di Kabupaten Rembang. Secara geografis memiliki jarak tempuh yang cukup dekat antara tempat tinggal dan lokasi penelitian.

Sedangkan situs penelitian adalah tempat dimana penulis merangkap sebenarnya objek yang diteliti. Dengan demikian, situs penelitian ini adalah Sekretariat Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Rembang, Sekretariat PKK Kecamatan Kaliori, dan masyarakat di Kecamatan Kaliori

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah sumber-sumber penyedia informasi tentang hal-hal yang menjadi pusat perhatian peneliti. Sedangkan jenis data dapat dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

Adapun data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah : data yang diperoleh dari Sekretariat Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Rembang, Sekretariat Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kecamatan Kaliori dan masyarakat di Kecamatan Kaliori. Dimana untuk mendapatkan data primer ini dilakukan melalui wawancara, observasi, dan alat bantu lainnya. Sumber data primer didapatkan langsung dari sumbernya (subyek penelitian) yang langsung berhubungan dengan peneliti dan maupun memberikan informasi. Narasumber yang dilibatkan dalam penelitian ini antara lain :

- a. Ibu Suharti, Ibu Asih, dan Ibu Alfi selaku narasumber dari Tim Penggerak PKK kabupaten Rembang.

- b. Ibu Sri, Ibu Sutasmi selaku narasumber dari Tim Penggerak PKK Kecamatan Kaliori.
- c. Ibu Titik dan Ibu Suremi selaku narasumber dari Kader PKK desa Dresi Kulon.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti. Data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen, laporan-laporan, jurnal-jurnal dan artikel-artikel serta arsip-arsip yang ada relevansinya dengan penelitian. Data yang peneliti ambil berasal dari dokumen, arsip-arsip, dari Dinas-dinas terkait yaitu TP PKK di Kabupaten Rembang maupun di Kecamatan Kaliori, selain itu juga artikel dan jurnal di internet.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik penelitian sebagai salah satu bagian penelitian merupakan salah satu unsur yang sangat penting karena dapat mempermudah peneliti dalam menghimpun informasi sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, teknik penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Menurut Marshall (dalam Sugiyono, 2011 : 226) yaitu melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut. Teknik ini dapat juga digunakan secara bersamaan pada saat wawancara, pengambilan dokumentasi dan survey lapangan. Sehingga dengan observasi ini peneliti dapat memahami perilaku dari obyek penelitian. Observasi dalam penelitian ini

dilakukan dengan melihat langsung di Kecamatan kaliori serta desa yang menjadi binaan PKK yakni desa Dresi Kulon.

2. Wawancara (interview)

Wawancara merupakan cara memperoleh data di lapangan yang dilakukan melalui wawancara langsung dengan pihak yang bersangkutan untuk memperoleh data berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara terhadap Tim Penggerak PKK baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan tingkat Desa. Wawancara yang peneliti lakukan yakni pada TP PKK Kabupaten Rembang, TP PKK Kecamatan Kaliori, serta kader-kader di desa-desa yang ada di Kecamatan Kaliori.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mencatat dan memanfaatkan data-data yang ada di instansi yang berkaitan dengan penelitian yang berupa dokumen-dokumen, foto-foto hasil kegiatan dan arsip-arsip yang mendukung fokus penelitian. Peneliti melakukan dokumentasi dengan mengambil gambar di tempat yang menjadi objek penelitian. Dokumen-dokumen yang didapat yakni berupa laporan tahunan pelaksanaan TP PKK Kecamatan Kaliori, serta MOU antara TP PKK dengan Dinas/instansi terkait.

F. Instrumen Penelitian

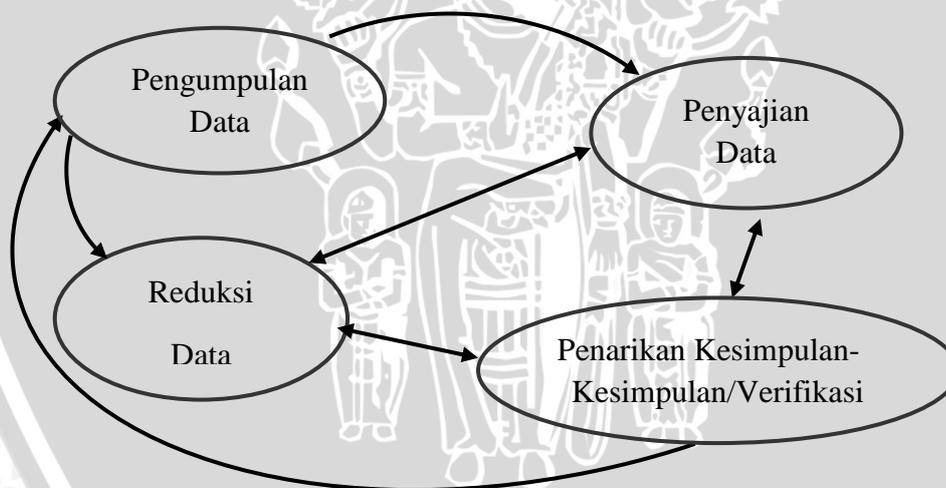
Instrumen Penelitian merupakan alat bantu yang digunakan dalam proses pengumpulan data yang berwujud sarana/benda (Arikunto, 2002). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan instrumen penelitian sebagai berikut :

1. Peneliti sendiri, yang merupakan sarana pengumpul data utama, terutama pada proses wawancara dan analisis data, serta peneliti menggunakan alat panca indera untuk melakukan pengamatan langsung dan pencatatan terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan untuk mengetahui pelaksanaan peran TP PKK dalam memberdayakan perempuan.
2. Pedoman wawancara adalah daftar pertanyaan wawancara untuk memandu proses wawancara agar dapat terarah pada obyek yang diinginkan/ diperlukan dalam penelitian. Dalam pelaksanaan metode wawancara melibatkan sejumlah informan atau narasumber yang dipilih untuk mewakili kedudukan-kedudukan tertentu. Yakni kepada Tim Penggerak, Kader, dan masyarakat.
3. Buku catatan lapangan adalah catatan lapangan yang dibuat oleh peneliti sewaktu mengadakan pengamatan, wawancara, atau menyaksikan kejadian tertentu yang dilakukan terhadap responden dan terjadi di lapangan.
4. Perangkat penunjang lapangan merupakan alat yang diperlukan penulis untuk mengumpulkan data, seperti *tape recorder* atau kamera untuk merekam suara dan foto-foto aktivitas yang dilakukan responden, hal ini bertujuan untuk memudahkan penulis ketika pelaksanaan wawancara ada bagian yang tidak dapat ditangkap langsung oleh penulis.

G. Analisis Data

Menurut Sugiyono (2010: 246) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, memilih nama yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan model Miles and Huberman yang sering disebut sebagai analisis data model interaktif. Adapun tahap-tahap analisis data kualitatif dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut di bawah ini :



Gambar 3 : Analisis Data

Sumber: Matthew B. Miles dan Huberman (1992:20)

Mencermati gambar 3.1 di atas, Miles dan Huberman berpandangan bahwa analisis data kualitatif memiliki langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pengumpulan data, langkah pengumpulan data ini sesuai dengan teknik pengumpulan data yang telah diuraikan diatas, yang terdiri dari wawancara dan dokumentasi dengan para narasumber yang relevan dengan fokus

penelitian. Seperti wawancara dengan Anggota TP PKK Kabupaten Rembang, Anggota TP PKK Kecamatan Kaliori, Kader di desa-desa dan masyarakat.

2. Reduksi data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Artinya disini peneliti melakukan proses reduksi data terhadap data yang dikumpulkan dengan cara membuat tabelisasi dan abstraksi, yaitu berusaha membuat rangkuman pada masing-masing fokus. Dalam proses ini peneliti juga mengabaikan data atau informasi yang tidak sesuai dengan permasalahan, tujuan dan fokus penelitian. Sehingga data-data yang tersaji adalah data yang memang berhubungan dengan judul dari penelitian itu sendiri.
3. Penyajian data, peneliti menyusun informasi yang didapatkan. Kemudian digunakan dalam melaporkan hasil penelitian, sehingga mudah untuk dipahami. Artinya disini bahwa data yang telah direduksi peneliti dari fakta dan kejadian di lapangan dari pelaksanaan peran TP PKK dalam memberdayakan perempuan kemudian peneliti melakukan display dalam bentuk laporan, penyajian data yang bersumber dari berbagai dokumen.
4. Panarikan kesimpulan atau verifikasi. Peneliti berusaha untuk menggambarkan kesimpulan dari data yang dikumpulkan. Namun kesimpulan masih bersifat tentative. Akan tetapi dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus-menerus akan dapat ditarik kesimpulan berdasarkan pembahasan terkait dengan Pelaksanaan Peran TP PKK dalam Memberdayakan di Kecamatan Kaliori.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kecamatan Kaliori

a. Keadaan Geografi

Kecamatan Kaliori merupakan salah satu wilayah kecamatan di Kabupaten Rembang yang terletak di wilayah pesisir pantai utara Pulau Jawa. Kecamatan ini merupakan salah satu kecamatan di ujung barat kabupaten Rembang, berjarak lebih kurang 12 km ke arah barat dari ibukota Kabupaten Rembang dengan batas-batas wilayah meliputi :

Sebelah Barat : Kecamatan Batangan Kabupaten Pati

Sebelah timur : Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang

Sebelah Utara : Laut Jawa

Sebelah selatan : Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang

Adapun wilayah Kecamatan Kaliori terbagi ke dalam 23 desa, yaitu:

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 1. Desa Meteseh | 13. Desa Tasikharjo |
| 2. Desa Wiroto | 14. Desa Pantiharjo |
| 3. Desa Purworejo | 15. Desa Kuangsan |
| 4. Desa Sidomulyo | 16. Desa Tambakagung |
| 5. Desa Dresi Kulon | 17. Desa Mojowarno |
| 6. Desa Maguan | 18. Desa Mojorembun |
| 7. Desa Karangsekar | 19. Desa Bogoharjo |

8. Desa Banyudono
9. Desa Pengkol
10. Desa Gunungsari
11. Desa Dresi Wetan
12. Desa Sambian
20. Desa Sendang Agung
21. Desa Tunggulsari
22. Desa Banggi
23. Desa Babadan

Dari 23 desa tersebut terbagi ke dalam 70 Rukun Warga (RW) dan 255 Tukun tetangga (RT). Enam desa diantaranya berbatasan langsung dengan laut Jawa. Enam desa tersebut adalah Banyudono, Bogoharjo, Purworejo, Tasikharjo dan Tunggulsari.

b. Kondisi Penduduk

Wilayah Kecamatan Kaliori berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2012 berpenduduk 39.387 jiwa dengan kondisi sosio ekonomi dan kultural masyarakatnya terbagi dalam beberapa kelompok. Seperti pada umumnya masyarakat di Kabupaten Rembang, penduduk di wilayah Kecamatan Kaliori bersifat semi majemuk, terutama dari segi pekerjaan dan sosio kultural. Ada beberapa hal yang mempengaruhi mata pencaharian penduduk sebuah wilayah, diantaranya adalah keadaan tanah wilayah itu sendiri, tingkat pendidikan dan jauh tidaknya rumah penduduk dengan lokasi industri.

Tabel 1
Jumlah Rumah Tangga dan Penduduk Kecamatan Kaliori Tahun 2012

Desa/Kelurahan	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Meteseh	714	1250	1289	2 539
2 Maguan	683	1214	1261	2 475
3 Sidomulyo	480	809	823	1 632
4 Wiroto	536	883	898	1 781
5 Banggi	481	783	820	1 603
6 Kuangsan	553	933	962	1 895
7 Gunungsari	805	1298	1450	2 748
8 Sendangagung	1 018	1796	1944	3 740
9 Karangsekar	369	632	616	1 248
10 Babadan	819	1389	1405	2 794
11 Pengkol	481	791	784	1 575
12 Sambiyon	626	1058	1098	2 156
13 Mojorembun	471	786	818	1 604
14 Tunggulsari	212	430	407	837
15 Tambakagung	644	1158	1173	2 331
16 Mojowarno	433	806	757	1 563
17 Dresi Kulon	555	965	974	1 939
18 Dresi Wetan	312	524	557	1 081
19 Tasikharjo	342	653	628	1 281
20 Purworejo	300	537	544	1 081
21 Bogoharjo	153	295	278	573
22 Banyudono	159	308	318	626
23 Pantiharjo	74	140	145	285
Jumlah	11 220	19 438	19 949	39 387

Sumber : BPS Kabupaten Rembang Dalam Angka Tahun 2012

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki. Dengan jumlah penduduk sebanyak 39.387 jiwa dengan rincian menurut klasifikasi jenis kelamin sebagai berikut:

Penduduk Laki-Laki : 19.438

Penduduk Perempuan : 19.949

Jumlah : 39.387

c. Kondisi Sosial Masyarakat

Wilayah Kecamatan Kaliori merupakan wilayah yang terdiri dari daerah pesisir pantai, daerah pertambakan, persawahan, perkebunan dan pemukiman penduduk sehingga jenis pekerjaan penduduk heterogen. Sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani, nelayan dan petani tambak. Komoditas yang banyak dikembangkan di wilayah kecamatan Kaliori meliputi: padi, palawija, melon, semangka, lombok dan bawang merah (pertanian) dan garam, bandeng dan udang windu (pertambakan). Namun ada juga yang berprofesi sebagai pembuat batu bata merah, buruh pabrik, guru, Pegawai negeri sipil, Anggota TNI/Polri dan swasta.

Secara sosiologis, masyarakat Kecamatan Kaliori terbagi dalam beberapa kelompok strata sosial. Dalam konteks sosio-ekonomi, masyarakat Kecamatan Kaliori terbagi menjadi tiga golongan, yaitu sebagian kecil golongan menengah, dan kelompok kedua merupakan kondisi mayoritas masyarakat Kecamatan Kaliori yang berada pada kelas sosial ekonomi rendah kebawah yang tersebar hampir di seluruh wilayah desa.

Stratifikasi sosial dalam konteks agama, masyarakat Kecamatan Kaliori terbagi menjadi dua kelompok, yaitu sebagian masyarakat santri yang mempunyai adat istiadat dan budaya sebagaimana prototipe masyarakat pondok pada umumnya, kedua masyarakat abangan yang melaksanakan tradisi santri yang merupakan kondisi mayoritas masyarakat Kecamatan Kaliori. Walaupun demikian, kegiatan keagamaan di wilayah tersebut dapat dikatakan

semarak, bahkan setiap hari besar Islam selalu diadakan pengajian dan kegiatan-kegiatan yang berbasiskan agama.

2. Gambaran Umum Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

a. Pengertian Gerakan PKK

- 1) Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disingkat PKK, adalah gerakan pembangunan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, berahlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
- 2) Pemberdayaan Keluarga, adalah segala upaya bimbingan dan pembinaan agar keluarga dapat hidup sehat sejahtera, maju dan mandiri.
- 3) Kesejahteraan Keluarga, adalah kondisi tentang terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dari setiap anggota keluarga secara material, sosial, mental dan spiritual sehingga dapat hidup layak sebagai manusia yang bermafaat.
- 4) Tim Pengerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP.PKK), adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi

kemasyarakatan, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK.

- 5) Anggota Tim Penggerak PKK, adalah warga masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, perorangan, bersifat sukarela tidak mewakili organisasi, golongan partai politik, lembaga atau instansi, dan berfungsi sebagai perencana, pelaksana, pengendali gerakan PKK.
- 6) Kelompok PKK, adalah Kelompok-kelompok yang berada dibawah tim penggerak PKK Desa/Kelurahan, yang dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan atau kegiatan.
- 7) Kelompok Dasawisma, adalah kelompok yang terdiri atas 10-20 kepala Keluarga (dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat), diketuai oleh seorang yang dipilih antara mereka, merupakan kelompok yang potensial terdepan dalam pelaksanaan kegiatan PKK.
- 8) Kader Umum, adalah mereka yang telah dilatih atau belum dilatih tetapi memahami, serta melaksanakan 10 program pokok PKK, yang mau dan mampu memberikan penyuluhan dan menggerakkan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan yang diperlukan.
- 9) Kader khusus adalah Kader umum yang mendapat tambahan pengetahuan dan ketrampilan tertentu melalui orientasi atau

pelatihan yang diselenggarakan oleh PKK, instansi pemerintah atau lembaga lainnya.

10) Pelatih PKK adalah Anggota TP PKK atau kader yang telah mengikuti pelatihan PKK dan metodologi pelatihan bagi tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta mendapatkan surat keputusan sebagai pelatih dari ketua Umum/ketua TP PKK Daerah yang bersangkutan.

11) Pelindung utama PKK adalah isteri Presiden Republik Indonesia yang memberikan arahan, dukungan baik moril maupun materiel untuk keberhasilan Gerakan PKK.

12) Pelindung PKK adalah isteri wakil Presiden Republik Indonesia yang bertugas memberikan arahan, dukungan baik moril maupun materiel untuk keberhasilan Gerakan PKK.

13) Dewan Penyantun TPP PKK adalah unsur pendukung pelaksanaan program PKK yang terdiri atas pimpinan instansi/lembaga yang membidangi tugas-tugas pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga serta peran tokoh/pemuka masyarakat, lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati/ Walikota, Camat, Kepala Desa/Lurah sesuai dengan jenjang pemerintahan.

b. Tujuan Gerakan PKK

Tujuan Gerakan PKK adalah memberdayakan keluarga untuk Meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan.

c. Sasaran Gerakan PKK

Sasaran Gerakan PKK adalah Seluruh Anggota Keluarga yang masih perlu ditingkatkan dan dikembangkan kemampuan dan kepribadiannya dalam bidang :

- a. Mental spiritual, meliputi sikap dan perilaku sebagai insan hamba Tuhan, anggota masyarakat dan warga negara yang dinamis serta bermanfaat, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- b. Fisik material, meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, kesempatan kerja yang layak serta lingkungan hidup yang sehat dan lestari melalui peningkatan pendidikan, pengetahuan dan keterampilan.

d. Sistem Perencanaan PKK

- 1) Penyusunan rencana dari bawah dimulai dari kelompok Dasawisma sampai TP PKK Pusat dengan memperhatikan kebutuhan dan aspirasinya melalui Musrenbang di setiap jenjang.
- 2) Proses perencanaan kegiatan mengacu pada proses perencanaan program Pemerintah/Pemerintah Daerah.

- 3) Data yang diperoleh dari Sistem Informasi Manajemen (SIM) PKK dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan perencanaan.
- 4) SPEM (Supervisi, pelaporan, evaluasi dan monitoring) sangat diperlukan untuk mengetahui keberhasilan setiap kegiatan. Dalam menyusun rencana tahunan perlu dilengkapi dengan indikator keberhasilan program PKK oleh masing-masing daerah.

e. Tugas dan Fungsi PKK

1. Tugas

- a. Merencanakan, melaksanakan dan membina pelaksanaan program-program kerja PKK, sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat.
- b. Menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk terlaksananya program-program PKK.
- c. Memberikan bimbingan, motivasi dan memfasilitasi TP PKK/ Kelompok-kelompok PKK di bawahnya.
- d. Menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas kepada Ketua Dewan Penyantun TP PKK setempat dan kepada Ketua Umum/Ketua TP PKK setingkat di atasnya.
- e. Mengadakan supervisi, pelaporan, evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan program-program PKK.

2. Fungsi

- a. Penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK.
- b. Fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing Gerakan PKK.

f. Organisasi PKK

PKK sebagai suatu gerakan Nasional diorganisasi dan dibentuk dengan kepengurusan yang dinamakan TIM PENGGERAK PKK. Struktur organisasi TIM PENGGERAK PKK terdiri dari :

1. Ketua dan beberapa Wakil Ketua.
2. Sekretaris dan beberapa Wakil Sekretaris
3. Bendahara dan beberapa Wakil Bendahara
4. Kelompok Kerja (POKJA):
 - POKJA I : 1. Pengahayatan dan Pengalaman Pancasila
2. Gotong Royong
 - POKJA II : 1. Pendidikan dan Ketrampilan
2. Pengembangan Kehidupan Berkoperasi
 - POKJA III : 1. Pangan
2. Sandang
3. Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga
 - POKJA IV : 1. Kesehatan
2. Kelestarian Lingkungan Hidup
3. Perencanaan Sehat

g. Program Pendidikan dan Ketrampilan

1. Tugas

- a) Meningkatkan pendidikan dan ketrampilan dalam keluarga, peningkatan jenis dan mutu kader, peningkatan pengetahuan TP PKK dan kelompok-kelompok PKK dan Dasawisma melalui penyuluhan, orientasi dan pelatihan.
- b) Melaksanakan dan mengembangkan kegiatan program Bina Keluarga Balita (BKB).
- c) Memantapkan Kelompok Belajar (Kejar) Paket A dan B dan C.
- d) Meningkatkan pengetahuan dan menumbuhkan kesadaran dalam keluarga tentang pentingnya pendidikan anak sejak usia dini (0-6) tahun agar anak tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan usianya.
- e) Membantu program Keaksaraan Fungsional (KF) dalam rangka meningkatkan pendidikan keluarga.
- f) Meningkatkan kelompok dan kualitas Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK.
- g) Memotivasi keluarga tentang manfaat koperasi sebagai salah satu upaya perbaikan ekonomi keluarga dan mendorong terbentuknya koperasi yang dikelola oleh PKK.
- h) Identifikasi kebutuhan pelatihan.
- i) Menyusun modul-modul pelatihan.

- j) Berpartisipasi dalam Forum PAUD bekerjasama dengan Pokja IV yang difasilitasi oleh Kementerian Pendidikan Nasional.
- k) Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pendidikan dasar untuk semua sesuai dengan tujuan MGDs yaitu agar setiap anak laki-laki dan perempuan mendapatkan dan menyelesaikan pendidikan dasar.

2. Prioritas Program

- a) Meningkatkan kemampuan yang berkaitan dengan pengetahuan, kesadaran dan keterampilan keluarga yang mempunyai anak balita mengenai tumbuh kembang anak balita secara optimal.
- b) Menyusun modul pelatihan BKB bagi TP PKK dan mengadakan pelatihan BKB.
- c) Meningkatkan mutu dan jumlah pelatih PKK dengan mengadakan pelatihan pelatih/ *Training of trainer (TOT)*.
- d) Menyempurnakan modul-modul pelatihan TPK3PKK, LP3PKK dan DAMAS PKK sesuai dengan perkembangan serta mensosialisasikannya antara lain melalui pelatihan-pelatihan : TPK3PKK, LP3PKK dan DAMAS PKK.
- e) Meningkatkan pengetahuan TP PKK dalam kegiatan Pos PAUD melalui kegiatan PAUD yang diintegrasikan dengan BKB dan Posyandu dengan perteman mitra PAUD bekerja sama dengan Pokja IV.

- f) Meningkatkan jumlah pengetahuan dan keterampilan kader dalam mendidik anak usia dini melalui pelatihan bekerja sama dengan instansi terkait dan HIMPAUDI.
- g) Meningkatkan keterampilan kecakapan hidup (*Life skill*) perempuan dan laki-laki sehingga mampu berusaha secara bersama atau mandiri untuk memperkuat kehidupan dirinya dan keluarganya.
- h) Mengadakan monitoring dan evaluasi kegiatan Pos PAUD di TP PKK Provinsi untuk mengetahui sejauh mana pengintegrasian PAUD, BKB dan Posyandu.
- i) Meningkatkan kejar paket A, B, dan C melalui pelatihan Tutor Kejar Paket A, B, dan C bekerja sama dengan instansi terkait.
- j) Meningkatkan dan menyuluh keluarga tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (WAJAR DIKDAS 9 tahun).
- k) Meningkatkan pendidikan dan keterampilan keluarga serta pengembangan Keaksaraan Fungsional (KF) dengan pendampingan melalui penyuluhan, orientasi dan pelatihan.
- l) Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan baca tulis, serta membudayakan minat baca masyarakat melalui Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan Sudut Baca bekerja sama dengan instansi terkait.

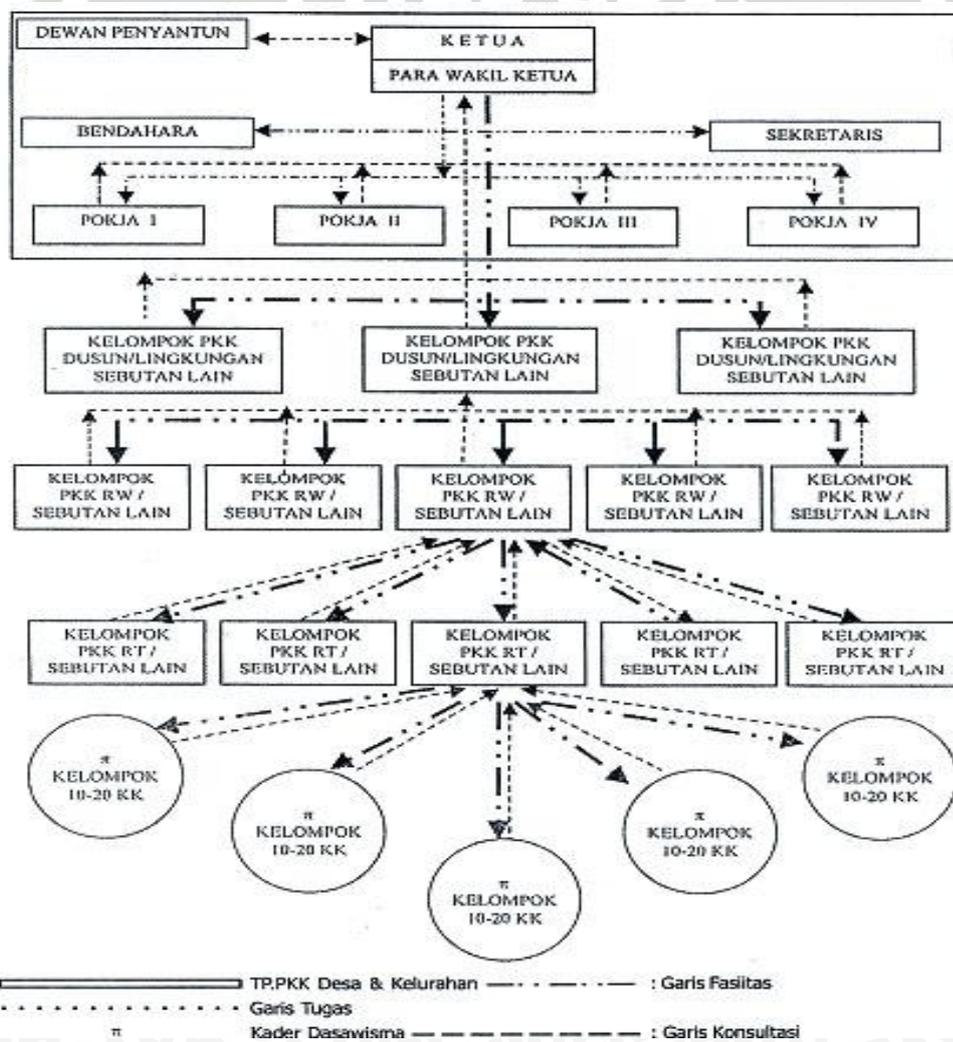
m) Meningkatkan pelaksanaan kerjasama dengan mitra sebagai pendamping, yaitu lintas sektoral dan lintas kelembagaan.

h. Rincian Tugas dan Fungsi TP PKK Desa/Kelurahan

1. Menyusun rencana kerja PKK Desa/Kelurahan, sesuai dengan hasil Rakerda Kabupaten/Kota.
2. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati.
3. Menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun/Lingkungan, RW, RT dan Dasawisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati.
4. Menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan.
5. Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan, motivasi, dalam upaya mencapai keluarga sejahtera.
6. Mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja.
7. Berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Desa/Kelurahan.
8. Membuat laporan hasil kegiatan kepada TP PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun TP PKK Desa/Kelurahan.

9. Melaksanakan tertib administrasi.
10. Mengadakan konsultasi dengan Ketua dan Anggota Dewan Penyantun TP PKK Desa/ Kelurahan.

Adapun mekanisme gerakan di Desa/kelurahan secara jelas dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 4. Bagan Mekanisme Gerakan PKK Di Desa/Kelurahan
 sumber : www.pkk-desa-twgaldowo.blogspot.com

Berdasarkan bagan diatas, apabila ditelaah untuk ketentuan keorganisasian dari atas ke bawah, mulai TP PKK Desa/Kelurahan memiliki garis fasilitas pada setiap jenjang. Mulai dari kelompok PKK Desa/Kelurahan kemuadia kelompok PKK RW, RT, dan akhirnya pada dasawisma. Berdasarkan rincian tugas, yang dimaksud dengan garis fasilitas yang mengarah ke bawah (fasilitasi), adalah menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati. Yang kedua menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan kebijaksanaan yang diterapkan. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga yang mencakup bimbingan, motivasi, dalam mencapai keluarga sejahtera. Yang keempat, mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja.

Sebaliknya, ketentuan keorganisasian dari bawah ke atas menunjukkan garis tugas. Berdasarkan rincian tugas, yang dimaksud adalah menyusun rencana kerja PKK sesuai Rakerda Kabupaten/Kota. Yang kedua, melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati. Yang ketiga, berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan desa/kelurahan. Yang keempat, membuat laporan kepada kepada TP PKK Kecamatan (diatasnya) dengan tembusan kepada Dewan Penyantun TP PKK Desa/Kelurahan. Yang kelima, melaksanakan tertib administrasi. Terakhir. Mengadakan konsultasi dengan Ketua dan Anggota Dewan Penyantun Desa/Keluarahan.

Untuk rincian tugas ini, TP PKK Desa/Kelurahan memiliki rincian tugas 'terbanyak' dibandingkan dengan TP PKK pada jenjang wilayah diatasnya yaitu

mulai dari Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat. Apalagi garis fasilitas bias dianalogikan sebagai 'kewajiban' TP PKK terhadap unsur dibawahnya, dan garis tugas sebagai 'hak' yang diterima kelompok PKK, maka TP PKK Desa/Kelurahan (Kader Dasawisma) memiliki kewajiban/tugas 'terberat' sebab berada pada ujung tombak pelaksanaan program PKK yang langsung berinteraksi dengan masyarakat secara langsung.

3. Gambaran Umum Desa Dresi Kulon

Desa Dresi Kulon pada tahun 2013 adalah sebagai Desa Binaan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor 411.4/0032/2013 Tentang Desa dan Kelurahan Binaan PKK Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat kabupaten Rembang Tahun 2013. Desa binaan ini diajukan oleh masing-masing Kecamatan secara bergilir diantara desa-desa yang ada di wilayah kecamatan yang bersangkutan. Untuk tahun 2013 desa binaan PKK di Kecamatan Kaliori adalah Desa Dresi Kulon dan Desa Mojorembun. Penulis memilih desa Dresi Kulon sebagai contoh desa dalam pelaksanaan program PKK dalam hal ini program pendidikan dan keterampilan karena desa Dresi Kulon merupakan desa yang banyak potensi namun masyarakatnya kurang sejahtera.

Adapun maksud dari desa binaan dan percontohan ini adalah agar desa yang menjadi binaan tersebut dapat melaksanakan kegiatan pemerintahan desa sesuai peraturan yang berlaku. Sedangkan tujuannya agar desa tersebut bisa menjadi percontohan bagi desa-desa lainnya dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari. Bentuk kegiatan yang dilakukan berupa pembinaan dari Pemkab terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa serta upaya pemberdayaan perempuan

dalam meningkatkan perekonomian keluarga (kegiatan PKK) yang dipimpin langsung oleh Ketua Tim Penggerak PKK dari Kabupaten. Hasil yang ingin dicapai agar pemerintah desa dapat mengetahui bagaimana penyelenggaraan pemerintah desa dapat mengetahui bagaimana penyelenggaraan pemerintah desa yang baik dan benar, serta agar SLPD dapat mengetahui kekurangan-kekurangan serta keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintah yang baik pengembangan dan kemasyarakatan di pedesaan.

a. Keadaan Geografis Desa Dresi Kulon

Luas Wilayah :

- | | | |
|----------------------------|-----------|----|
| a. Luas wilayah Desa | : 568,963 | Ha |
| b. Luas Pemukiman Penduduk | : 50 | Ha |
| c. Luas Sawah | : 142 | Ha |
| d. Luas Ladang Tegalan | : 0 | Ha |
| e. Luas Perkebunan | : 66,963 | Ha |
| f. Luas Tambak/Kolam | : 310 | Ha |

b. Perkembangan kependudukan

1) Jumlah Penduduk : 1.939 jiwa

Laki-laki : 974 jiwa

Perempuan : 965 jiwa

2) Jumlah Keluarga : 555 jiwa

c. Bidang Organisasi PKK

Tim Penggerak PKK Desa Dresi Kulon terdiri dari :

Jumlah Tim Penggerak PKK P= 32 Orang

Jumlah Kader Khusus P= 30 Orang

d. Ekonomi Masyarakat

Tingkat ekonomi masyarakat desa apakah tergolong sebagai desa tertinggal atau tidak sedikitnya dapat dilihat dari tingkat pengangguran dan tingkat kesejahteraan keluarga.

Tabel 2
Tingkat Pengangguran di Desa Dresi Kulon

1. Jumlah angkatan kerja (usia 18-56 tahun)	905 orang
2. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang masih sekolah dan tidak bekerja	519 orang
3. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang menjadi Ibu rumah tangga	497 orang
4. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja penuh	386 orang
5. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja tidak tentu	-
6. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan tidak bekerja	-
7. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan bekerja	-

Sumber : Monografi Desa Dresi Kulon

Dari tabel diatas diketahui bahwa jumlah angkatan kerja (usia 18-56 tahun) adalah sebanyak 905 orang. Sedangkan pada usia 18-56 tahun yang bekerja penuh sebanyak 386 orang. Hal ini menunjukkan bahwa di desa Dresi Kulon masih banyak usia kerja yang masih pengangguran yang pekerjaannya tidak tetap. Sebagian besar pekerjaan masyarakat Dresi Kulon adalah sebagai petani dan buruh tani. Baik petani tambak maupun yang lainnya.

Tabel 3
Tingkat Kesejahteraan Keluarga

1. Jumlah keluarga prasejahtera	335 keluarga
2. Jumlah keluarga sejahtera 1	20 keluarga
3. Jumlah keluarga sejahtera 2	- keluarga
4. Jumlah keluarga sejahtera 3	230 keluarga
5. Jumlah keluarga sejahtera 3 plus	- keluarga
6. Total jumlah kepala keluarga	585 keluarga

Sumber : *Monografi Desa Dresi Kulon*

Tingkat kesejahteraan merupakan salah satu indikator lokal untuk monitoring kemajuan Kabupaten dan Kecamatan yang dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan keluarga di suatu desa. Dari tabel 3 menunjukkan bahwa jumlah keluarga prasejahtera di desa Dresi Kulon mencapai 335 keluarga dari total jumlah kepala keluarga 585 keluarga. Artinya keluarga prasejahtera tersebut merupakan keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic need*) secara minimal, seperti kebutuhan akan pangan sandang, papan, kesehatan dan pendidikan.

Sedangkan jumlah keluarga sejahtera tingkat 1 terdapat 20 keluarga dan keluarga sejahtera tingkat 3 adalah 230 keluarga. Dimana Keluarga Sejahtera tingkat 3 yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, kebutuhan sosial psikologis dan kebutuhan pengembangannya, namun belum dapat memberikan sumbangan (kontribusi) yang maksimal terhadap masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa masih banyak penduduk di desa Dresi Kulon yang memiliki tingkat kesejahteraan keluarga yang masih rendah disamping keluarga sejahtera tingkat 3 juga banyak.

Tabel 4
Tingkat Pendidikan Masyarakat

Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
Usia 3-6 tahun yang sedang TK/Play Group	61 orang	57 orang
Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	1 orang	1 orang
Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	208 orang	210 orang
Usia 18-56 tahun yang tidak pernah sekolah	- orang	- orang
Usia 18-56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat	- orang	- orang
Tamat SD/ sederajat	52 orang	176 orang
Jumlah usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	- orang	- orang
Jumlah usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	- orang	- orang
Tamat SMP/ sederajat	378 orang	251 orang
Tamat SMA/ sederajat	319 orang	310 orang
Tamat D-1/ sederajat	1 orang	2 orang
Tamat D-2/ sederajat	- orang	- orang
Tamat D-3/ sederajat	4 orang	1 orang
Tamat S-1/ sederajat	20 orang	16 orang
Tamat S-2/ sederajat	- orang	- orang
Tamat S-3/ sederajat	- orang	- orang
Jumlah Total	1044 orang	1024 orang

Sumber : Monografi desa Dresi Kulon

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan oleh sebagian besar masyarakat di desa Dresi Kulon masih rendah. Masyarakat yang tamat dari sarjana masih rendah dan diduduki oleh kaum perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa masih adanya kesenjangan di tingkat pendidikan.

Tabel 5
Susunan Keanggotaan Tim Penggerak Pkk Desa Dresi Kulon Periode
2013 – 2019

No	Nama	Jabatan
1.	Ny. Wihananto	Ketua PKK
2.	Ny Muslikah	Wakil Ketua PKK
3.	Ny. Siti Asmiati	Sekretaris I
4.	Ny. Endang Murni	Sekretaris II
5.	Ny. Faroh Budianingsih	Bendahara I
6.	Ny. Susi Haristiana	Bendahara II
7.	Ny. Suparni	Ketua Pokja I
8.	Ny. Kholipah	Wakil Pokja I
9.	Ny. Sulidah	Sekretaris Pokja I
10.	Ny. Siti Aslamah	Anggota Pokja I
11.	Ny. Sunarti	Ketua Pokja II
12.	Ny. Siti Aisyah	Wakil Pokja II
13.	Ny. Sri Hartitik	Sekretaris Pokja II
14.	Ny. Purmini	Anggota Pokja II
15.	Ny. Samiyatun	Ketua Pokja III
16.	Ny. Santi Rahayu	Wakil Pokja III
17.	Ny. Sulistyani	Sekretaris Pokja III
18.	Ny. Sri Wahyuni	Anggota Pokja III
19.	Ny. Nanik Sri Lestari	Ketua Pokja IV
20.	Ny. Ngatmisih	Wakil Pokja IV
21.	Ny. Alfiyana	Sekretaris Pokja IV
22.	Ny. Lasmi	Anggota Pokja IV

Sumber : Laporan Tahunan PKK Desa Dresi Kulon Tahun 2013

e. Pelaksanaan Program Pendidikan dan Keterampilan di Desa Dresi Kulon

Program Pendidikan dan Ketrampilan mempunyai banyak kegiatan rutin diantaranya yaitu “Tri Bina” yang meliputi Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL) namun BKB adalah yang menjadi focus Tim Penggerak PKK. Kegiatan tersebut dilakukan setiap satu bulan sekali tepatnya setiap tanggal 24 oleh kader BKB. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kemampuan yang berkaitan dengan pengetahuan, kesadaran dan ketrampilan keluarga yang mempunyai anak balita mengenai tumbuh kembang anak balita secara optimal.

Dalam program ini sasarannya untuk BKB adalah keluarga yang memiliki balita. BKR sasarannya adalah keluarga yang memiliki anak remaja, sedangkan BKR sasarannya adalah keluarga yang sudah lanjut usia (lansia). Dalam setiap pertemuan tanggal 24 tersebut para Kader PKK Desa memberikan sosialisasi kepada para Ibu bersamaan dengan kegiatan POSYANDU. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Titik sebagai kader umum Desa Dresi Kulon bahwa :

“Setiap sebulan sekali PKK selalu memberikan pengarahan, penyuluhan mengenai programnya yaitu “Tri Bina” yaitu BKB, BKR, dan BKL. Kami bekerja sama dengan POKJA IV program Kesehatan. Alasannya yaitu saat ada Posyandu otomatis Ibu-ibu datang bersama anak-anaknya dan memeriksakan perkembangan kesehatan anaknya, setelah itu dari POKJA II program pendidikan dan ketrampilan memberikan pembinaan, penyuluhan dan memberikan motivasi untuk selalu menjaga kesehatan dan selalu memantau perkembangan anak balita. Selain saat Posyandu juga bisa dilakukan saat acara arisan PKK maupun pertemuan saat pengajian.” (wawancara tanggal 12 Februari 2014 pukul 16.00 WIB)

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, antara pelaksanaan satu program dengan program yang lain adalah saling berkaitan dan berkesinambungan sehingga koordinasi yang baik antar kader sangat dibutuhkan. Dalam suatu kegiatan pelatihan yang diberikan di desa Dresi Kulon dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 5: Pelatihan Kader BKB Desa Binaan TP. PKK Kecamatan Kaliori

Sumber : Dokumentasi PKK Kecamatan Kaliori

Adanya BKB sendiri berasal dari Keputusan Kepala Desa Dresi Kulon Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang Nomor : 410.4/4/1/2013 Tentang Pembentukan Kelompok Pelaksana Bina Keluarga Balita (BKB). Keputusan tersebut dibuat untuk mengaktifkan kegiatan bina balita dan membantu pelaksanaan pengembangan manusia Indonesia seutuhnya, maka dipandang perlu pembentukan kelompok keluarga BKB. Pemerintah memang memberikan perhatian khusus kepada para Ibu yang memiliki balita yang merupakan generasi penerus. Selanjutnya, Ibu Titik juga menjelaskan bahwa :

“Setiap pertemuan Posyandu Ibu-ibu diberikan Kartu Kembang Anak (KKA) untuk mengetahui fisik dan mental anak mereka. Misalnya saja anak Ibu “A” sudah berusia 8 bulan yang seharusnya sudah bisa merangkak namun balitanya belum bisa, maka kader PKK memberikan pengarahan. Tahun kemarin (2013) pembinaan BKB di Dresi Kulon yaitu BKB *new inisiatif* yang dibiayai oleh pemerintah”. (wawancara Tanggal 12 Februari 2014 pukul 16.00 WIB)

Selanjutnya program kelompok belajar paket A, B dan C di Desa Dresi Kulon juga berjalan. Kelompok Belajar atau Kejar adalah jalur pendidikan nonformal yang difasilitasi oleh Pemerintah untuk siswa yang belajarnya tidak melalui jalur sekolah. hal ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dari pemerintah untuk memfasilitasi dan memberikan kesempatan kepada setiap warga negaranya untuk mengakses pendidikan. Pendidikan luar sekolah ini menurut UU No 20/2003 meliputi pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan (Kejar Paket A,B, dan C), serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik/warga belajar.

Peserta kejar Paket A dapat mengikuti Ujian Kesetaraan SD, peserta Kejar Paket B dapat mengikuti Ujian Kesetaraan tingkat SLTP dan peserta Kejar Paket C dapat mengikuti Ujian Kesetaraan SMU/SMK/MA. Ujian kesetaraan diselenggarakan dua kali dalam setahun, yaitu bulan Juli dan Oktober. Hal demikian dijelaskan oleh Ibu Titik selaku kader PKK Pokja II bahwa :

“Kalau disini kejar Paket A (setara SD) sudah tidak ada, tapi kejar Paket B (Setara SMP), dan paket C (Setara SMA) masih berjalan. Karena kalau SD kan sudah lulus semua. Setiap peserta yang lulus kejar paket juga berhak memiliki sertifikat (ijazah) yang setara dengan pendidikan formalnya. Kegiatan belajarnya fleksibel, maksudnya tidak penuh belajar 1 minggu

penuh hanya dengan pertemuan 3 kali dalam seminggu”. (wawancara Tanggal 12 Februari 2014 pukul 16.00 WIB)

Peran pendidikan Kesetaraan yang meliputi program Paket A, B dan C sangat strategis dalam rangka pemberian bekal pengetahuan. Penyelenggaraan program ini terutama ditujukan bagi masyarakat putus sekolah karena keterbatasan ekonomi, masyarakat yang bertempat tinggal di daerah-daerah khusus, seperti daerah perbatasan, daerah bencana, dan daerah yang terisolir yang belum memiliki fasilitas pendidikan.

Dalam mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diberi nama PAUD “Sehat Ceria”, Desa Dresi Kulon selalu melakukan pendidikan untuk usia rata-rata 3 tahun pada hari senin-kamis. Sebagaimana diungkapkan Ibu Suremi mantan kader Pokja II bahwa :

“Sejauh ini selama saya melihat program PAUD selalu berjalan, perkembangannya juga meningkat. Program belajarnya dilakukan tiap senin-kamis. Ibu-ibu pengajar sudah diberi bekal dan diberi penyuluhan dari PKK untuk dapat berperan dalam tumbuh kembang anak-anak di desa sini”. (wawancara Tanggal 12 Februari 2014 pukul 17.00 WIB)



Gambar 6 : Temu Kader POS PAUD (Lomba APE, Lomba Gerak dan Lagu serta Lomba Mendongeng) di Pendapa Kab. Rembang

Sumber : Dokumentasi PKK Kecamatan Kaliori

Selain program PAUD, Tim Penggerak PKK juga peduli terhadap warga masyarakat yang berstatus buta kasara, buktinya mereka ambil bagian dalam upaya mengentaskan buta aksara di Desa Dresi Kulon. Dalam memberantas buta aksara di Desa Dresi Kulon, PKK melakukan pendekatan secara emosional, sebab yang dihadapi bukan anak didik, melainkan peserta Keaksaraan Fungsional (KF) di dominasi orang tua yang bekerja mencari nafkah untuk keluarganya.. Dijelaskan oleh Ibu Suremi mantan kader Pokja II bahwa :

“Dalam program Keaksaraan Fungsional, PKK juga memberikan berbagai macam latihan seperti meruncing dan membordir untuk peserta ibu-ibu yang sebagian lanjut usia agar tidak merasa jenuh untuk membaca dan menulis. Dalam perkembangannya Keaksaraan Fungsional pada tahun 2013 sudah tidak berjalan lagi sebab pada tahun 2011 sudah tidak ada warga di desa Dresi Kulon yang buta aksara”. (wawancara Tanggal 12 Februari 2014 pukul 17.00 WIB di rumah Ibu Suremi)

Mengenai ketrampilan usaha apa saja yang ada di Desa Dresi Kulon yakni Ibu Titik menjelaskan bahwa :

“Pada tahun 2013 banyak usaha-usaha keterampilan dari PKK yang diberikan kepada para Ibu-ibu di Dresi Dresi Kulon yaitu ada menjahit, bodir, masak, membuat kue, membuat makanan ringan seperti mengolah kripik, membuat bandeng presto, nugget bandeng, membuat jamu, dll. Keterampilan yang diberikan dari PKK yang bekerjasama dengan dinas/instansi disesuaikan dengan potensi desa yang dimiliki. Di desa Dresi Kulon ini kan banyak tambak, jadi banyak yang usul agar hasil dari tambak ini bisa diolah menjadi makanan. (wawancara Tanggal 12 Februari 2014 pukul 16.00 WIB di rumah Ibu Titik)

Mengingat di Desa Dresi terdiri dari tambak-tambak seperti tambak bandeng maka masyarakat lebih diberdayakan lagi terutama perempuan untuk mengolah potensi yang sudah ada dan memiliki nilai jual. Ketika ditanya mengenai perkembangan setelah diberi ketrampilan usaha oleh TP KPP dan para kadernya Ibu Titik menjelaskan :

“Setelah diberikan keterampilan usaha pada tahun 2013 hasilnya masyarakat bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari untuk dapat dijual dan dikembangkan sebagai tambahan penghasilan mereka. Namun masih dalam area sekitar desa. Dari pihak kami masih dalam skala memberikan pembinaan kepada warga masyarakat terutama ibu-ibu dan kami belum membantu pemasaran. Paling tidak ya sekedar memberitahu kepada masyarakat desa dari mulut ke mulut bahwa Ibu “A” telah membuat usaha bandeng presto misalnya. (wawancara Tanggal 12 Februari 2014 pukul 17.00 WIB di rumah Ibu Suremi)

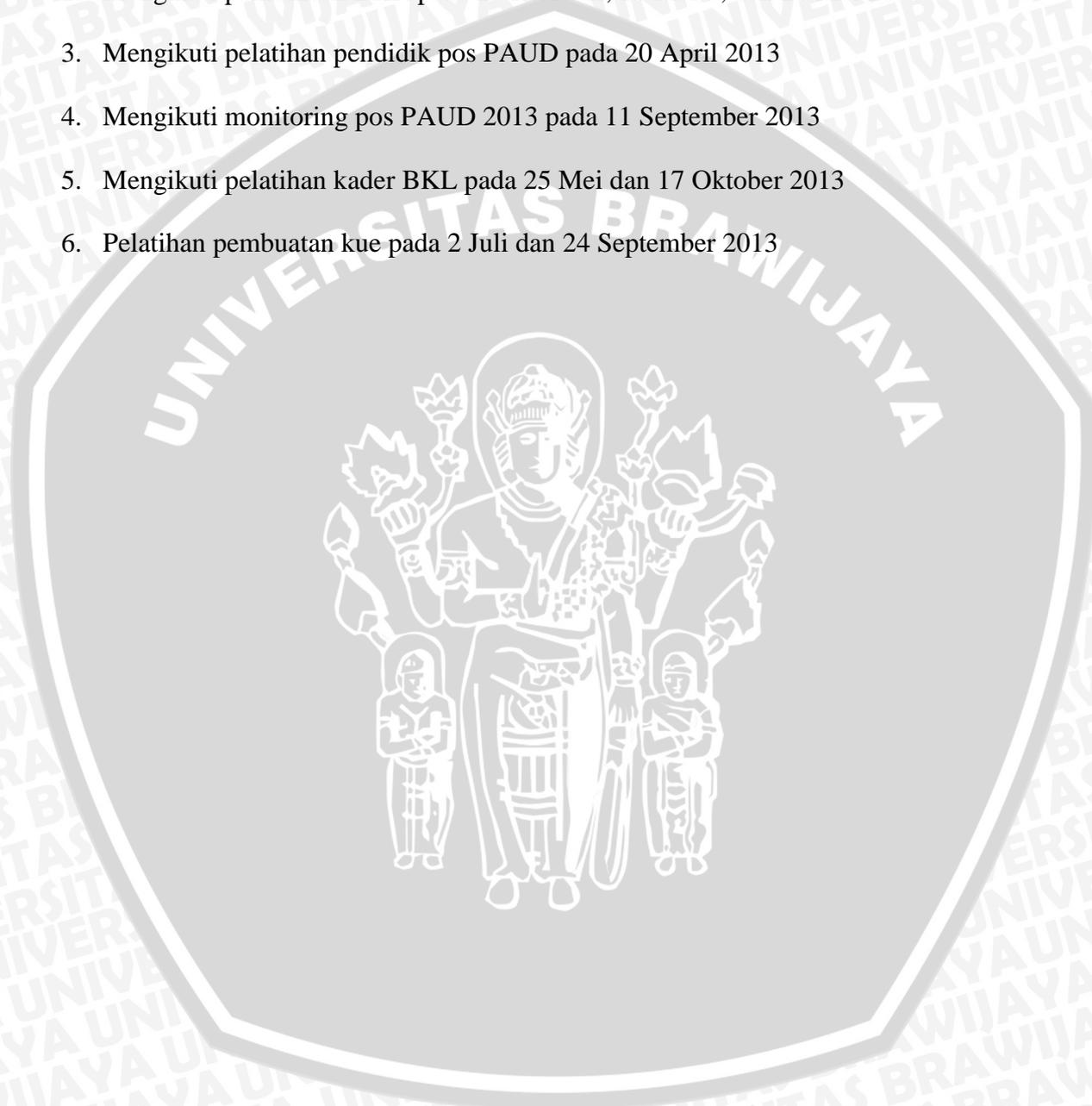
Program pendidikan dan keterampilan juga sangat berhubungan dengan pengembangan kehidupan berkoperasi yakni mengatasi pemecahan masalah mengenai permodalan untuk kegiatan UP2K-PKK. Dijelaskan oleh Ibu Suremi bahwa :

“Dalam pengembangannya, Ibu-ibu yang diberikan modal dari koperasi dibentuk menjadi 13 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 2-5 orang. Mereka diberikan modal usaha dengan diberikan 5 buku yakni tabungan, angsuran, simpanan, pengelolaan, dan pengembangan. Sebagian besar Ibu-ibu di Desa masih sulit disuruh untuk mengisi buku agenda. Mereka hanya menjalankan uangnya untuk usaha namun yang mengisi buku agenda tersebut malah kita dari PKK”. (wawancara Tanggal 12 Februari 2014 pukul 17.00 WIB di rumah Ibu Suremi)

Koperasi sangat membantu dalam meningkatkan perekonomian di Desa, namun dalam kenyataannya kurangnya pengetahuan dari masyarakat desa membuat administrasi dalam bidang pembukuan menjadi kurang lancar. Tak jarang ada beberapa ibu-ibu yang kadang telat membayar angsuran koperasi desa sehingga pengelolaan uang menjadi terganggu.

Dari program pendidikan dan keterampilan yang sudah dilaksanakan selama setahun kemudian dibuat laporan untuk dijadikan evaluasi baik dari pihak PKK Desa, Kecamatan, maupun Kabupaten. Adapun Pelaksanaan Program Pendidikan dan Keterampilan di Desa Dresi Kulon pada tahun 2013 yaitu :

1. Mengikuti pelatihan tenaga pendamping BKB dilaksanakan pada 4, 10 April 2013
2. Mengikuti pembinaan BKR pada 27 Pebruari, 13 Maret, dan 23 Mei 2013
3. Mengikuti pelatihan pendidik pos PAUD pada 20 April 2013
4. Mengikuti monitoring pos PAUD 2013 pada 11 September 2013
5. Mengikuti pelatihan kader BKL pada 25 Mei dan 17 Oktober 2013
6. Pelatihan pembuatan kue pada 2 Juli dan 24 September 2013



Tabel 6.
Program Kerja Tim Penggerak PKK Desa Dresi Kulon Tahun 2013

PROGRAM KERJA TIM PENGGERAK PKK DESA DRESI KULON TAHUN : 2013																
PRIORITAS PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN/TARGET	PROGRAM PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN													
			Jadwal Waktu Trivulnan													
			I			II			III			APBD Prop. Kab.	Sumber Daya Bantu Swad aya	Ket		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1. Pelatihan	- mengikuti Pelatihan tenaga pendamping BKB	- Kader BKB Desa Binaan												v		BPM/PPKB
	- mengikuti Pelatihan Pedidik Pos PAUD	- Tenaga dan Kader Pos PAUD											v			Dindik
	- Mengadakan sosialisasi BKR															
2. Monitoring dan Evaluasi	- Mengikuti monitoring Pos PAUD	- Pos PAUD											v		v	Diknas dan TP PKK Kab.
3. Kelompok belajar usaha	- Mengikuti pelatihan pembuatan kue (makanan ringan)	- Kader PKK											v			Disperind akop dan UMKM
4. Bimtek Perpustakaan	- Mengadakan Pembinaan Perpustakaan	- TP. PKK Desa														TP PKK Kab.

Sumber : Laporan Tahunan PKK Desa Dresi Kulon Tahun 1013

B. PENYAJIAN DATA FOKUS

1. Pelaksanaan Peran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Memberdayakan Perempuan Program Pendidikan dan Keterampilan di Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang.

a. Peningkatan pengetahuan kader dan minat baca masyarakat

Sumber daya manusia (SDM) berkualitas merupakan kunci utama keberhasilan pembangunan. Karenanya, pemerintah secara terencana dan berkelanjutan berupaya mendorong peningkatan kualitas pendidikan yang menjadi syarat utama peningkatan SDM, diantaranya pengembangan perpustakaan. Perpustakaan merupakan salah satu sarana dan pilar kokoh penunjang penyelenggaraan pendidikan sekaligus wadah penyebaran informasi dan tempat belajar sepanjang hayat. Sehingga para kader TP-PKK diharapkan mampu memotivasi masyarakat gemar membaca.

Peran PKK dalam masyarakat sangat besar terutama dalam ikut meningkatkan minat baca masyarakat. Budaya dan kegemaran membaca ini dapat dimulai dari lingkup keluarga. Peningkatan wawasan dan pengetahuan masyarakat dimulai dari kegemaran dan minat baca. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) melalui kader-kadernya harus dapat memotivasi budaya membaca dalam lingkup keluarga. Dalam hal ini, Tim Penggerak PKK Kecamatan Kaliori terus melakukan peningkatan pengetahuan kader PKK kelurahan dengan berbagai program PKK. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Sri selaku sekretaris umum PKK Kecamatan Kaliori :

“Upaya yang kami lakukan yaitu dengan menggelar acara bimbingan teknis (bimtek) kepada para kader PKK Desa/kelurahan, sosialisasi, pelatihan-pelatihan, menyediakan majalah dinding di dalam kantor sekretariat PKK, mengumpulkan kliping yang berisi artikel-artikel pengetahuan serta menyediakan majalah, buku di perpustakaan”. (wawancara, hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 pukul 10.30 WIB, di Balai Kantor Kecamatan Kaliori)

PKK melalui 10 programnya dan salah satunya sebagai penggerak/motivator dalam keluarga. Maka, minat baca dapat dimulai dalam lingkup keluarga selanjutnya masyarakat termasuk ketersediaan dan pengelolaan perpustakaan di setiap sekretariat PKK hingga ke tingkat desa akan mampu meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat. Kabupaten/kota telah berkomitmen ikut mendukung program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah yang salah satunya pengembangan perpustakaan. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Sri selaku Sekretaris PKK Kecamatan bahwa :

“Bimbingan teknis yang diikuti kader PKK dari kabupaten dan kota diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan dan wawasan dalam pengelolaan perpustakaan, sekaligus memiliki kreativitas dalam memotivasi keluarga agar gemar membaca”. (wawancara, hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 pukul 10.30 WIB, di Balai Kantor Kecamatan Kaliori)

Dalam memberi bimbingan kepada masyarakat kaliori yang notabene banyak yang berpendidikan rendah maka ada hambatan yang dialami oleh Tim Penggerak PKK hal ini dijelaskan oleh Ibu Sri bahwa :

“Kami (TP PKK) belum mempunyai strategi yang pas untuk meningkatkan minat baca dimasyarakat karena hal tersebut juga tergantung dengan masing-masing orang. Memang susah untuk mendorong masyarakat. Langkah dari PKK membuka perpustakaan bila ada pertemuan. Bila masyarakat disini agak susah karena sudah ada televisi, mereka lebih memilih mendengarkan dan melihat tv atau radio daripada membaca. Terobosan kami ya bila ada pertemuan ada posyandu, PKB baru bisa”. (wawancara, hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 pukul 10.30 WIB, di Balai Kantor Kecamatan Kaliori)



Gambar 7 : Acara Pembinaan Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK di Kecamatan Kaliori

Sumber : Dokumentasi PKK Kecamatan Kaliori

Pada pertemuan tanggal 6 Pebruari 2013 TP PKK Kecamatan Kaliori mengadakan acara pembinaan oleh TP PKK Kabupaten Rembang yang dihadiri oleh TP PKK Desa dan Para Kader PKK Desa yang ada di Kecamatan Kaliori. Dalam acara tersebut semua TP PKK Desa mengumpulkan semua laporan pelaksanaan 10 program pokok PKK Tahun 2013. Dalam sambutan Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Rembang Ibu Hj. Hasiroh Hafidz yang merupakan istri dari Wakil Bupati beliau menjelaskan bahwa :

“Ada yang berbeda pada pembinaan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK Tahun 2014 dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu kalo tahun-tahun sebelumnya kami hanya memberikan pembinaan kepada TP PKK Kecamatan, namun sekarang kami juga ingin memberikan pembinaan langsung, ingin lebih dekat dan kenal dengan TP PKK dari Kabupaten. Kami mengajak TP PKK dari Desa yang ada di Kaliori untuk lebih meningkatkan hak dan kewajiban kita sebagai perempuan promotor yang membantu mensejahterakan masyarakat. Diharapkan dengan pembinaan ini semua desa dapat melaporkan pelaksanaan 10 program pokok PKK dengan disiplin dan lebih tertib administrasi.” (Pidato pada tanggal 6 Pebruari 2014 di Aula Kecamatan Kaliori)

Dijelaskan dalam sambutan oleh wakil ketua TP PKK Kabupaten bahwa rangkaian acara pembinaan yang dilaksanakan pada 6 Pebruari tersebut meliputi

Lomba penilaian administrasi, pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), HATINYA PKK, serta lomba UP2K. Penilaian dilakukan oleh TP PKK dari Kabupaten dengan peserta semua Desa di Kaliori yaitu dengan mengacu pada laporan pelaksanaan 10 program pokok PKK yang diserahkan saat itu juga. Dalam melaksanakan gerakan PKK, yang paling utama harus dilakukan adalah bagaimana dapat memperkuat kelembagaan Gerakan PKK sampai ke kelompok Dasawisma, karena dengan kelembagaan yang kuat maka program-program dan kegiatan dapat digerakkan dan dilaksanakan dengan baik.

Diketahui bahwa laporan tersebut digunakan untuk mengetahui pelaksanaan 10 program pokok PKK di desa. Selanjutnya pihak sebagai bahan evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu tahun. Bentuk pembinaan yang diberikan oleh TP PKK Kabupaten terhadap TP PKK di bawahnya yaitu dengan menjelaskan program-program mulai dari Pokja I hingga IV yang harus lebih *diekslore* dan dikembangkan lagi menjadi program kerja (proker) di Desa masing-masing. Program kerja yang ada tentunya berdasarkan kebutuhan masyarakat dan potensi yang dimiliki oleh Desa tersebut.



Gambar 8 : Pembinaan 10 Program Pokok PKK Di desa Sendangagung Kec. Kaliori

Sumber :Dokumentasi PKK Kecamatan Kaliori

Dengan adanya pembinaan di harapkan kinerja TP PKK desa bisa semakin meningkat, utamanya dalam bidang administrasi dan mengimplementasikan 10 program pokok PKK bagi warga, Dengan demikian akan di peroleh tatanan kerja yang baik dan mutu kerja yang semakin meningkat.

b. Peningkatan kualitas tenaga pendidik/ kader pos PAUD

Dalam UU No.20 tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah “Suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan lebih lanjut.” (pasal 1 butir 14). Dengan berpedoman UU No.20 tahun 2003 disebutkan bahwa PAUD dilaksanakan sebelum jenjang pendidikan dasar pada anak sejak lahir hingga usia kurang lebih enam tahun.

Pos Paud yang merupakan binaan TP-PKK, tetapi juga untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilan dalam keluarga, peningkatan mutu kader, peningkatan pengetahuan pengurus PKK melalui penyuluhan, orientasi dan pelatihan. Untuk memberikan pengetahuan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) khususnya bagi tenaga pendidik PAUD di Kaliori maupun di daerah yang lain, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) menggelar pelatihan pembuatan alat permainan edukatif (APE). Dalam pelatihan ini, TP-PKK melalui Pokja II menggandeng kerja sama dengan Dinas Pendidikan (Disdik). Sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Sri selaku Sekretaris PKK Kecamatan bahwa :

“Awalnya dulu bunda-bunda Pos PAUD Terpadu itu dilatih dengan menggunakan dana rintisan, tapi hanya diperuntukkan untuk 45 kelompok.

Satu kelompok masing-masing mendapatkan dana 5 juta rupiah, tapi tidak berupa uang berupa pelatihan-pelatihan dan APE(Alat Peraga Edukatif). Sekarang juga sudah banyak dana-dana yang diperoleh dari Dinas Pendidikan, jadi persoalan untuk anggaran sudah diserahkan sepenuhnya kepada Dinas Pendidikan.” (wawancara, hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 pukul 11.00 WIB, di Balai Kantor Kecamatan Kaliori)

Pelatihan pembuatan alat permainan edukatif ini juga merupakan program PKK melalui Pokja II. Nantinya, kreasi kader PKK sebagai pendidik Satuan PAUD Sejenis (SPS) POS PAUD akan diikuti dalam lomba tingkat Provinsi Jateng. Kemudian dijelaskan lagi oleh Ibu Aries Miarsi :

“...Untuk memberikan pengetahuan tersebut, PKK dan Disdik menghadirkan narasumber berkompeten. Untuk hari pertama, dengan materi alat permainan edukatif disampaikan narasumber dengan pembelajaran melalui bermain. Ada 3 orang narasumber yang kompeten kita hadirkan dalam pelatihan APE tahun 2013 Kami berharap guru pendidik bisa menyerap ilmu yang disampaikan nantinya. Hal tersebut sangat mendapat dukungan program pelatihan APE. Salah satu dukungan tersebut, anggaran pelatihan Disdik disinergikan dengan PKK”. (wawancara, hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 pukul 10.30 WIB, di Balai Kantor Kecamatan Kaliori)

Dengan APE diterapkan di lembaga PAUD, anak meningkatkan kreativitas anak. Anak memang harus bebas berkreasi saat di kursi PAUD. Dalam memulai proses masuk ke lembaga pendidikan, mengabaikan pendidikan anak usia dini, padahal untuk membiasakan diri dan mengembangkan pola pikir anak pendidikan sejak usia dini mutlak diperlukan.

Pos PAUD adalah program layanan pendidikan yang diintegrasikan dengan program Bina Keluarga Balita (BKB dan Posyandu). Pertimbangannya yaitu karena masyarakat kalangan kelas menengah kebawah tidak semuanya terakomodir untuk bisamasuk ke jalur pendidikan formal. Kader-kader PKK bervariasi latar belakang pendidikannya, ada yang SMA, SMP, bahkan ada pula

yang SD, tetapi mereka sangat antusias sekali dengan adanya program Pos PAUD Terpadu.

Oleh karena itu Tim Penggerak PKK tergerak membentuk kelompok-kelompok PAUD tersebut karena memang kader-kader Tim Penggerak PKK sampai ke dasawisma. Hal lain dijelaskan oleh Ibu Aries Miarsi selaku ketua Pokja II Tim Penggerak PKK :

“Kalau misalnya kegiatan ini ditangani Dinas Pendidikan ini yang disuruh mengajar siapa, mereka tidak punya kader. Kalaupun perintahnya dari Dinas Pendidikan langsung ya pasti harus bayar kan, Sedangkan ibu-ibu ini tidak dibayar, sekarang saja ada insentif dari pemerintah dulu awal-awal ya tidak ada dikarenakan mereka keberatan. Jadi pengetahuan tentang Pendidikan Anak Usia Dini sebetulnya sangat diperlukan bagi orang tua khususnya ibu-ibu, maka terus dilakukan sosialisasi, pelatihan-pelatihan kepada bunda-bunda, kader-kader untuk menyampaikan betapa pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut”. (wawancara, hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 pukul 10.30 WIB, di Balai Kantor Kecamatan Kaliori)



Gambar 9 : Sosialisasi dari UPT Dinas Pendidikan kepada Guru PAUD

Sumber :Dokumentasi PKK Kecamatan Kaliori

Upaya Tim Penggerak PKK itu sampai sebegitunya tidak hanya membangun, mewajibkan membuat, tapi bertanggung jawab juga sampai kepada pembelajarannya. Untuk itu TimPenggerak PKK sangat mengharapkan agar Dinas

Pendidikan memberikan pembinaan secara edukatif karena mereka berhubungan langsung dengan dunia pendidikan.

Peran ganda ini akan menjadi masalah karena para pengajar tidak dipersiapkan sebelumnya, dimana para kader di pos PAUD adalah berasal dari kader posyandu yang notabene tidak memiliki latar belakang pendidikan yang memadai, sehingga seiring dengan pesatnya perkembangan PAUD maka sudah menjadi tuntutan bagi kader untuk terus mengembangkan pendidikan masing-masing.



Gambar 10 : Suasana Sosialisasi dari UPT Dinas Pendidikan kepada Guru PAUD

Sumber :Dokumentasi PKK Kecamatan Kaliori

c. Peningkatan keterampilan usaha

PKK adalah gerakan pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah dengan wanita sebagai motor penggeraknya untuk membangun keluarga sebagai unit atau kelompok terkecil dalam masyarakat guna menumbuhkan, menghimpun, mengarahkan, dan membina keluarga guna mewujudkan keluarga sejahtera.

Mengenai usaha untuk peningkatan ketrampilan usaha, dapat dilakukan dengan kursus keterampilan kerja, dan selanjutnya kelompok diberi modal usaha. Selain dari itu, PKK juga menggalakkan pelatihan atau kursus untuk membuat berbagai kerajinan tangan, produk-produk makanan dan minuman yang hasilnya dapat dijual. Ini membantu meningkatkan pendapatan keluarga. Agar seorang ibu dapat memerankan diri sebagai pendidik pertama dan utama, perlu adanya upaya mengembangkan kemampuan dan ketrampilan melalui optimalisasi PKK. Secara umum memang pendidikan sudah dilaksanakan di lembaga-lembaga formal. Namun, pendidikan keterampilan (live skill) telah menjamur di lembaga-lembaga yang berbasis masyarakat, yang tidak menutup kemungkinan ibu-ibu PKK ikut berperan di dalamnya.

Mengenai peran PKK dalam pengembangan keterampilan usaha masyarakat di kecamatan Kaliori Ibu Sri selaku sekretaris PKK Kecamatan menjelaskan :

“...kami memantau kegiatan keterampilan pembuatan ceriping dan jajanan pada para Kader yang telah mendapatkan kursus di dua desa yaitu Desa Mojowarno dan Desa Dresi Kulon. Sedangkan Kader yang telah dikursus jahit juga dipantau perkembangannya apakah sudah membuka atau menerima jahitan untuk Desa Mojowarno”. (wawancara, hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 pukul 11.00 WIB, di Balai Kantor Kecamatan Kaliori)

Pemberdayaan keluarga ini penting karena akan menghasilkan kemandirian keluarga. Banyak hal yang dilakukan Tim Penggerak PKK Kecamatan Kaliori dalam rangka peningkatan ketrampilan usaha diantaranya :

- a. Mengajak para kader/ pelaku desa untuk mendorong masyarakat agar mau membuat sebuah usaha secara individu maupun kelompok. Ketika ada

evaluasi dari Kabupaten, setiap desa disuruh mengeluarkan home industry yang akan diperlihatkan kepada tim evaluasi dari PKK Kabupaten.

- b. Adanya motivasi. yaitu dengan dilatih dan membentuk pengurus dan diupayakan ada pertemuan yang rutin untuk membahas kelangsungan usaha.
- c. Diberikan ketrampilan usaha sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing desa.
- d. Diberikan bantuan berupa alat maupun dana yang digunakan dalam menjalankan usaha.

Fungsi dan peran Tim Penggerak PKK adalah sebagai penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK. Kedua, sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina, dan pembimbing gerakan PKK. Dalam berbagai kegiatan PKK yang berhubungan dengan pemberdayaan perempuan fungsi tersebut sudah banyak diterapkan. Ketika ada potensi dari suatu kelompok PKK yang berhubungan dengan usaha, maka dari TP PKK akan membantu memfasilitasi dan memberikan motivasi dengan harapan usaha tersebut akan berkembang. Namun hasil akhir berkembang atau tidaknya usaha tersebut bergantung pada sumber daya manusia itu sendiri dalam mengelolanya. Apabila SDMnya bagus dan ada keseriusan maka bisa berkembang. Sebaliknya jika tidak dilakukan dengan serius maka usaha tersebut akan kurang berkembang.

d. Kerjasama PKK dengan Pemerintah

PKK sebagai mitra kerja pemerintah sekaligus merupakan organisasi kemasyarakatan yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing tingkatan. Baik tingkat yang paling bawah yaitu RT, RW, hingga Kabupaten/Kota. Dalam mendukung proses pembangunan bangsa, PKK turut berperan penting dalam menggerakkan masyarakat. PKK selama ini dalam pelaksanaannya telah berkoordinasi dan bekerjasama dengan Dinas/Instansi terkait atau antar lembaga yang berkaitan dengan program pendidikan dan keterampilan diantaranya :

1. Perjanjian Kerjasama Antara Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kabupaten Rembang.

Dengan surat Nomor : MOU / 12 / 2013, tujuan yang ingin dicapai adalah untuk meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana serta kerjasama lintas sektor dalam pelaksanaan Program Kerja TP. PKK Tahun 2013 sedangkan sasaran kerjasama ini adalah untuk memenuhi kebutuhan para pihak melalui kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana.

Lingkup Kerjasama yaitu mengenai :

1. Penguatan Kelembagaan PKK
2. Pendampingan, pembinaan, monitoring kelompok SPP PNPM MPd oleh TP PKK Kab Rembang

3. Pameran hasil karya perempuan
4. Pelatihan kader BKB desa binaan PKK Tahun 2013

2. Perjanjian Kerjasama Antara Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dengan Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Rembang Tentang Kerjasama Bidang Pendidikan

Dengan surat Nomor : MOU / 12 / 2013, tujuan yang ingin dicapai adalah untuk meningkatkan pendidikan serta kerjasama lintas sector dalam pelaksanaan Program Kerja TP. PKK Tahun 2013. Sedangkan sasaran kerjasama ini untuk memenuhi kebutuhan para pihak melalui kegiatan bidang pendidikan.

Lingkup Kerjasama yaitu mengenai :

1. Koordinasi penanganan Anak Usia Dini usia 0-6 tahun
2. Sosialisasi Pelatihan PUG Pendidikan
3. Pemberian insentif Pendidik POS PAUD Pendidikan Non Formal
4. Pemberian Bantuan untuk Lembaga POS PAUD
5. Monitoring dan Evaluasi lembaga PAUD yang melibatkan TP PKK
6. Terintegrasinya PHBS dalam pembelajaran PAUD
7. Pemberian PMT anak usia 0-6 tahun yang berada pada jenjang PAUD

3. Perjanjian Kerjasama Antara Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dengan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah (Disperindagkop dan UMKM) Kabupaten Rembang Tentang Kerjasama Bidang Perindustrian Perdagangan dan Koperasi.

Dengan surat Nomor : MOU / 12 / 2013, tujuan yang ingin dicapai adalah untuk meningkatkan kerjasama lintas sector dalam kegiatan Pelaksanaan Program Kerja TP PKK tahun 2013. Sedangkan sasaran kerjasama ini untuk memenuhi kebutuhan para pihak melalui kegiatan bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Menengah Kecil dan Mikro.

Lingkup Kerjasama yaitu mengenai :

1. Penyelenggaraan Pelatih Manajemen Pengelolaan Usaha
2. Pelatihan Kewirausahaan
3. Penumbuhan Industri di Desa P2MBG
4. Penumbuhan jumlah koperasi

Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Sri selaku sekretaris PKK Kecamatan Kalirori bahwa : “

“Kerjasama dengan Dinas perindustrian melalui promosi ke Provinsi jika ada even-even maka dari kecamatan yang mempunyai prestasi dalam bidang industry maka akan diajukan dan diikutsertakan dalam even tersebut”. (wawancara, hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 pukul 11.00 WIB)

Jadi sesuai data yang didapatkan oleh peneliti, bahwa kerja sama yang dilakukan antara pihak PKK dan Instansi terkait dalam hal ini Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Rembang sangat membantunya masyarakat dalam menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan membantu masyarakat yang sudah memiliki usaha untuk mengelolanya lebih baik.

- 4. Kerjasama dengan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dalam Program PNPM - MPd dalam rangka memberikan pelatihan kepada masyarakat desa.**



Gambar 12 : Pelatihan Menjahit

Sumber : Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)

Nama Jenis Kegiatan	:	Pelatihan Menjahit
Volume	:	15 Orang (1 Kelompok)
Total Dana	:	Rp 12,420,000
PNPM MPd	:	Rp 12,420,000
Swadaya	:	Rp -
Lokasi Kegiatan	:	Desa Babadan, Kec. Kaliori
Jumlah Pemanfaat	:	15 Orang
Langsung	:	15 Orang
Tidak Langsung	:	0 Orang
Tahun Pekerjaan	:	2013



Gambar 13 : Pelatihan Bordir

Sumber : Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)

Nama Jenis Kegiatan	:	Pelatihan Bordir
Volume	:	30 Orang (1 Kelompok)
Total Dana	:	Rp 15,407,000
PNPM MPd	:	Rp 15,407,000
Swadaya	:	Rp -

Lokasi Kegiatan	:	Desa Tambakagung, Kec. Kaliori
Jumlah Pemanfaat	:	30 Orang
Langsung	:	30 Orang
Tidak Langsung	:	0 Orang
Tahun Pekerjaan	:	2013



Gambar 14 : Pelatihan Pembuatan Kue

Sumber : Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)

Nama Jenis Kegiatan	:	Pelatihan Pembuatan Kue
Volume	:	23 Orang (1 Kelompok)
Total Dana	:	Rp 11,042,000
PNPM MPd	:	Rp 11,042,000
Swadaya	:	Rp -
Lokasi Kegiatan	:	Desa Pantiharjo, Kec. Kaliori
Jumlah Pemanfaat	:	23 Orang
Langsung	:	23 Orang
Tidak Langsung	:	0 Orang
Tahun Pekerjaan	:	2013

Adapun Organisasi/Humas/SPEM yang ada di PKK Kecamatan Kaliori secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Menyelenggarakan rapat-rapat sesuai dengan kebutuhan sebagai berikut :

1. Rapat Konsultasi Kecamatan sebanyak : 1
 - a. Rapat Pleno diadakan sebanyak : 12

b. Rapat Koordinasi diadakan sebanyak : 5

b. Dalam kegiatan Pembinaan PKK Desa, PKK Kecamatan telah dibentuk kelompok binaan wilayah Tahun 2013 dengan susunan sebagai berikut :

1. Kelompok Binaan Wilayah I

Ketua : Ny. Hj. Mustholih

Sekretaris : Ny. Suci Rahayu

Bendahara : Ny. Isni Yulikatun

Pokja I : Ny. Sutarko

Pokja II : Ny. Harjono

Pokja III : Ny. Sutarno

Pokja IV : Ny. Nurnanawati

Dengan sasaran binaan Desa : Dresi Wetan : Tanggal 15 Pebruari 2013

2. Kelompok Binaan Wilayah II

Ketua : Ny. Sudirman

Sekretaris : Ny. Nanik Setyowati

Bendahara : Ny. Margono

Pokja I : Ny. Mutahar

Pokja II : Ny. Soemidjo

Pokja III : Ny. Sutasmi

Pokja IV : Ny. Y. Henggar K.

Dengan sasaran binaan Desa : Dresi Kulon

Tanggal Pembinaan :

1. 8 Pebruari 2013
2. 15 Pebruari 2013
3. 18 Pebruari 2013
- d. 10 April 2013
- e. 19 Juni 2013
- f. 11 Oktober 2013

3. Kelompok Binaan Wilayah III

Ketua : Ny. Sudirman

Sekretaris : Ny. Sri Hartini

Bendahara : Ny. Sulikah

Pokja I : Ny. Sri Leksono

Pokja II : Ny. Elmi Kurniati

Pokja III : Ny. Turhadi

Pokja IV : Ny. Ambarwati

Dengan sasaran binaan Desa : Meteseh Pembinaan tanggal 1 dan 7 Pebruari 2013

4. Kelompok Binaan Wilayah IV

Ketua : Ny. Hj. Mustholih

Sekretaris : Ny. Sri Hartini

Bendahara : Ny. Margono

Pokja I : Ny. Mutahar

Pokja II : Ny. Aries Sujarwo

Pokja III : Ny. Sri Sunarni

Pokja IV : Ny. Siti Sundari

Dengan sasaran binaan Desa : Mojorembun tanggal 10 September 2013

Dari SPEM yang telah dibentuk pada tahun 2013 dapat dikatakan bahwa sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor 411.4/0032/2013 tentang Desa dan kelurahan Binaan PKK Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kabupaten Rembang Tahun 2013 yaitu memilih Desa Dresi Kulon dan Desa Mojowarno sebagai Desa Binaan. Dimana Desa Dresi Kulon ditetapkan sebagai Desa Binaan Kabupaten dan Kecamatan, sehingga dari keempat desa yang dibina terlihat Desa Dresi Kulon mendapat pembinaan lebih banyak, yaitu sebanyak enam kali. Sesuai dengan penjelasan Sekretaris PKK Kecamatan Ibu Sri Hartini :

“Desa Dresi Kulon merupakan desa binaan dari Kabupaten dan Kecamatan, dimana dari beberapa Desa Binaan dari Kabupaten nantinya setiap satu tahun sekali akan dilombakan di tingkat Kabupaten. Sebelum TP PKK Kabupaten memberi binaan, maka sebelumnya TP PKK tingkat Kecamatan Kaliori memberikan binaan kepada Desa Dresi Kulon. Kalau dari Kabupaten binaannya hanya satu kali, sedangkan dari Kecamatan sudah kami bina sebanyak lima kali. Kabupaten hanya menambahi dan mengevaluasi apa yang kurang dari binaan Kecamatan.”

Pemerintah Kabupaten Rembang memilih desa-desa binaan bukan sekedar dipilih tanpa adanya maksud, namun atas usulan dari pihak Kecamatan. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Alfi selaku wakil Sekretaris I PKK Kabupaten :

“Mengenai pemilihan desa binaan sudah ditetapkan langsung dari Pemerintah melalui Surat Keputusan (SK) Bupati yang menetapkan desa-desa tertentu di setiap kecamatan. Penetapan desa binaan dipilih berdasarkan usulan dari kecamatan kemudian diteruskan oleh Pemerintah Kabupaten. Untuk Kecamatan Kaliori pada tahun 2013 kami memilih desa Dresi Kulon sebagai desa binaan kami, selain binaan dari Kabupaten, juga pada tahun 2013 menjadi binaan kecamatan Kaliori itu sendiri”. (wawancara pada tanggal 15 Januari 2014)



Gambar 15 : Kantor Sekretariat PKK Kecamatan Kaliore
 Sumber : dokumentasi oleh peneliti

Dari hasil penelitian, di kantor sekretariat yang tempatnya berada di dalam satu kawasan kantor kecamatan ketika peneliti masuk kedalam sangat minim prasarana yang ada. Maka alangkah baiknya tempat tersebut dibuat senyaman mungkin agar tempat tersebut tidak sepi. Selain itu diberikan fasilitas yang lebih lengkap seperti adanya komputer untuk menunjang laporan administratif serta menyimpan dokumen penting, serta prasarana lain dalam mendukung semua kegiatan PKK.

DATA UMUM PKK																				
Kecamatan : KALIORI																				
Kabupaten/Kota : PEMBANG																				
Provinsi : JAWA TENGAH																				
Tahun : 2013																				
No	NAMA DESA/ KELURAHAN	JUMLAH KELOMPOK					JUMLAH KK	JUMLAH JIWA		JUMLAH KADER					JUMLAH TENAGA SEKRETARIAT					KETERANG.
		DUSUN/ LINGKUNGAN	PKK RW	PKK RT	DASA WISMA			L	P	L	P	L	P	L	P	L	P			
1	KECAMATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MESEH	-	5	14	34	154	1.319	1.542	-	22	-	90	14	100	-	-	-	-	-	4
3	WAGUAN	-	3	13	36	291	1.225	1.491	-	26	-	65	11	78	-	-	-	-	-	-
4	WIKOTO	-	3	16	25	627	976	964	-	24	-	29	20	81	-	-	-	-	-	-
5	SIDOMULYO	-	3	5	14	543	839	851	-	20	-	20	20	80	-	-	-	-	-	-
6	BANGGI	-	3	14	27	281	847	887	-	20	-	27	18	65	-	-	-	-	-	-
7	KUANGSAN	-	2	11	25	601	891	941	-	20	-	20	25	10	-	-	-	-	-	-
8	GUNJUNGSARI	-	6	17	39	243	1.485	1.949	-	20	-	30	25	100	-	-	-	-	-	-
9	SENDANGGUNG	-	4	21	51	1.187	1.892	1.997	-	24	-	112	31	83	-	-	-	-	-	-
10	KARANGSEKAR	-	3	13	61	416	645	651	-	20	-	145	21	53	-	-	-	-	-	-
11	BABADAN	-	4	21	16	923	1.409	1.408	-	20	-	24	11	13	-	-	-	-	-	-
12	PENGKOL	-	3	13	41	232	811	790	-	20	-	57	27	94	-	-	-	-	-	-
13	SAMBIYAN	-	3	14	36	687	1.049	1.071	-	24	-	80	24	84	-	-	-	-	-	-
14	MOJOREMBUN	-	4	10	21	237	825	850	-	20	-	25	21	96	-	-	-	-	-	-
15	TUNGKULSARI	-	1	5	21	225	455	392	-	22	-	19	13	53	-	-	-	-	-	-
16	TAMBAKAGUNG	-	3	11	41	729	1.161	1.168	-	22	-	72	31	111	-	-	-	-	-	-
17	MOJOWARNO	-	3	12	25	218	846	798	-	20	-	100	24	72	-	-	-	-	-	-
18	DRESIKULON	-	3	12	25	660	1.052	1.054	-	22	-	64	21	75	-	-	-	-	-	-
19	DRESIWETAN	-	4	7	21	384	612	592	-	22	-	31	41	78	-	-	-	-	-	-
20	TASIKHARIO	-	3	10	23	393	709	675	-	24	-	46	28	60	-	-	-	-	-	-
21	PURWOREJO	-	1	7	16	246	564	569	-	26	-	79	23	75	-	-	-	-	-	-
22	BOJOHARIO	-	1	4	4	181	305	299	-	14	-	36	13	41	-	-	-	-	-	-
23	BANYUDONO	-	1	4	4	184	324	326	-	15	-	6	12	47	-	-	-	-	-	-
24	PANTHARIO	-	1	1	6	80	138	136	-	14	-	10	15	35	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		70	260	638	12.946	20.543	20.619	-	505	-	1.187	517	1443	-	-	-	-	-	-	4

Gambar 16 : Data Umum PKK
 Sumber : Dokumentasi oleh peneliti



Dari gambar tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah anggota TP. PKK terbanyak ada pada desa yang memiliki jumlah jiwa terbanyak. Jumlah kader tidak sepenuhnya adalah perempuan, hampir di semua desa memiliki kader khusus laki-laki. Sedangkan kader umum semua kadernya adalah perempuan. Dimana beda antara kader khusus dan umum yaitu kader khusus adalah kader yang memiliki keterampilan tertentu. Sedangkan kader umum adalah baik yang memiliki keterampilan sekaligus menjadi pengurus. Jadi semua pengurus PKK adalah semua perempuan.

Dalam melaksanakan kegiatannya, Tim Penggerak PKK di Kecamatan Kaliori memiliki 24 anggota yang diketuai oleh istri Camat. Masa bakti dalam menjabat sebagai anggota TP PKK adalah selama 5 tahun. Para anggota tersebut memiliki profesi yang berbeda-beda dan sebagian besar adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dari 24 anggota tersebut yang akan membawahi TP PKK di 23 Desa di Kecamatan Kaliori. Secara lebih rinci susunan anggota TP PKK Kecamatan Kaliori periode tahun 2010 – 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 7.
Susunan Keanggotaan Tim Penggerak PKK Kecamatan Kaliori Periode
Tahun 2010 – 2015

No	Nama	Kedudukan Dalam TP.PKK	Pekerjaan
1.	Ny. Hj. Hanik Mustholih	Ketua	Karyawati Swasta
2.	Ny. Sudirman	Wakil Ketua	-
3.	Ny. Sri Hartini, SE	Sekretaris	PNS
4.	Ny. Suci Rahayu, S.Pd	Wakil Sekretaris I	PLS
5.	Ny. Nanik Setyowati	Wakil Sekretaris II	PNS
6.	Ny. Budhartati	Bendahara	Pensiunan
7.	Ny. Isni Yulikatun, S.pd	Wakil Bendahara I	Guru SD
8.	Ny. Sulikah	Wakil Bendahara II	Guru TK
9.	Ny. Sri Atmani, Ama Pd	Ketua Pokja I	Guru SD
10.	Ny. Sri Daryati, S.pd	Wakil Pokja I	Guru SD
11.	Ny. Unik Sudarmi, Ama Pd	Sekretaris Pokja I	Guru SD
12.	Ny. Laikum Nuraini	Anggota Pokja I	PNS
13.	Ny. Aries Miarsi, Ama Pd	Ketua Pokja II	Guru SD
14.	Ny. Sri Yulistyani, S.pd	Wakil Pokja II	Kepala SD
15.	Ny. Jumiatus Harjono, SE	Sekretaris Pokja II	Guru MTS
16.	Ny. Elmi Kurniati	Anggota Pokja II	PNS
17.	Ny. Sri Sunarni, S.Pd	Ketua Pokja III	Guru SD
18.	Ny. Sri Sutasmi	Wakil Pokja III	Pensiunan
19.	Ny. Gesti Budianti	Sekretaris Pokja III	Guru SMP
20.	Ny. Turhadi	Anggota Pokja III	Wiraswasta
21.	Ny. Nurnanawati, S.Sos	Ketua Pokja IV	PLBK
22.	Ny. Y. Hengar	Wakil Pokja IV	Bidan
23.	Ny. Dra. Siti Sundari	Sekretaris Pokja IV	PLBK
24.	Ny. Ambarwati	Anggota Pokja IV	Bidan

Sumber : Laporan Tahunan TP. PKK Kecamatan kaliori Tahun 2013

Tim Penggerak PKK di setiap jenjang mulai dari pusat hingga yang paling kecil yaitu desa memiliki susunan keanggotaan yang berisi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, Ketua Pokja I-IV, Wakil Pokja I-IV, Sekretaris Pokja I-IV, dan Anggota Pokja I-IV. Adapun yang menjadi fokus peneliti yaitu dalam bidang Pokja II Program Pendidikan dan Keterampilan secara rinci pelaksanaannya di Kecamatan Kaliore yakni sebagai berikut :

1. Peningkatan jumlah dan jenis mutu Kader PKK kerjasama dengan Program PNPM Tahun 2013 telah dilaksanakan Pelatihan Kewirausahaan bagi kelompok SPP Desa-desa pada Tanggal 6 Januari 2013.
2. Pembinaan kelompok BKB di Desa Dresi Kulon Kecamatan Kaliore pada Tanggal 8 Pebruari, 9 April dan 10 Juni 2013.
Jumlah kelompok BKB : 23
3. Taman Posyandu/PAUD di Desa Bogoharjo, Tunggulsari dan Tasikharjo serta Desa Tambak Agung telah berjalan rutin.
4. Memberikan pengarahan pada pertemuan HUMPUDI Kecamatan Kaliore bertempat di Pos PAUD Taman Indra Desa Bogoharjo pada Tanggal 23 Januari 2013, di Gedung KPRI Tanggal 7 Pebruari 2013 dan Tanggal 25 Maret 2013
5. Memantau Pelaksanaan wajar Pendidikan Dasar 9 tahun di Desa-desa oleh Pokja II Tim Penggerak PKK Desa.
6. Penjaringan dan pendataan anak usia sekolah pada keluarga miskin kerjasama dengan UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kaliore (Bulan Juni dan Juli).

7. Memantau Pelaksanaan wajar Dikdas 9 tahun di Desa-desa oleh Pokja II Tim Penggerak PKK Desa.

8. Penjaringan dan pendataan anak usia sekolah keluarga miskin kerjasama dengan UPT PNF, TK dan SD Kecamatan Kaliori.

9. Pembinaan tentang cara pemasaran bagi kelompok industri rumah tangga di Desa

Untuk lebih jelasnya, program pendidikan dan keterampilan PKK

Kecamatan Kaliori pada tahun 2013 dapat dilihat pada gambar tabel berikut :



Tabel 8
Data Kegiatan PKK Kecamatan Kaliori Tahun 2013

No.	NAMA DESA/ KELURAHAN	Jumlah Warga yang masih buta huruf		Jumlah Kelompok Belajar						Jml Taman Bacaan Perpustakaan		BKB		Tutor		Kader Khusus		Jumlah Kader Yang Sudah Dilatih									
		L	P	Paket A	Paket B	Paket C	Kelompok Belajar	Warga Belajar	Jumlah Pokok	Jumlah WB	Jumlah Ibu Peserta	Jumlah Kelompok	Tutor Kejar Paket A/B/C	PAUD/ SE JENIS	BKB	KETE RAMPILAN	LPK3 PKK	TPK3 PKK	Damas PKK								
1	Meteseh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	32	-	-	5	12	10	7	-							
2	Maguan	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	30	-	-	5	17	6	6	-	-							
3	Wiroto	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	25	-	-	5	9	9	6	-	-							
4	Sidomulyo	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	20	-	-	5	7	5	6	-	-							
5	Bangi	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	26	-	-	5	9	6	6	-	-							
6	Kuangsan	-	-	-	-	-	-	-	30	42	1	1	24	-	-	5	3	5	6	-							
7	Gunungsari	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	36	-	-	5	7	5	6	-	-							
8	Sendangagung	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	29	7	11	5	5	5	6	-	-							
9	Karangsekar	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	39	-	-	5	3	5	6	-	-							
10	Eabadan	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	22	-	-	5	5	5	6	-	-							
11	Pengkol	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	21	-	-	5	4	5	6	-	-							
12	Sambijan	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	20	-	-	5	22	5	6	-	-							
13	Mojoembun	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	21	-	-	5	5	5	6	-	-							
14	Tunggulsari	-	-	-	-	-	-	-	1	15	18	1	44	-	-	5	5	5	6	-							
15	Tambakagung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	64	3	6	5	10	5	6	-							
16	Mojowarno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	29	-	-	5	5	5	6	-							
17	Dresi Kulon	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	29	-	-	5	6	5	6	-	-							
18	Dresi Wetan	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	30	-	-	5	6	5	6	-	-							
19	Tasikharjo	-	-	-	-	-	-	-	1	19	22	1	31	-	-	5	7	5	6	-							
20	Bogoharjo	-	-	-	-	-	-	-	2	20	21	1	20	-	-	5	5	5	6	-							
21	Banyudono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	18	-	-	5	4	5	6	-							
22	Purworejo	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	29	-	-	5	4	5	6	-	-							
23	Pantiharjo	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	11	-	-	5	2	5	6	-	-							
JUMLAH		0	0	0	0	0	0	0	0	84	103	23	680	10	17	0	9	0	115	0	162	0	126	0	139	0	0

Sumber : Laporan Tahunan TP PKK Kecamatan Kaliori Tahun 2013

Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Program Pendidikan dan Keterampilan oleh Tim penggerak PKK Kecamatan Kaliori Tahun 2013 diatas, semua kegiatan yang dilakukan adalah mengacu pada Rakernas VII PKK Pusat. Pelaksanaan kegiatan program kerja Tim Penggerak PKK Desa maupun Kecamatan tahun 2013 yang bersifat rutin masih berjalan dengan baik. Kegiatan pelatihan-pelatihan sangat terbatas dikarenakan dana yang kurang mencukupi, dan masih ada beberapa program yang belum dapat terlaksana hal ini disebabkan situasi dan kondisi alam yang kurang menentu. Bahwa dalam rangka mendorong laju pembangunan dan pengembangan desa dan kelurahan perlu mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat melalui penguatan kelembagaan, peningkatan motivasi, partisipasi dan gotong royong masyarakat. PKK sangat berperan dalam mengintensifkan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat hingga unit terkecil yaitu keluarga. Untuk itu maka perlu penetapan Desa dan kelurahan Binaan PKK dengan Keputusan Bupati.

Program Kerja Tim Penggerak PKK Kecamatan Kaliori pada Tahun 2013 pada dasarnya telah dapat dilaksanakan keseluruhan terutama program pendidikan dan ketrampilan. Hanya ada beberapa program yang ada hambatan. Melihat kenyataan yang ada, program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sangat membantu Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial dengan perempuan sebagai motor penggeraknya. Pemberdayaan peran serta perempuan dan masyarakat semakin ada peningkatan, hal ini terlihat banyaknya wanita yang mencari nafkah tambahan. Mutu pendidikan juga ada peningkatan berkat didikan

ibu yang baik dan banyak lagi hal-hal telah dikerjakan sehingga bisa menambah kesejahteraan keluarganya.

Keterampilan yang diberikan PKK kepada masyarakat setempat tentunya berbeda antara satu desa dengan desa yang lain. Hal ini dikarenakan melihat potensi desa masing-masing. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Sri Hartini :

“Pelaksanaan program antara desa yang satu dengan yang lain jelas berbeda, hal ini didasarkan pada potensi yang ada di desa masing-masing, setiap tahunnya dibuat kegiatan-kegiatan yang mengacu pada Rakernas VII sehingga kami yang ada di Kecamatan hanya sebagai pelaksana yang sudah ditetapkan dari pusat. Namun terkadang masih ada kesenjangan pertumbuhan antar desa, maka kami mengupayakan untuk para kader PKK di desa-desa untuk lebih peduli dengan keluhan masyarakat serta apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kader juga diharapkan lebih inovatif dalam memberikan pelatihan-pelatihan untuk ibu-ibu. (wawancara pada tanggal 30 Januari 2014 pukul 10.30)



Gambar 16 : Stand PKK Pada Rembang Expo Tahun 2013
Sumber : dokumentasi oleh peneliti

Dalam kegiatan Rembang Expo Tahun 2013 Stand PKK mendapatkan juara III. Di dalam stand tersebut banyak berisi tentang berbagai ketrampilan dan hasil kerajinan para kader PKK, dan masyarakat dari binaan PKK yang memang mereka bersungguh-sungguh ketika ada program ketrampilan yang diadakan di

desa-desa. Para Ibu-ibu yang kreatif menjual hasil kerajinan mereka untuk menambah penghasilan keluarga mereka.

Untuk Pelaksanaan kegiatan dalam Tahun 2013 beberapa keberhasilan yang diperoleh PKK Kecamatan Kaliori diantaranya yaitu :

1. Juara III Lomba administrasi PKK dalam rangka Hari Kesatuan Gerak PKK Tingkat Kabupaten Rembang diwakili Desa Dresi Wetan.
2. Juara II Lomba Pemanfaatan Tanah Pekarangan dalam Rangka Hari Kesatuan Gerak PKK Kabupaten Rembang diwakili Desa Meteseh.
3. Juara II Lomba Kadarkum Tingkat Bakorwil Pati diwakili TP PKK Desa Tasikharjo.
4. Juara Harapan II Lomba Cerdas Cermat Kadarkum Tingkat Propinsi Jawa Tengah yang diikuti Tim Penggerak PKK Kecamatan Kaliori dan Tim Penggerak PKK Desa Tasikharjo pada tanggal 29 Mei 2013.
5. Juara I Lomba Mewarnai bahan alam Paud Desa Sambiyon Tingkat Kabupaten Rembang.
6. Juara I Lomba Administrasi Dasa Wisma Tingkat Desa se Kabupaten Rembang diwakili Desa Dresi Kulon.
7. Juara III Lomba Administrasi Dasa Wiswa Kunti Kunti RT 01 RW 01 Desa Dresi Kulon.
8. Dalam Rangka Hari Anak Nasional Tingkat Kabupaten Rembang mendapat kejuaraan antara lain :
 - a. Juara II Lomba Out Bond SD Purworejo
 - b. Juara II Lomba PIK Remaja SMA 2

- c. Juara III Lomba BKR Mayang Kurung Desa Sendang Agung
 - d. Juara I Lomba Cerdas Cermat SMA 2
9. Juara Harapan I Lomba APE Tingkat Kabupaten Rembang atas nama Kader PAUD “Nur Chamidah” KB. Tunas Bangsa Desa Tambak Agung pada tanggal 10 September 2013
 10. Juara Harapan I Lomba gerak dan lagu Tingkat Kabupaten Rembang atas nama Kader Pos Paud “Ninik” KB. Tunas Bangsa Desa Tambak Agung.
 11. Juara I Lomba Out Bond dalam rangka Temu Kader Tingkat Kabupaten Rembang.
 12. Juara I Lomba Kadarkum Tingkat Kabupaten Rembang yang diselenggarakan oleh Tim Penggerak PKK Kabupaten Rembang antar Desa Binaan diwakili Desa Dresi Kulon.

2. Faktor pendorong dan penghambat Pelaksanaan Peran Tim Penggerak PKK dalam Memberdayakan Perempuan Program Pendidikan Dan Keterampilan di Kecamatan Kaliore Kabupaten Rembang.

a. Faktor pendukung Tim Penggerak PKK dalam Memberdayakan Perempuan

1) Adanya Program Kerja yang seragam dan terpadu

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa Gerakan PKK yang mekanisme Gerakannya dikelola dan dilaksanakan oleh Tim Penggerak PKK di setiap jenjang. Dari jenjang yang paling tinggi yakni ditingkat pusat, PKK memiliki

program kerja yang seragam hingga jenjang yang paling rendah yakni tingkat desa/kelurahan. Hal ini memberikan kemudahan bagi TP PKK dalam melaksanakan peranannya sebagai mitra kerja pemerintah. Dimana program kerja yang sudah dibentuk melalui Rakernas VII yang telah disesuaikan dengan program-program kerja pemerintah. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Titik selaku kader Pokja II bahwa :

“Dalam melaksanakan tugas, kami terbantu dengan adanya program kerja yang seragam dari tingkat yang paling tinggi yaitu di pusat, sehingga yang di tingkat desa tinggal mengikuti. Kami juga memiliki buku pedoman atau pegangan dalam melaksanakan program-program kami, yaitu melalui Rakernas VII yang sudah diadakan tahun 2010 dan hasilnya digunakan untuk periode 2010-2015. Selain program kerjanya, sistem pelaporannya juga seragam dan terpadu. Hanya saja kegiatan-kegiatannya disesuaikan dengan kondisi desa.”(wawancara tanggal 17 Februari 2014 pukul 10.30)

Sehingga disini dapat dijelaskan bahwa TP PKK memiliki sistem pelaporan yang seragam dan terpadu sehingga keberhasilan program mudah diketahui.

2) Sumber Daya Manusia yang bertanggung jawab

Selain penyuluhan dan pelatihan, hal yang menjadi faktor pendukung terpenting adalah Sumber Daya Manusia yang bertanggungjawab. Karena SDM sangat berperan penting dalam mensukseskan pelaksanaan program PKK. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Sri selaku sekretaris PKK Kecamatan Kaliori :

“Menurut saya faktor pendukung PKK dalam menjalankan perannya yaitu tanggung jawab dari para kader-kader PKK di Kecamatan. Di Kecamatan Kaliori sendiri, 75% para kadernya merupakan lulusan Sarjana dan berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Mereka yang terbentuk sebagai Tim Penggerak PKK sangat mendukung program pelaksanaan PKK terutama di Kecamatan dan merasa mempunyai tanggung jawab yang besar untuk mengemban tugas yang telah diamanatkan oleh Pemerintah. Tanggungjawab disini yaitu misalnya setiap tahunnya kita selalu melaporkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama setahun. Ada

evaluasi baik dari kami sendiri di Kecamatan juga evaluasi dari PKK Kabupaten. Kalau kami tidak tanggung jawab ya malu kepada atasan yang sudah mempercayakan kami namun tidak bisa memberikan yang terbaik.” (wawancara pada tanggal 30 Januari 2014 pukul 10.30)

Dengan Sumber Daya yang bertanggung jawab dan didasari dengan status sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka pelaksanaan program PKK di Kecamatan Kaliori akan berjalan dengan baik.

3) Adanya Bantuan Dana dari Pemerintah

Faktor bantuan dana atau pendanaan merupakan salah satu faktor penting yang menjadi penentu kesuksesan suatu program selain sumber daya manusia. Karena dengan adanya program yang bagus tanpa ditunjang dengan dana maka tidaklah berarti. Kekuatan finansial tersebut pada akhirnya akan menentukan keberhasilan yang ingin di capai. Sama halnya dengan TP PKK dalam melaksanakan program-programnya, PKK diberi bantuan oleh beberapa pihak. Dana untuk Program PKK dari pemerintah diantaranya yaitu :

1. Dari Pemerintah Daerah yaitu sebesar 10 juta/tahun untuk fasilitasi kebutuhan PKK di Kecamatan.
2. Dari Pemerintah Desa yang menganggarkan dana melalui dana Pengarus Utamaan Gender (PUG) sebesar 3.5 juta/tahun untuk setiap Desa. Dana PUG tersebut merupakan dana untuk operasional pembinaan para Kader PKK. Kemudian Dana dari Kecamatan dan terakhir dana swadaya masyarakat.
3. Bantuan dari Tim Penggerak PKK Propinsi Jawa Tengah untuk modal kerja masih berjalan dengan baik masing-masing Desa Rp. 1.000.000, digulirkan kepada warga binaannya.

4. Bantuan modal kerja dari Tim Penggerak PKK Kabupaten Rembang masing-masing Desa sebesar Rp.500.000,00 dapat berjalan dengan baik dan digulirkan kepada warga yang membutuhkan modal terutama Lansia produktif.

5. Modal kerja putus sekolah

Bantuan-bantuan yang berkaitan dengan Dinas/Instansi masih selalu diadakan pemantauan kegiatannya.

Masalah bantuan dana menjadi hal penting dan perlu pengelolaan dan pengawasan yang baik agar dalam penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dan direncanakan.

b. Faktor penghambat Pelaksanaan Peran Tim Penggerak PKK dalam Memberdayakan Perempuan :

Dalam pelaksanaan suatu program selain faktor pendukung pastilah ada faktor-faktor yang menjadi hambatannya. Hal ini dikarenakan faktor penghambat merupakan acuan bagi pihak yang terlibat sebagai hasil evaluasi yang kemudian akan menjadi perbaikan dalam pelaksanaan program tersebut. Adapun faktor penghambat bagi TP PKK dalam pemberdayaan perempuan meliputi :

1) Semakin kurangnya tenaga sukarela/Kader PKK di Desa-desa

Bagi tenaga sukarela/kader PKK tidaklah mudah bagi mereka dalam membagi waktu. Para kader tersebut yang notabene tidak digaji adalah perempuan-perempuan yang peduli akan pembangunan. Namun dengan tugas yang tidak mudah tersebut kader di desa-desa sangatlah minim. Hal ini disebabkan makin banyaknya wanita bekerja mencari nafkah tambahan. Dengan

luas wilayah 6.179.606 Ha dengan 1/3 wilayah adalah laut. Hal ini telah dijelaskan oleh Ibu Sri bahwa :

“Semakin berkurangnya tenaga sukarela/Kader PKK di desa-desa disebabkan oleh semakin banyaknya wanita yang bekerja mencari nafkah tambahan. Oleh sebab itu kami menghimbau bahwa bagi mereka yang sudah ditunjuk sebagai kader PKK di desa hendaknya pintar-pintar membagi waktu mereka, karena ini juga merupakan kegiatan social dan tidak mendapat gaji. Hanya sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Walaupun kadang kader sekarang seperti kader pos PAUD sekarang sudah ada dana insentif dari pemerintah walaupun tidak banyak namun bisa memotivasi mereka untuk membantu mencerdaskan anak-anak usia dini juga sebagai tambahan. Kalu dulu belum ada, dikarenakan tidak ada insentif dan minim sekali pendanaan jadi kader-kader di desa ada yang berkurang”. (wawancara tanggal 30 Januari 2014 pukul 10.30)

Sebagian besar masyarakat di Kecamatan Kaliori bermata pencaharian sebagai nelayan dan petani. Sebagaimana keadaan di Desa, tingkat pendidikan sangat mempengaruhi pola pikir masyarakat. Tidak banyak dari mereka yang mau memikirkan sumbangsuhnya untuk kemajuan pembangunan di desanya. Mereka tidak mau ribet dengan membuat laporan-laporan terlebih jika mereka belum dijelaskan terlebih dahulu dan masih asing dengan tehnologi

2) Terbatasnya kemampuan dan rendahnya tingkat pendidikan kader

Tingkat pendidikan seseorang kurang lebihnya sangat mempengaruhi pola pikir seseorang. Di era yang sudah canggih seperti sekarang dan serba menggunakan tehnologi, seseorang hendaknya mengikuti perkembangan tehnologi yang ada dan tidak mengenal usia. Seperti halnya para kader PKK di desa yang notabene memiliki pendidikan yang masih rendah. Dalam hal ini kemampuan seorang kader berpengaruh dalam tertib administrasi. Salah satu kunci keberhasilan adalah melalui kegiatan tertib administrasi, termasuk

pencatatan, data yang akurat dan pelaporan berjenjang, sehingga menjadi pola dasar kebijakan dalam penyusunan program kegiatan yang tepat guna dan tepat sasaran. Hal ini sangat mempengaruhi perkembangan PKK jika tidak dibarengi dengan adanya pembinaan dari TP PKK jenjang di atasnya. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Sri bahwa :

“.....untuk di tingkat Kecamatan, kemampuan kami dalam memberikan informasi masih dalam ranah pembuatan klipng 10 program pokok PKK dan foto dokumen kegiatan Rakon PKK Kecamatan dan pelatihan-pelatihan yang telah dilaksanakan di tingkat Kecamatan maupun kegiatan di tingkat Desa”. (wawancara pada tanggal 30 Januari 2014 pukul 10.30)

Dalam kenyataannya, memang belum ada TP PKK baik di Kecamatan Kaliore maupun di tingkat desa yang memposting di internet tentang pelaksanaan program-program PKK. Sehingga diharapkan suatu hari para kader bisa memberikan informasi melalui internet.

3) Kurangnya dukungan dari Dewan Penyantun di desa-desa

Sebagaimana diketahui PKK merupakan organisasi yang dibentuk dan melembaga secara nasional dalam membantu dan menjadi mitra kerja pemerintah dalam membantu mensejahterakan masyarakat. Kurangnya dukungan dari pihak manapun akan mempengaruhi kelancaran pelaksanaan program-program PKK.

Dewan penyantun TP PKK merupakan unsur pendukung pelaksanaan program PKK yang terdiri atas pimpinan instansi/lembaga yang membidangi tugas-tugas pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Namun dalam hal ini Dewan Penyantun di Desa-desa yakni Kepala Desa masih ada yang kurang mendukung program-program PKK. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Sri selaku sekretaris PKK di Kecamatan Kaliore :

“Secara umum pelaksanaan program PKK di Kecamatan kaliiori sudah berjalan baik, namun di desa-desa masih ada yang kurang berjalan, ini dikarenakan kurangnya dukungan dari Dewan Penyantun setempat yaitu Kepala Desanya yang susah untuk diajak kerjasama, contohnya Desa Dresi Kulon ini dulunya tidak seperti sekarang, dulu desa yang terbelakang dan Kepala Desa saat itu tidak mau Desanya dijadikan sebagai desa binaan PKK, setelah adanya pergantian Kepala Desa baru Desa Dresi Kulon mau menjadi desa binaan sehingga masyarakatnya lebih diberdayakan dan lebih produktif seperti sekarang”. (wawancara pada tanggal 30 Januari 2014 pukul 10.30

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Dewan Penyantun bisa saja menjadi faktor penghambat manakala program yang dijalankan tidak mendapat dukungan dari Kepala Desa.

C. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Peran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Memberdayakan Perempuan Program Pendidikan dan Keterampilan di Kecamatan Kaliiori Kabupaten Rembang.

Pengertian “peran” menurut W.J.S. Poerwadarminta yang ditulis di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1985:735) berarti “sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan yang terutama”. Peran juga bisa berkembang menjadi kata “peranan”. “Peranan” menurut Levinson sebagaimana dikutip oleh Soejono Soekanto (1982:238), sebagai berikut :

“Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat, peranan meliputi norma-norma yang dikembangkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.”

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan yang dimaksud dengan “peran” adalah sesuatu yang menjadi bagian atau menjadi pelaku yang mengarahkan berdasarkan peraturan-peraturan atau prinsip-prinsip guna mencapai tujuan yang diinginkan baik secara perseorangan maupun kelompok. Sedangkan dalam pelaksanaan peran Tim Penggerak Pembedayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) adalah tindakan, usaha-usaha yang dilakukan oleh PKK untuk mensejahterakan keluarga. Dalam membantu mensejahterakan keluarga, TP PKK menggunakan prinsip pemberdayaan perempuan. Selama ini pelaksanaan peran TP PKK di masyarakat sudah dilakukan dengan baik. Dengan prinsip pemberdayaan yang ada sudah diterapkan dalam memberdayakan perempuan di Kecamatan Kaliori.

Secara garis besarnya Peran TP PKK dalam Memberdayakan Perempuan Program Pendidikan dan Keterampilan yakni mencakup peningkatan pengetahuan kader dan minat baca masyarakat, peningkatan kualitas tenaga pendidik/pos PAUD, peningkatan keterampilan, serta bagaimana kerjasamanya dengan pemerintah/instansi terkait.

a. Peningkatan pengetahuan kader dan minat baca masyarakat

Peningkatan pengetahuan kader dan minat baca masyarakat merupakan salah satu peran TP PKK program pendidikan dan keterampilan. Alasan dari dilakukannya peningkatan pengetahuan kader dan minat baca masyarakat adalah bahwa tingkat pendidikan kader di desa-desa sangat rendah serta minat baca masyarakat yang rendah. Sehingga kedua hal tersebut sangat berkaitan dengan peran TP PKK dalam mengatasinya. Peningkatan Sumber Daya Manusia kader

sehingga menjadi motor penggerak PKK secara professional bisa dengan menyertakan dalam pelatihan-pelatihan, kursus-kursus, sarasehan /seminar, dan sebagainya. Pemerataan kualitas kader PKK dilakukan sampai ke pelosok-pelosok desa. Misalnya dengan memberikan bimbingan dan arahan oleh kader tingkat kabupaten kepada kader desa Sesuai dengan potensi yang ada di daerah masing – masing, hendaknya didayagunakan semaksimal mungkin.

Pendidikan dan ketrampilan wanita sangat erat kaitannya dengan tugas pokok wanita / ibu dalam membina keluarga sejahtera. Karena itu wanita / ibu perlu meningkatkan diri dalam menambah pengetahuan dan ketrampilannya dengan membaca. Untuk itu diperlukan adanya perpustakaan di komunitas terkecil (RT / RW). Salah satu program kerja Pokja II PKK adalah peningkatan minat baca dan pemberdayaan perpustakaan. Artinya, ada gayung bersambut antara kebutuhan pemenuhan pengetahuan dan informasi masyarakat dengan program PKK di era informasi ini.

PKK juga berperan serta dalam mengembangkan perpustakaan , memelihara dan memanfaatkan bahan pustaka secara tepat dan berhasil guna. Tidak terkecuali, ikut mencerdaskan kehidupan masyarakat dengan ikut serta dalam gerakan pembebasan buta aksara. Begitu besarnya peranan PKK dalam pemberdayaan perpustakaan desa bagi peningkatan kualitas SDM ibu-ibu PKK, maka dipandang perlu adanya perpustakaan di tingkat desa/kelurahan. Pemberdayaan perpustakaan secara optimal akan berfungsi sebagai rumah belajar masyarakat. Seluruh lapisan masyarakat dari segala umur dapat menggunakan perpustakaan untuk pemberdayaan diri dan pemberdayaan masyarakat.

Program yang tak kalah penting adalah program pendidikan kesetaraan bagi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Untuk skala nasional, penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan dimaksudkan sebagai upaya untuk mendukung dan mensukseskan program pendidikan wajib belajar 9 tahun yang merupakan penjabaran dari rencana strategis Departemen Pendidikan nasional yang meliputi perluasan akses, pemerataan, dan peningkatan mutu pendidikan. Tujuan pendidikan kesetaraan program kejar paket A, B dan C sendiri adalah meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap warga belajar sehingga dapat memiliki pengetahuan, keterampilan.

Dalam mengajak warga masyarakat untuk belajar di kelompok belajar (Kejar) paket tidaklah mudah. Sesuai dengan sebutannya yakni Kejar, para pengajar yang sebagian para kader PKK betul-betul harus mengejar para calon warga belajar ini. Memotivasi mereka dan menjelaskan akan pentingnya pendidikan. Untuk itu memang perlu memiliki kemampuan dalam melakukan pendekatan terhadap sasaran didik ini. Mereka adalah orang-orang yang bermasalah. Bermasalah dalam artian berkaitan dengan berbagai masalah seperti masalah ekonomi sehingga membuat mereka tidak mampu melanjutkan pendidikannya di pendidikan formal. Faktor-faktor yang paling sering mempengaruhi kegagalan mereka melanjutkan pendidikan formalnya antara lain yang paling signifikan adalah faktor ekonomi. Oleh karena itulah faktor ekonomilah yang lebih mereka perhatikan dari pada pendidikan.

Pada saat melaksanakan proses belajar ini juga menghadapi berbagai kendala seperti warga belajar yang bermalas-malasan. Kendala lainnya adalah

masalah cuaca yang kurang bersahabat. Terutama sekali saat-saat musim penghujan. Pada musim penghujan biasanya warga belajar malas keluar rumah untuk diajak belajar.

Untuk memberikan semangat (motivasi) kepada warga belajar agar tetap senang belajar, maka pengelola program pendidikan kesetaraan diharapkan juga mendirikan Taman bacaan masyarakat (TBM), yaitu merupakan sarana belajar bagi masyarakat untuk memperoleh informasi dan mengembangkan pengetahuan guna memenuhi minat dan kebutuhan belajarnya yang bersumber dari bahan bacaan dan bahan pustaka lainnya. Ini semacam perpustakaan mini dan tersebar untuk menjangkau masyarakat yang jauh dari layanan perpustakaan. Ada dua sasaran prioritas utama sasaran pendirian taman bacaan masyarakat, pertama untuk peningkatan minat baca masyarakat dan kedua untuk memelihara kemampuan keaksaraan masyarakat. Disamping itu, diharapkan keberadaan TBM bisa menjadi tempat berkumpul warga masyarakat untuk sekedar ngobrol mempererat silaturahmi tukar informasi untuk memperkaya wawasan. Dengan demikian TBM pun bisa berfungsi sebagai ruang publik untuk melakukan sosialisasi diri, termasuk mempromosikan/mengenalkan program-program pendidikan nonformal kepada masyarakat.

Dalam Pelaksanaan warga pelajar yakni Program Paket A setara SD dan Paket B Setara SMP dan Paket C setara SMA berbagai permasalahan yang paling berat dihadapi, diuraikan sebagai berikut :

- a. tempat tinggal warga belajar saling berjauhan sehingga sulit mendapatkan satu kelompok sebanyak 40 orang warga belajar;

- b. latar belakang sosial ekonomi warga belajar lemah sehingga frekuensi kehadirannya sangat rendah;
- c. warga belajar adalah sebagai pencari nafkah keluarga, mereka hanya belajar kalau waktu mengizinkan;
- d. motivasi belajar rendah, mereka berpendapat tanpa belajarpun mereka sudah mendapatkan uang

Menghadapi masyarakat desa yang sebagian besar masih berpendidikan rendah memang tidak mudah. Dalam membantu meningkatkan mutu kader dan minat baca masyarakat diperlukan pemberdayaan masyarakat yang salah satunya melalui program PKK. PKK sebagai mitra pemerintah yang dekat dan terjun langsung ke masyarakat dan sangat dekat dengan mereka.

Pemberdayaan adalah penguatan kemampuan, kemauan dan kemandirian masyarakat yang meliputi :

1. Penguatan bidang ekonomi baik dalam penguasaan aset, peningkatan SDM, akses pasar, perubahan sikap mental dalam berusaha dan bekerja.
2. Penguatan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan, politik melalui perluasan akses , sehingga terbentuk masyarakat yang memiliki kepribadian, disiplin, mandiri dan optimis.
3. Penguatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik
(Slamet Sutopo, KPM, 2006).

Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan sedikitnya ada 6 kegiatan :

1. Advokasi dan fasilitasi peningkatan pendidikan perempuan.
2. Advokasi dan fasilitasi dalam hak-hak reproduksi perempuan.

3. Advokasi dan fasilitasi hak-hak azasi dan hak-hak politik perempuan.
4. Advokasi dan fasilitasi perlindungan perempuan.
5. Advokasi dan fasilitasi dalam peningkatan peran perempuan di bidang ekonomi keluarga.
6. Advokasi dan fasilitasi penanganan masalah sosial perempuan, peningkatan peran perempuan di bidang politik dan lingkungan.

Pemberdayaan perempuan merupakan usaha sistematis dan terencana untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Untuk meningkatkan peran dan kedudukan perempuan perlu dikembangkan kebijakan nasional yang diemban oleh suatu lembaga yang mampu mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender (KKG) serta mampu meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan salah satunya yaitu PKK.

b. Peningkatan kualitas tenaga pendidik/ kader pos PAUD

PKK yang merupakan wadah kegiatan ibu-ibu, tidak afdol bila kurang memperhatikan sektor pendidikan. Dalam kehidupan keluarga, wanita adalah pengasuh serta pendidik yang utama dan pertama bagi putra-putrinya. Tiap keluarga harus mengerti arti anak dalam keluarga, kewajiban orang tua terhadap anak, cara mendidik, merawat dan membimbing anak. Pendidikan budi pekerti, agama dan persiapan anak untuk mendapat pendidikan dasar. Bagi ibu-ibu diperlukan peningkatan pengetahuan umum, pengetahuan khusus dan ketrampilan yang diperlukan dalam membina keluarga sejahtera.

Dalam hal ini PKK memanfaatkan jalur pendidikan non-formal. Dengan adanya Program “Wajib Belajar”, maka PKK menganjurkan keluarga untuk dapat

memberikan pendidikan yang baik bagi putera-puterinya. Anak laki-laki maupun perempuan, perlu mendapat kesempatan belajar yang sama. Sebagai mitra pemerintah, maka dewasa ini PKK juga berperan dalam melaksanakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Bina Keluarga Balita (BKB).

Peningkatan kualitas pendidik/ kader Pos PAUD yang telah dilakukan TP PKK yang berkoordinasi dengan UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kaliore selama ini memang sudah dilakukan dengan baik. Berbagai pembinaan mulai dari memberikan pelatihan mengajar di PAUD dengan menghadirkan para pembicara yang mahir di bidangnya, hingga pertemuan rutin kader Pos PAUD. Ditinjau dari segi mata pencaharian penduduk asli masyarakat Kecamatan Kaliore berprofesi sebagai petani dan nelayan, dengan demikian tingkat kemampuan mereka untuk berpartisipasi secara swadaya dalam turut mengsucceskan program PKK masih rendah.

Masih rendahnya pengetahuan warga masyarakat tentang arti pentingnya PKK sebagai sebuah organisasi Perberdayaan Masyarakat, Sehingga informasi yang harus disampaikan pada tingkat bawah memerlukan waktu dan kesabaran yang tinggi. Dengan berbagai langkah dan kerja keras yang dilakukan TP PKK Kecamatan Kaliore dan bekerjasama dengan UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kaliore maka pada tahun 2012 Kecamatan Kaliore yang diwakili Desa Tambakagung berhasil menjadi Juara 1 lomba membuat Alat Permainan Edukatif (APE) tingkat Provinsi. Dari dokumentasi dilapangan saat peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Sri dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam memberdayakan masyarakat itu tidak mudah. Diperlukan berbagai pendekatan-

pendekatan yang mudah diterima oleh masyarakat salah satunya yaitu dengan adanya program-program yang ada di PKK. Misalnya saja tidak semua Kepala Desa menyetujui bahwa desa yang dipimpinnya bisa dijadikan sebagai desa binaan oleh PKK yang diberi rekomendasi oleh pemerintah. Sebagai dewan penyantun, hendaknya seorang Kepala Desa selalu mendukung agar desa yang dipimpinnya menjadi lebih maju dan lebih mandiri dengan menjadi desa binaan.

c. Peningkatan keterampilan usaha

Kegiatan-kegiatan dalam program keterampilan terutama bertujuan mempertinggi mutu kehidupan keluarga di pedesaan dan memungkinkan masyarakat mencari nafkah tambahan dalam waktu senggang. Mengingat tujuan tersebut, program keterampilan juga berfaedah untuk menanggulangi masalah pokok mengenai kesempatan kerja dan pembangunan di daerah pedesaan. Dengan adanya keterampilan dari PKK juga bisa sebagai penambah penghasilan keluarga untuk mencapai kesejahteraan keluarga dan kesejahteraan sosial.

Prioritas utama dalam kesejahteraan sosial adalah, kelompok-kelompok yang kurang beruntung (*disadvantage groups*), khususnya keluarga miskin. Di mana dalam kesejahteraan sosial ini, dilakukan berbagai cara dan pelayanan agar keluarga-keluarga miskin dapat meningkatkan kualitas hidupnya menuju pada keluarga sejahtera lahir dan batin, yaitu dengan dapat terpenuhi semua kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Namun, istilah kesejahteraan sosial tidak merujuk pada suatu kondisi yang baku dan tetap. Istilah ini dapat berubah-ubah karena ukuran sejahtera atau tidak sejahtera kadang-kadang berbeda antara satu ahli dengan ahli yang lain.

Sebagaimana menurut Suharto (2005:1-5) kesejahteraan sosial adalah sebagai tujuan dari suatu kegiatan pembangunan. Misalnya, tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf kesejahteraan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat. Dengan demikian, prioritas utama pembangunan kesejahteraan sosial adalah kelompok-kelompok yang kurang beruntung (*disadvantage groups*), khususnya yang terkait dengan masalah kemiskinan.

Peningkatan taraf hidup kesejahteraan masyarakat dari PKK sendiri yaitu mulai dengan pemberian kursus keterampilan kerja, selanjutnya kelompok diberi modal usaha. Selain dari itu, PKK juga menggalakkan pelatihan atau kursus untuk membuat berbagai kerajinan tangan, produk-produk makanan dan minuman yang hasilnya dapat dijual. Ini membantu meningkatkan pendapatan keluarga. Harapan lebih lanjut, upaya ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi keluarga yang akan berimbas pada ekonomi masyarakat. Bisa jadi berupa industri rumah tangga makanan dan minuman, atau usaha produksi sandang atau kursus ketrampilan sandang. Industri rumah tangga dapat dilakukan secara berkelompok/kerjasama maupun sendiri. Semangat kerjasama/gotong royong ini juga dapat untuk mengembangkan kehidupan berkoperasi. Dimana PKK bidang ketrampilan sangat erat hubungannya dengan koperasi yaitu untuk membantu masyarakat dapat mendapatkan modal usaha.

Koperasi merupakan dasar demokarasi ekonomi yang diharapkan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Karena itu perlu dikembangkan di kalangan keluarga, karena akan mendorong kesempatan berusaha dan kesempatan kerja di berbagai lapangan baik produksi maupun jasa. Apabila setiap keluarga telah diberdayakan

mandiri dan berkembang, maka kesejahteraan keluarga akan meningkat. Terlebih lagi bila bidang pendidikan dan ketrampilan diberdayakan sejak dini di lingkungan masyarakat, akan terjembatani kesenjangan-kesenjangan di sektor lain.

d. Kerjasama PKK dengan Pemerintah

Dalam pelaksanaannya PKK tidak bekerja sendirian. Sebagai mitra kerja pemerintah dalam melakukan pembangunan, PKK sangat berhubungan langsung dengan masyarakat sekaligus memberi pelayanan. Dimana pembangunan yang diusung adalah dengan menggerakkan kader-kader di setiap jenjang dalam konsep pemberdayaan. Konsep pemberdayaan merupakan suatu konsep pembangunan. Didalam pembangunan masyarakat harus berubah secara sadar dan terencana untuk menuju ke arah yang lebih baik. Hubungan kerja antar TP PKK di semua jenjang, adalah bersifat konsultatif dan koordinatif dengan tetap memperhatikan hubungan hierarkis. Hubungan kerja antara TP PKK dengan pemerintah, lembaga kemasyarakatan, LSM dan lembaga lainnya adalah bersifat kemitraan.

Ketika paradigma pembangunan ditekankan pada pentingnya manusia dan nilai-nilai kemanusiaan, maka mau tidak mau perhatian terhadap kebutuhan kaum perempuan menjadi agenda penting bagi Negara. Pelaksanaan gerakan PKK dapat berjalan dengan baik apabila didukung oleh semua pihak dengan di sertai semangat persatuan dan kesatuan yang tinggi diantara semua pengurus dan kader-kader PKK.

Program pendidikan dan keterampilan merupakan perpaduan yang sangat berhubungan dengan pemberdayaan perempuan. Pelaksanaannya di Kecamatan Kaliore sendiri sudah terlaksana dengan baik antara pihak PKK dan pemerintah.

Namun dinas/instansi dalam memberikan bantuan sarana dan prasarana agak lambat. Hal ini dikarenakan SDM yang minim dan mengemban banyak tugas. Sehingga tugas kerjasama dengan PKK bukan diutamakan.

Pemerintah berfungsi dalam memfasilitasi sarana dan prasarana dalam meningkatkan pendidikan dan keterampilan masyarakat. Adapaun dinas/instansi yang banyak bekerjasama dengan PKK dalam program pendidikan dan keterampilan adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kabupaten Rembang. Lingkup kerja diantara keduanya sudah berjalan dengan baik yakni Penguatan Kelembagaan PKK, Pendampingan, pembinaan, monitoring kelompok SPP PNPM MPd oleh TP PKK Kab Rembang. Di Kecamatan Kaliore sendiri pembinaan dari BPMPKB melalui pelatihan kader BKB diberikan pada desa Binaan PKK Tahun 2013 yaitu Desa Dresi Kulon. Pameran hasil karya perempuan di lakukan dalam sebuah *event* tahunan yaitu Rembang Expo.

Kerjasama dengan UPT Dinas Pendidikan (Dispendik) Kecamatan Kaliore yang banyak berkaitan dengan pendidikan anak usia dini (PAUD) sudah terintegrasi dengan baik. Bahkan berkat pembinaan, penyuluhan yang diberikan UPT Dinas Pendidikan setempat kepada kader pos PAUD, desa Tambakagung Kecamatan Kaliore mendapatkan juara Alat Peraga Edukatif di tingkat provinsi.

Kerjasama dengan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah (Disperindagkop dan UMKM) yaitu tentang Kerjasama Bidang Perindustrian Perdagangan dan Koperasi. Lingkup kerja diantara keduanya harus rutin dilakukan karena penyelenggaraan pelatih manajemen

pengelolaan usaha, pelatihan kewirausahaan, penumbuhan industri di Desa P2MBG dan penumbuhan jumlah koperasi kurang memberikan pengertian yang mudah bagi sebagian masyarakat desa di Kecamatan Kaliori.

Kerjasama dengan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Program PNPM - MPd dalam rangka memberikan pelatihan kepada masyarakat desa sudah rutin dilakukan di desa-desa. Mulai dari pelatihan tata boga, membordir, menjahit, memasak, membuat kerupuk, membatik, membuat kue, dan membuat jajanan/makanan ringan. Setelah pemberian bekal keterampilan kepada Ibu-ibu di desa-desa harapannya tidak hanya berhenti sampai disitu. Mengingat terbatasnya anggaran yang dikeluarkan pemerintah dalam membiayai program PNPM tersebut dan memberikan bantuan alat-alat seperti alat jahit dan alat masak. Maka dari itu ibu-ibu tersebut harus memanfaatkan keterampilan yang sudah dimiliki untuk dikembangkan lagi menjadi usaha baru. Selama ini tidak banyak ibu-ibu yang sudah memanfaatkan keterampilan tersebut dikarenakan jika sudah merintis usaha ibu-ibu tersebut kurang mengerti cara pemasarannya.

Dari keempat pelaksanaan peran TP PKK dalam memberdayakan perempuan bidang pendidikan dan keterampilan di Kecamatan Kaliori dapat disimpulkan bahwa secara umum bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan TP PKK dalam program pendidikan dan keterampilan antara lain :

- 1). Pelatihan

Pelatihan yang diberikan yakni pelatihan bagi guru TK dan PAUD Desa/Kelurahan, pelatihan kader PKK, pelatihan Kader UP2K, pelatihan

kader BKB, dan pelatihan bagi Kepala Desa/ Lurah selaku Ketua Dewan Penyantun TP. PKK Desa/Kelurahan.

2). Sosialisasi

Sosialisasi yang dilakukan yaitu sosialisasi kepada masyarakat tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran akan arti Pendidikan PAUD, kemudian sosialisasi Keaksaraan Fungsional (KF). Sosialisasi ini memberdayakan masyarakat untuk dapat merangsang keterampilan membaca, menulis dan berhitung (Calistung) yang berorientasi pada kehidupan sehari-hari dengan memanfaatkan potensi yang ada di lingkungan.

3). Pembinaan

Pembinaan yang dilakukan meliputi pembinaan kelompok Bina Keluarga Balita (BKB). Untuk desa binaan ada pembinaan untuk Bina keluarga Remaja (BKR). Hal itu dilakukan agar aktivitas kader dalam membina kelompok tersebut dilakukan secara rutin. Kemudian pembinaan kepada pengelola perpustakaan karena perpustakaan di desa sudah sangat jarang digunakan.

2. Faktor pendukung dan penghambat Pelaksanaan Peran Tim Penggerak PKK dalam Memberdayakan Perempuan

a. Faktor pendukung Tim Penggerak PKK dalam Memberdayakan Perempuan

Setiap organisasi atau lembaga pasti mempunyai factor-faktor yang mempengaruhi lembaga yang bersangkutan sebagaimana halnya yang ada pada

organisasi ini. Di dalam Tim Penggerak PKK Kecamatan Kaliori ini mempunyai faktor pendukung dan yang mempengaruhi peran PKK dalam upaya untuk memberdayakan perempuan yang meliputi :

1) Adanya Program Kerja yang seragam dan terpadu

Salah satu faktor pendukung Tim Penggerak PKK dalam memberdayakan perempuan di Kecamatan Kaliori adalah adanya Program Kerja yang seragam dan terpadu. Dalam menyusun program-programnya, PKK kecamatan mengacu pada program Rakernas VII yang merupakan program serentak nasional sebagai panduan dalam melaksanakan program PKK di seluruh Indonesia. Dengan adanya pedoman tersebut maka dalam program pendidikan dan keterampilan PKK melihat dari segi kebutuhan masyarakat.

Di dalam buku pedoman PKK dari Rakernas VII telah ditulis secara rinci mulai dari Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK Tentang Hasil Rakernas VII PKK Tahun 2010 yang meliputi rumusan-rumusan Hasil Rakernas VII PKK tahun 2010 dan lampiran-lampirannya, Bidang kelembagaan PKK dan lampirannya, Bidang Rencana Lima Tahun PKK Tahun 2010-2015 dan lampirannya, Bidang Administrasi PKK dan lampirannya, serta perihal Penyesuaian dan Penetapan Hari Kesatuan Gerak PKK. Dalam melaksanakan program-programnya, PKK menggunakan konsep pemberdayaan. Konsep pemberdayaan (*empowerment*) merupakan suatu konsep dari pembangunan. Didalam pembangunan masyarakat harus berubah secara sadar dan terencana untuk menuju ke arah yang lebih baik.

Perubahan kearah masyarakat yang lebih baik ada di dalam konsep pemberdayaan.

Selain adanya program kerja yang jelas, hal tersebut belum tentu bisa berjalan tanpa adanya kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Yakni dengan dinas/instansi di Tingkat Kecamatan Kaliori dan organisasi wanita yang ada di wilayah Kecamatan Kaliori dan hal ini juga berkat dukungan peran Tim Penggerak PKK Desa, Kepala Desa dan perangkatnya serta Lembaga Desa, dan warga masyarakat yang turut berperan dalam melaksanakan program-program PKK. Untuk meningkatkan mutu kader dan lebih diberdayakan lagi, banyak pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan baik di tingkat Kecamatan maupun tingkat Kabupaten, hal ini mengacu perkembangan jaman dan situasi yang globalisasi ini. Adapun dana yang digunakan untuk pelatihan-pelatihan diperoleh dari Dana Bantuan Desa/Kelurahan untuk PKK Desa maupun anggaran dari PKK Kabupaten Rembang.

2) Sumber Daya Manusia yang bertanggung jawab

Suksesnya tidaknya suatu program yang diadakan oleh pemerintah maupun dari sebuah lembaga tidak terlepas dari tanggung jawab Sumber daya manusia itu sendiri. Paradigma yang dikembangkan PKK adalah dari atas ke bawah dan bergerak dari konsep pendidikan, pembinaan, dan pemberdayaan. Paradigma yang dikembangkan PKK mengharapkan perubahan ka arah kemandirian. Peranan PKK dalam program pendidikan dan keterampilan secara formal yaitu para kader PKK memotivasi masyarakat yang mempunyai anak untuk bersekolah. Sedangkan yang tidak formal maka Tim Penggerak (TP) PKK

bekerja sama dengan pemerintah dalam program PNPM taitu dengan mengadakan pelatihan-pelatihan dari PNPM.

Di era pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat menuju pelayanan prima, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. Gerakan PKK mempunyai peranan yang sangat penting dalam ikut serta menunjang terwujudnya pelaksana Otonomi Daerah. Sehingga sumber daya manusia tersebut merasa mengemban tanggung jawab bukan hanya sebagai Ibu rumah tangga tetapi perempuan pembangunan.

3) Adanya bantuan dana dari Pemerintah

Yang menjadi prioritas dari pokja II yaitu mengadakan pembinaan UP2K guna mengoptimalkan Usaha Keluarga dengan memberikan bantuan Modal dan Pelatihan keterampilan bekerjasama dengan Program PNPM. Dalam masyarakat pedesaan yang pada umumnya meliputi satuan-satuan ekonomi yang kecil-kecil, seorang wiraswastawan kecil yang memegang peranan penting dalam proses pembangunan yang berlangsung.

Dalam hal ini PKK memanfaatkan jalur pendidikan non-formal. Dengan adanya Program “Wajib Belajar”, maka PKK menganjurkan keluarga untuk dapat memberikan pendidikan yang baik bagi putera-puterinya. Anak laki-laki maupun perempuan, perlu mendapat kesempatan belajar yang sama. Sebagai mitra pemerintah, maka dewasa ini PKK juga berperan dalam melaksanakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Bina Keluarga Balita (BKB). Dalam rangka Pemberantasan Buta Aksara, PKK melaksanakan “Paket A, B dan C”,

yang dapat disejajarkan dengan SD, SMP dan SMU. PKK percaya bahwa pendidikan adalah proses seumur hidup. PKK juga melaksanakan program Keaksaraan Fungsional. Proses belajar program ini berdasarkan jenis pekerjaan yang dibutuhkan peserta kursus.

Dalam hubungannya dengan tugas pembangunan, pemerintah berkewajiban dan mengutamakan ketelibatannya dalam pemberian pengarahan, bimbingan dan menciptakan iklim yang menggairahkan masyarakat untuk membangun serta menumbuhkembangkan prakarsa, kreativitas, oto-aktivitas dan partisipasi masyarakat untuk membangun. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah berperan sebagai pembaharu/inovator, stabilisator, penggerak pembangunan (*agent of development*), penggerak modernisasi (*agent of modernization*) dan penggerak perubahan (*agent of change*).

2. Faktor penghambat Pelaksanaan Peran TP PKK dalam Memberdayakan Perempuan

1) Semakin kurangnya Tenaga sukarela/Kader PKK di Desa-desa

Terjadinya krisis ekonomi yang mengharuskan para kader lebih memprioritaskan kepentingan keluarga dengan mencari tambahan penghasilan untuk menopang kebutuhan keluarga. Dengan tingkat pendidikan yang bervariasi seringkali sekretaris PKK di Desa dalam membuat laporan kegiatan 10 program PKK harus meminjam buku laporan desa lain untuk membuatnya. Hal ini disebabkan kurang adanya koordinasi yang baik antara dewan penyantun dengan TP PKK di desa.

Pemberdayaan adalah sebuah proses menjadi, bukan sebuah proses instant. Sebagai proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan: penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan” (Wrihatnolo dan Nugroho, 2007:2). Tahap-tahap pemberdayaan sendiri ada tahap yaitu penyadaran, pengkapasitasan, dan ppendayaan. Dalam hal ini TP PKK Kecamatan Kaliore telah memberikan penyadaran dengan menentukan target masyarakat yang akan diberdayakan contohnya di Desa Dresi Kulon.

Sebagai desa binaan pada tahun 2013, desa Dresi Kulon telah mengalami kemajuan. Apabila sebelumnya desa tersebut para kader PKK agak kendor dan kurang rutin menjalankan program PKK maka setelah diberikan penyadaran masyarakat menjadi terbuka wawasannya. Dengan kata lain masyarakat bawah apabila diperhatikan oleh pemerintah maka akan menjadikan masyarakat tersebut merasa dihargai. Kemudian tahap selanjutnya, yaitu pengkapasitasan atau yang sering disebut *capacity building*. Apabila di PKK, mereka membantu memampukan manusia melalui pelatihan-pelatihan yang diadakan. Sedangkan tahap ketiga yaitu pendayaan.

Dalam hal ini PKK telah memberikan daya, maupun peluang sesuai dengan kecakapan dan kualitas yang telah dimiliki seperti di desa Tungulsari yang hampir perempuan di satu desa tersebut diberdayakan untuk mengolah hasil ikan menjadi makanan/barang yang bernilai jual misalnya ikan kering, krupuk ikan, abon ikan, terasi, dan lain-lain. Para ibu-ibu tersebut tergabung dalam sebuah kelompok wanita nelayan tambah rejeki yang anggota-anggotanya merupakan kader PKK.

Kaitannya dengan peran serta masyarakat dalam program tertentu, peranan tokoh masyarakat baik formal maupun non-formal sangat penting terutama dalam mempengaruhi, memberi contoh, dan menggerakkan keterlibatan seluruh warga masyarakat di lingkungannya guna mendukung keberhasilan program. Apalagi di masyarakat pedesaan, peran tersebut menjadi faktor determinan karena kedudukan para tokoh masyarakat masih sangat kuat pengaruhnya, bahkan sering menjadi tokoh panutan dalam segala kegiatan hidup sehari-hari warga masyarakat. Persepsi warga masyarakat terhadap program tertentu merupakan landasan atau dasar utama bagi timbulnya kesediaan untuk ikut terlibat dan berperan aktif dalam setiap kegiatan program tersebut. Makna positif atau negatif sebagai hasil persepsi seseorang terhadap program akan menjadi pendorong atau penghambat baginya untuk berperan dalam kegiatannya.

Program-program Pemberdayaan kepada perempuan bisa meliputi :

1. Pelibatan kelompok perempuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring semua program pembangunan yang ada. Keterlibatan perempuan meliputi program pembangunan fisik, penguatan ekonomi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan yang ada harus mampu memenuhi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok perempuan. Pembangunan untuk kepentingan perempuan tentu harus pula melibatkan perempuan. Dengan melibatkan kaum perempuan secara aktif sejak tahap perencanaan, pemenuhan kebutuhan gender secara praktis (jangka pendek) maupun strategis (jangka panjang) diharapkan dapat terwujud.

2. Peningkatan kemampuan kepemimpinan perempuan, agar dapat mempunyai posisi tawar yang setara serta memiliki akses dan peluang untuk terlibat dalam pembangunan. Para perempuan yang mempunyai kemampuan sebagai pemimpin, diharapkan dapat memperjuangkan kepentingan kaum perempuan dalam proses pembangunan di wilayahnya.
3. Peningkatan kemampuan anggota kelompok perempuan dalam bidang usaha (skala industri kecil/rumah tangga hingga skala industri besar) dengan berbagai ketrampilan yang menunjang seperti; kemampuan produksi, kemampuan manajemen usaha, serta kemampuan untuk mengakses kredit dan pemasaran yang lebih luas.

Secara umum hal tersebut sudah dilakukan oleh TP PKK Kecamatan Kaliore. Perempuan diberikan berbagai pembinaan dan bekal agar menuju masyarakat yang mandiri. Fungsi dan peran Tim Penggerak PKK adalah sebagai penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK. Kedua, sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina, dan pembimbing gerakan PKK.

Dalam berbagai kegiatan PKK yang berhubungan dengan pemberdayaan perempuan fungsi tersebut sudah banyak diterapkan. Ketika ada potensi dari suatu kelompok PKK yang berhubungan dengan usaha, maka dari TP PKK akan membantu memfasilitasi dan memberikan motivasi dengan harapan usaha tersebut akan berkembang. Namun hasil akhir berkembang atau tidaknya usaha tersebut bergantung pada sumber daya manusia itu sendiri dalam mengelolanya. Apabila

SDMnya bagus dan ada keseriusan maka bisa berkembang. Sebaliknya jika tidak dilakukan dengan serius maka usaha tersebut akan kurang berkembang.

2) Terbatasnya kemampuan dan rendahnya tingkat pendidikan

Kader

Berdasarkan tujuan millennium yang harus dicapai tahun 2015 antara lain adalah kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Dengan masih adanya kesenjangan gender dalam pembangunan yang salah satunya ditandai dengan masih rendahnya peluang bagi perempuan untuk bekerja dan berusaha, akses pendidikan dan peran ekonomi. Meskipun sebagian perempuan telah banyak berperan pada sektor ekonomi, tetapi masih dianggap sebagai pencari nafkah tambahan yang berakibat pada penghargaan terhadap mereka masih tidak setara dengan laki-laki.

Gerakan Tim Penggerak PKK adalah suatu konsep yang dilakukan oleh individu/kelompok dalam mempengaruhi masyarakat meliputi norma-norma, yang dikembangkan dalam masyarakat, peningkatan ekonomi keluarga, serta membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Walaupun tidak digaji mereka telah bekerja dengan profesional dalam mendukung kesejahteraan keluarga.

Konsep strategis dalam pengarus-utamaan gender nasional Indonesia yang disusun oleh Kantor Meneg PP bekerja sama dengan UNDP berkenaan dengan tiga sektor pokok yang diacu dalam Indikator Pembangunan Manusia atau *Human Development Index* (HDI), yaitu Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi. Konsep strategis yang dipergunakan di sini mengedepankan beberapa prinsip pokok yang menjadi acuan dari pembangunan hari ini yaitu Adanya kemitraan antara

pemerintah dan masyarakat, khususnya dengan tujuan pembangunan masyarakat yang madani (*civil society*). Pendekatan ini merupakan pendekatan yang melihat bahwa pembangunan hari ini khususnya pengarus-utamaan gender tidak lagi bisa dengan pola *government* (atau *state driven*), melainkan *government* (atau *state*) *and society driven*. Di sini unsur-unsur masyarakat, khususnya lembaga swadaya masyarakat baik yang berbasis massa, menjadi mitra yang strategis. Mengedepankan pemberdayaan sebagai inti pendekatan sebab pemberdayaan adalah sebuah konsep yang berdekatan dengan demokrasi dan penegakan Hak Asasi Manusia.

Dalam gerakan PKK, kegiatan pencatatan dan pelaporan merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab seorang kader selain kegiatan pembinaan dan penggerakan. Namun di dalam kenyataannya kegiatan pencatatan dan pelaporan tidak dapat berjalan seperti yang di harapkan, hal ini disebabkan tingkat pendidikan kader yang bervariasi. Maka untuk meningkatkan kualitas gerakan PKK, perlu dilaksanakan pelatihan-pelatihan dan peningkatan mutu kader secara berkesinambungan dan menyeluruh.

Dengan terbatasnya kemampuan dan rendahnya tingkat pendidikan maka sangat mempengaruhi perkembangan PKK khususnya bidang administrasi. Pelaporan pelaksanaan 10 program PKK tahunan yang dikerjakan oleh para kader seringkali menjadi masalah tersendiri bagi para kader. Mereka yang masih kurang mempunyai kemampuan dibidang administrasi justru kesulitan dalam pembuatannya. Selain itu kurang adanya kesadaran pengurus dan masih banyak tergantung pada ketua Tim Penggerak PKK Desa.

Terbatasnya kemampuan dan rendahnya tingkat pendidikan kader perlu dibarengi dengan motivasi yang penuh dari Dewan Penyantun dan PKK jenjang di atasnya agar para kader-kader baik di desa, kelurahan, RW/RT merasa diperhatikan keberadaannya. Kurangnya motivasi terhadap pengelolaan administrasi, motivasi sangat berpengaruh terhadap meningkatnya kemampuan pengurus dalam pengelolaan administrasi yang tertib, tepat, cepat dan akurat. Banyaknya administrasi dan jangka waktu permintaan pelaporan yang terlalu sering dan akhirnya sering membuat jenuh kader dalam hal pengisian data.

3) Kurangnya dukungan dari Dewan Penyantun di desa-desa

Dewan penyantun TP PKK adalah unsur pendukung pelaksanaan program PKK yang terdiri atas pimpinan instansi/lembaga yang membidangi tugas-tugas pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga serta para tokoh/pemuka masyarakat, lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati/Walikota, Camat dan Kepala Desa/Lurah sesuai dengan jenjang pemerintahan. Dewan Penyantun bisa saja menjadi faktor penghambat manakala program yang dijalankan tidak mendapat dukungan dari Kepala Desa. Dari pembahasan yang telah dijelaskan dari wawancara dengan salah satu anggota TP PKK Kecamatan Kaliorejo yaitu beberapa dari 23 Desa di Kecamatan Kaliorejo ternyata ada yang kurang mendukung program-program PKK, misalnya saja seorang Kepala Desa tidak mau Desa yang dipimpinnya dijadikan sebagai desa binaan PKK, padahal dengan begitu desa tersebut bisa semakin maju dan lebih produktif.

Keberadaan PKK suatu gerakan yang sudah melembaga sampai di lapisan terkecil masyarakat di seluruh Indonesia tentunya dapat dipikirkan sebagai salah satu *'institusi'* sesuai dengan teori, yang dapat membantu pelaksanaan pemberdayaan masyarakat khususnya perempuan. PKK yang merupakan suatu Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga adalah satu - satunya wadah bagi setiap perempuan yang menjangkau sampai dengan lapisan masyarakat yang paling bawah yaitu keluarga. Sebab keanggotaan PKK mencapai sampai setiap rumah tangga di seluruh wilayah Indonesia.

Kesepuluh program pokok PKK, sebenarnya berisikan pelaksanaan berbagai program peningkatan kesejahteraan dari pemerintah. Dengan kata lain PKK memang merupakan perpanjangan tangan dari pelaksanaan program pemerintah yang dilembagakan dengan motor penggerak utama perempuan. Sehingga sangat tergantung pada peran dan kualitas sumberdaya manusia yang melaksanakannya. Dari hasil penelitian gerakan PKK ternyata belum bisa memiliki peran secara langsung bagi perempuan dalam membantu ekonomi keluarga. Sebab para perempuan tersebut masih bekerja sendiri-sendiri dalam mencari penghasilan tambahan. Namun, PKK memiliki potensi berupa pengaruh secara tidak langsung dimana berbagai kegiatan dalam gerakan PKK merupakan sarana/wadah bagi perempuan untuk melakukan kegiatan yang dapat membantu ekonomi keluarganya.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Salah satu organisasi yang telah ada dan diakui manfaatnya bagi masyarakat, terutama dalam upaya meningkatkan keberdayaan dan kesejahteraan keluarga adalah gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Peranan dari PKK dapat menggugah masyarakat agar termotivasi untuk selalu dinamis, mau mengubah keadaan kepada yang lebih maju lagi, dan manfaatnya telah banyak dirasakan oleh masyarakat. Dengan adanya pemberdayaan dari PKK dapat meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan untuk menuju Tujuan Pembangunan Milenium yang harus dicapai tahun 2015 antara lain adalah kesetaraan gender/ Pengarusutamaan Gender (PUG) dan pemberdayaan perempuan.

1. Pelaksanaan Peran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Memberdayakan Perempuan Program Pendidikan dan Keterampilan di Kecamatan Kaliore Kabupaten Rembang.

a. Peningkatan pengetahuan kader dan minat baca masyarakat

Upaya peningkatan pengetahuan kader dan minat baca masyarakat yang dilakukan TP PKK Kecamatan Kaliore yaitu dengan menggelar acara bimbingan teknis (bimtek) kepada para kader PKK Desa/kelurahan, sosialisasi, pelatihan-pelatihan, menyediakan majalah dinding di dalam kantor sekretariat PKK,

mengumpulkan kliping yang berisi artikel-artikel pengetahuan serta menyediakan majalah, buku di perpustakaan.

b. Peningkatan kualitas tenaga pendidik/ kader pos PAUD

Peningkatan ini disinergikan dengan Dinas Pendidikan yaitu dengan memberikan pembinaan secara edukatif karena mereka berhubungan langsung dengan dunia pendidikan hingga memberikan pelatihan pembuatan alat permainan edukatif terutama untuk pendidikan anak usia dini (PAUD).

c. Peningkatan keterampilan usaha

Peningkatan keterampilan usaha dimaksudkan untuk membantu meningkatkan perekonomian keluarga dengan memberdayakan perempuan sebagai objeknya. Usaha yang dilakukan dengan kursus keterampilan kerja, pelatihan-pelatihan membuat makanan, menjahit, dan sebagainya sesuai dengan permintaan Desa yang diberi ketrampilan. Selanjutnya kelompok diberi modal usaha.

d. Kerjasama dengan pemerintah

Dengan adanya MOU yang terjalin antara PKK dengan Dinas/Instansi terkait, PKK dapat melaksanakan programnya dengan mudah dan terintegrasi. Dengan adanya jalinan kerjasama yang baik maka pemerintah akan lebih mudah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat bahkan ke tingkat yang paling kecil yakni keluarga.

2. Faktor pendorong dan penghambat Pelaksanaan Peran Tim Penggerak PKK dalam Memberdayakan Perempuan Program Pendidikan Dan Keterampilan

a. Faktor pendukung Pelaksanaan Peran Tim Penggerak PKK dalam Memberdayakan Perempuan Program Pendidikan Dan Keterampilan

1) Adanya Program Kerja yang serentak dan terpadu

Dalam menyusun program-programnya, PKK mengacu pada program Rakernas VII yang merupakan program serentak nasional sebagai panduan dalam melaksanakan program PKK di seluruh Indonesia. Dengan adanya pedoman tersebut maka keberhasilan program akan mudah diketahui.

2) Sumber Daya Manusia yang bertanggung jawab

Dalam mengemban tugasnya, Tim Penggerak PKK merupakan SDM yang memiliki fungsi ganda yakni sebagai pegawai dan sebagai kader PKK karena kebanyakan Tim Penggerak PKK di tingkat Kecamatan sebagian besar dari kalangan PNS. Meski memiliki peran ganda, tanggung jawab yang dimiliki sangat besar dalam membantu pemerintah dalam pembangunan.

3) Adanya Bantuan Dana dari Pemerintah

Sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam mendukung program kerja PKK yakni adanya bantuan dana dari pemerintah yang berasal dari APBD, APBDes, Dana PUG, dan bantuan modal kerja.

b. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pera TP.PKK dalam Memberdayakan Perempuan Program Pendidikan dan Keterampilan

- 1) Semakin kurangnya tenaga sukarela/Kader PKK di Desa-desa.

Banyaknya masyarakat yang bermata pencaharian sebagai nelayan dan petani. Sebagaimana keadaan di Desa, tingkat pendidikan sangat mempengaruhi pola pikir masyarakat. Tidak banyak dari mereka yang mau memikirkan sumbangsuhnya untuk kemajuan pembangunan di desanya. Mereka tidak mau ribet dengan membuat laporan-laporan terlebih jika mereka belum dijelaskan terlebih dahulu dan masih asing dengan tehnologi.

- 2) Terbatasnya kemampuan dan rendahnya tingkat pendidikan kader.

Dalam hal ini kader di Desa berbeda dengan kader di Kecamatan, kader di desa sebagian besar hanya ibu rumah tangga yang dalam kesehariannya membantu suami mencari nafkah. Hal ini sangat mempengaruhi perkembangan PKK khususnya bidang administrasi.

- 3) Kurangnya dukungan dari Dewan Penyantun di desa-desa

Dewan penyantun TP PKK adalah unsur pendukung pelaksanaan program PKK dalam hal ini dewan penyantun di desa adalah Kepala Desa. Dewan Penyantun bisa saja menjadi faktor penghambat manakala program yang dijalankan tidak mendapat dukungan dari Kepala Desa.

B. SARAN

Dari penjelasan yang diuraikan diatas, saran yang dapat diberikan peneliti sehubungan dengan Pelaksanaan Peran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Memberdayakan Pernerempuan Program Pendidikan dan Keterampilan di Kecamatan Kaliore Kabupaten Rembang antara lain sebagai berikut :

1. Untuk menambah dan mendapatkan tenaga sukarela/kader PKK di desa-desa dibutuhkan campur tangan tokoh masyarakat yang memang berpengaruh dalam masyarakat tersebut misalnya ibu Camat. Beliau seharusnya ikut mempengaruhi masyarakat dan memilah dan menunjuk Ibu-ibu yang memang mempunyai potensi dan dianggap mampu membagi waktunya untuk menjadi kader PKK di desa.
2. Guna mengatasi keterbatasan kemampuan kader dan tingkat pendidikan kader, TP PKK perlu mendidik secara profesional tenaga penyuluh yang khusus untuk membantu tugas-tugas administrasi yang diemban oleh TP PKK di Desa-desa.
3. Meskipun telah banyak kemajuan yang dihasilkan dalam pembangunan di pedesaan namun disadari bahwa masih ada kesenjangan pertumbuhan antar desa. Untuk mengatasinya dalam masa pembangunan mendatang kegiatan PKK di desa perlu ditingkatkan dengan meningkatkan kemampuan masyarakat dan lebih diasah kempuannya dengan diberikan ketrampilan dan pendidikan yang berkualitas dan memadai. Peran serta masyarakat pedesaan

serta usaha-usaha ekonomi produktif lembaga-lembaga perekonomian di Desa agar lebih aktif.

4. Untuk Ketua Tim Penggerak PKK Desa, Ketua Kelompok PKK Dusun, RW, RT dan Kader Dasawisma agar terus mendukung dan menjalankan Tupoksi dan tanggung jawab sebagai kader yang menjadi ujung tombak kegiatan di tingkat Desa dan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan.
5. Kepada Dewan Penyantun Tingkat Kecamatan dan Desa se-kecamatan Kaliori agar memfasilitasi dan membantu memberikan sarana dan prasarana yang memadai dan memberi dukungan penuh program-program gerakan PKK agar program-program PKK dapat dilaksanakan dengan mudah. Dalam hal ini diperlukan Dewan Penyantun yang memang berkomitmen dalam membantu membangun kesejahteraan masyarakat.
6. Perlunya peran aktif segenap lapisan masyarakat Kecamatan Kaliori untuk menciptakan pembangunan sehingga hasilnya dapat dinikmati oleh warga di desa masing-masing.
7. Perlunya meningkatkan sumber-sumber pendanaan TP PKK baik melalui APBDes, APBD maupun APBN. Selain itu bila memungkinkan, dukungan dana dari para pengusaha atau donatur lainnya juga sangat diperlukan terutama untuk membiayai berbagai kegiatan yang mengerahkan massa seperti bazar, pasar murah, pameran produk dan sebagainya. Karena hal itu

untuk memperlancar kegiatan dan meluas keseluruhan penjuru desa di Kecamatan Kaliore

8. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam membantu melancarkan kegiatan-kegiatan PKK
9. Menambah Kegiatan-kegiatan khusus yang berkualitas dengan berlabelkan atas nama PKK agar keberadaan PKK lebih eksis dan lebih dikenal masyarakat luas.



CURRICULUM VITAE

Nama : Nina Rosa Riana
Nomor Induk Mahasiswa : 105030100111090
Tempat dan tanggal lahir : Rembang, 26 Oktober 1992
Pendidikan : 1. SDN 3 Sumberjo Rembang : 1998-2004
2. SMPN 2 Rembang : 2004-2007
3. SMAN 1 Rembang : 2007-2010
Publikasi-publikasi atau karya ilmiah : Pembangunan Rumah Susun Sederhana (Rusuna) Dalam Rangka Pengentasan Pemukiman Kumuh Dan Ilegal Di Ibukota





**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Jl. dr. Sutomo No. 16 A Telp. / Fax. (0295) 691197 Rembang
Kode Pos 59211

Rembang, 08-01 - 2014

Nomor : 070 / 028 / 2014
Lampiran : -
Perihal : Ijin Penelitian

Yth. Kepada :
1. Ketua Tim PKK
Kabupaten Rembang
2. Ketua Tim PKK
Kecamatan Kaliore ✓
di-
Tempat

- I. Dasar :
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penertiban Rekomendasi Penelitian.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang

II. Membaca : Surat dari Universitas Brawijaya " Fakultas Ilmu Administrasi " Nomor : 08/UN103/PG/2013 Tanggal 24 Desember 2013 Perihal : Ijin Riset

III. Yang dilaksanakan oleh :

Nama : Nina Rosa Riana
NPP/NPM : 105030100111090
Alamat : Desa Sawahan RT 01 RW 04 Kecamatan Rembang
Status/Pekerjaan : mahasiswi
Kebangsaan : Indonesia
Lokasi : PKK Kabupaten Rembang & PKK Kecamatan Kaliore
Waktu : 06 Januari 2014 s/d 20 Pebruari 2014
Pengikut : -
Penanggung Jawab : Dr. Choirul Saleh, M.Si

Bermaksud untuk melaksanakan riset guna penyusunan skripsi dengan judul :
" Peran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Mensejahterakan Perempuan (Studi Tentang Program Pendidikan dan Ketrampilan, Kecamatan Kaliore, Kabupaten Rembang) "

- IV. Pertimbangan : Bahwa dalam penelitian dapat diterima atas dasar sesuatu kegiatan ilmiah dan pengabdian masyarakat perlu dibantu pengembangannya.

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

- Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak dilaksanakan untuk tujuan lain yang dapat mengganggu stabilitas Kamtibmas;
- Sebelum melaksanakan kegiatan dimaksud terlebih dahulu harus melaporkan kepada pejabat setempat;
- Mentaati segala ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku serta petunjuk dari pejabat Pemerintah yang berwenang;
- Setelah selesai melaksanakan kegiatan dimaksud, supaya melaporkan kepada Kantor Kesbang Pol dan Linmas Kabupaten Rembang;
- Apabila masa berlaku surat ijin ini berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan dari Instansi Pemohon.

Surat Permohonan Ijin Penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat ijin ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

An. KEPALA KANTOR KESBANG POL DAN LINMAS
KABUPATEN REMBANG
Plt. Kas. Pol. Dagri & Hal





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jalan. MT. Haryono 163, Malang 65145, Jawa Timur, Indonesia
Telp. +62-341-553737, 568914, 558226 Fax. +62-341-558227
E-mail: fia@ub.ac.id Website: http://fia.ub.ac.id

Program Studi: • Sarjana: - Ilmu Administrasi Publik - Administrasi Pemerintahan - Perencanaan Pembangunan - Ilmu Perpustakaan - Ilmu Administrasi Bisnis - Perpajakan
- Bisnis Internasional - Hospitality dan Pariwisata
• Magister: - Ilmu Administrasi Publik - Ilmu Administrasi Bisnis • Doktor Ilmu Administrasi

Nomor : 08 /UN 10.3/PG/2013
Lampiran : -
Hal : Riset
Kepada : Yth. Kepala Bakesbang. Pol dan Linmas
Kabupaten Rembang

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset bagi mahasiswa :

Nama : Nina Rosa Riana

Alamat : Jl. Dr. Wahidin Gg. II No. 5 Rembang

NIM : 105030100111090

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Tema : Pemberdayaan Masyarakat

Judul : Peran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Mensejahterakan Perempuan (Studi tentang Program Pendidikan dan Keterampilan, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang)

Lamanya : 1 bulan 15 hari (6 Januari 2013 s/d 20 Februari 2014)

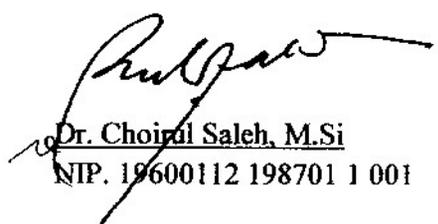
Peserta : 1 Orang

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 24 Desember 2013

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Administrasi Publik


Dr. Choirul Saleh, M.Si

NIP. 19600112 198701 1 001

Tembusan :

1. Ketua Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Rembang
2. Ketua Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)
KABUPATEN REMBANG
DENGAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN
KELUARGA BERENCANA (BPMPKB)
KABUPATEN REMBANG
TENTANG
KERJASAMA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN
DAN KELUARGA BERENCANA**

Nomor : MOU / 12 / 2013

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh tujuh bulan Februari tahun dua ribu dua belas yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. Hj. UMY JAZILAH SALIM, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Rembang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP. PKK Kabupaten Rembang) di Rembang, Jl. Gatot Subroto No. 8 Rembang, selanjutnya disebut sebagai :

..... PIHAK PERTAMA

- II. Ir. DWI WAHYUNI HARIYATI, MM, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang berkedudukan di Rembang Jl. Pemuda Km 2 Rembang selanjutnya disebut sebagai :

..... PIHAK KEDUA

Para pihak setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam kegiatan Pelaksanaan Program Kerja TP. PKK Kabupaten Rembang Tahun 2012, menurut ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**Pasal 1
TUJUAN DAN SASARAN**

1. Tujuan kerjasama ini untuk meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana serta kerjasama lintas sektor dalam pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Program Kerja TP. PKK Kabupaten Rembang Tahun 2012
2. Sasaran kerjasama ini untuk memenuhi kebutuhan para pihak melalui kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

**Pasal 2
LINGKUP KERJASAMA**

1. Fasilitasi rapat-rapat (Rakon, rapat pleno, Rapat Kesekretariatan, dan Evaluasi 10 Program Pokok PKK)
2. Pelatihan SPP PNPM Md
3. Monitoring SPP PNPM-MD
4. Identifikasi PIK, Pelatihan PS/KS, Fasilitasi kelompok PIK dan lomba PIK, Monev

PIK

5. Sosialisasi Perbub No 29 Tahun 2008 tentang Penanganan Terpadu Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak



6. Fasilitasi untuk kader Posyandu
7. Rapat Satgas GSIB Kecamatan
8. Rapat Satgas GSIB Desa Kunjungan keluarga AKI
9. Konseling Pra dan Pasca Pelaaan KB
10. Lomba Pengelola Kesatuan Gerak PKK
11. Lomba Posyandu
12. Pembinaan, Penyuluhan kesertaan ber KB
13. Pembinaan institusi

Pasal 3
PELAKSANAAN

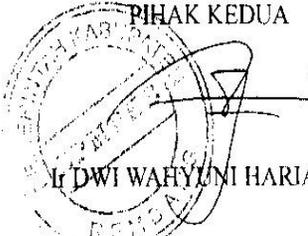
Pelaksanaan Program Kerja TP. PKK Kabupaten Rembang Tahun 2013 pada bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2013. Sasaran dan materi ditentukan lebih lanjut berdasarkan kesepakatan para pihak.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama berlaku untuk 1 (satu) tahun sejak ditandatangani perjanjian kerjasama ini dan sewaktu-waktu dipandang perlu dapat ditinjau kembali atau dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak.

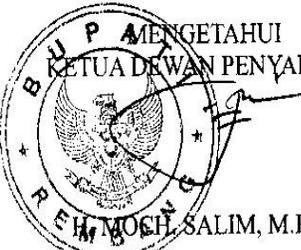
Pasal 5
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan para pihak.

PIHAK KEDUA

Ir DWI WAHYUNI HARIATI, MM

PIHAK PERTAMA

H UMY IAZILAH SALIM

BUPA MENGETAHUI
KETUA DEWAN PENYANTUN

H. MOCH. SALIM, M.Hum

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)
KABUPATEN REMBANG
DENGAN
DINAS PENDIDIKAN (DINPENDIK)
KABUPATEN REMBANG
TENTANG
KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN**

Nomor : MOU / 09 / 2013

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh tujuh bulan Februari tahun dua ribu dua belas yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. Hj. UMY JAZILAH SALIM, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Rembang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP. PKK Kabupaten Rembang) di Rembang, Jl. Gatot Subroto No. 8 Rembang, selanjutnya disebut sebagai :

..... PIHAK PERTAMA

- II. Drs. DANDUNG DWI SUCAHYO, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang berkedudukan di Rembang Jl. Pemuda Km 2 Rembang selanjutnya disebut sebagai :

..... PIHAK KEDUA

Para pihak setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam kegiatan Pelaksanaan Program Kerja TP. PKK Kabupaten Rembang Tahun 2012, menurut ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**Pasal 1
TUJUAN DAN SASARAN**

1. Tujuan kerjasama ini untuk meningkatkan pendidikanl serta kerjasama lintas sektor dalam pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Program Kerja TP. PKK Kabupaten Rembang Tahun 2012
2. Sasaran kerjasama ini untuk memenuhi kebutuhan para pihak melalui kegiatan Bidang Pendidikan.

**Pasal 2
LINGKUP KERJASAMA**

1. Sosialisasi UU Pemberantasan Tindak Perdagangan orang
2. Pengarusutamaan Gender
3. Pengembangan Sekolah Model Rintisan PUG
4. Pemberdayan Pendidik Non Formal
5. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
6. Penyelenggaraan Taman Bacaan Masyarakat
7. Penyelenggaraan kursus pada LKP
8. Penyelenggaraan kursus pada PKBM
9. Penyelenggaraan Paket B setara SMP
10. Penyelenggaraan Paket C Setara SMA
11. Fasilitasi Program Makanan Tambahan Anak sekolah

Pasal 3
PELAKSANAAN

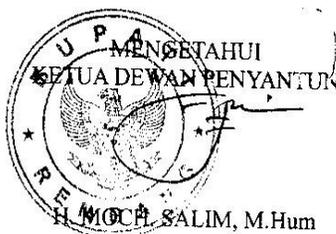
Pelaksanaan Program Kerja TP. PKK Kabupaten Rembang Tahun 2013 pada bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2013. Sasaran dan materi ditentukan lebih lanjut berdasarkan kesepakatan para pihak.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama berlaku untuk 1 (satu) tahun sejak ditandatangani perjanjian kerjasama ini dan sewaktu-waktu dipandang perlu dapat ditinjau kembali atau dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak.

Pasal 5
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan para pihak.



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)
KABUPATEN REMBANG
DENGAN
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI (DINPERINDAGKOP)
KABUPATEN REMBANG
TENTANG
KERJASAMA BIDANG PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI**

Nomor : MOU / 05 / 2013

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh tujuh bulan Februari tahun dua ribu dua belas yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. Hj. UMY JAZILAH SALIM, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Rembang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP. PKK Kabupaten Rembang) di Rembang, Jl. Gatot Subroto No. 8 Rembang, selanjutnya disebut sebagai :

..... PIHAK PERTAMA

- II. H. Drs. WALUYO, MM, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Kabupaten Rembang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang berkedudukan di Rembang Jl. Pahlawan No. 02 Rembang selanjutnya disebut sebagai :

..... PIHAK KEDUA

Para pihak setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam kegiatan Pelaksanaan Program Kerja TP. PKK Kabupaten Rembang Tahun 2012, menurut ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan kerjasama ini untuk meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Program Kerja TP. PKK Kabupaten Rembang Tahun 2012
2. Sasaran kerjasama ini untuk memenuhi kebutuhan para pihak melalui kegiatan Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Usaha menengah kecil dan Mikro.

Pasal 2

LINGKUP KERJASAMA

1. Penumbuhan Industri di desa P2MBG
2. Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan daerah penghasil bahan baku (Pelatihan industri border dan industry kecap)

Pasal 3
PELAKSANAAN

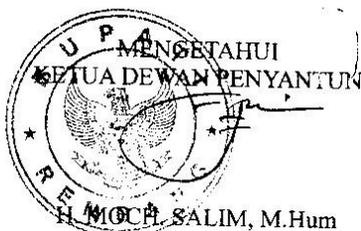
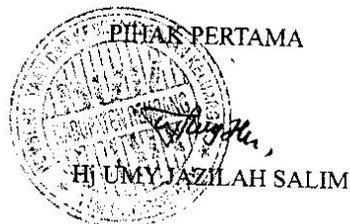
Pelaksanaan Program Kerja TP. PKK Kabupaten Rembang Tahun 2013 pada bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2013. Sasaran dan materi ditentukan lebih lanjut berdasarkan kesepakatan para pihak.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama berlaku untuk 1 (satu) tahun sejak ditandatangani perjanjian kerjasama ini dan sewaktu-waktu dipandang perlu dapat ditinjau kembali atau dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak.

Pasal 5
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan para pihak.





**PEDOMAN WAWANCARA/ INTERVIEW GUIDE PADA
TIM PENGGERAK PKK KECAMATAN KALIORI KABUPATEN**

REMBANG

1. Sejauh mana peranan TP.PKK dalam memberdayakan perempuan di kecamatan Kaliori ini ?
2. Dari 10 program pokok PKK, manakah yang paling berjalan dengan baik ? dan apa alasannya ?
3. Pada penelitian ini, saya memfokuskan pada program pendidikan dan keterampilan saja. Bagaimana perkembangannya di kecamatan Kaliori ? Apakah pelaksanaan program tersebut antara desa satu dengan desa yang lain sama ?
4. Bagaimana respon dan kontribusi masyarakat dengan adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kader PKK ?
5. Usaha apa saja yang dilakukan dalam meningkatkan pengetahuan kader dan minat baca masyarakat ?
6. Bagaimana peran PKK dalam meningkatkan kualitas pendidik dan kader pos PAUD ?
7. Jenis keterampilan apa saja yang ada pada program PKK kecamatan Kaliori ? apa yang mendasari keterampilan tersebut diberikan oleh para ibu-ibu ?
8. Apa yang melatarbelakangi Kecamatan Kaliori selama ini selalu mendapat gelar juara ?
9. Bagaimana koordinasi yang dilakukan antar kader PKK di Kec. Kaliori ?

**PEDOMAN WAWANCARA/ INTERVIEW GUIDE PADA
TIM PENGGERAK PKK DESA DRESI KULON KECAMATAN KALIORI
KABUPATEN REMBANG**

1. Dalam Pokja II Khususnya Program Pendidikan dan Ketrampilan memiliki banyak tugas, Apakah di Desa Dresi Kulon semua kegiatan-kegiatan program tersebut sudah dilaksanakan semua ?
2. Dalam meningkatkan pendidikan dan ketrampilan di keluarga, peningkatan seperti apa yang dilakukan di Desa Dresi Kulon ?
3. Dari Pokja II sendiri bagaimana cara untuk mengembangkan program BKB ? apakah ada hambatannya ?
4. Bagaimana mengenai kelompok belajar Paket A, B, C ? seperti apa kegiatannya ?
5. Bagaimana peran kader maupun tim penggerak PKK dalam menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya PAUD usia 0-6 tahun ? apakah di Desa Dresi Kulon ada PAUD dan darimana anggarannya ?
6. Bagaimana dengan program Keaksaraan Fungsional (KF) apakah ada ?
7. Apa saja bentuk Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga atau yang sering disebut UP2K dari PKK yang diberikan kepada Ibu-ibu ?
8. Bagaimana bentuk kerjasama yang dilakukan untuk membantu jalannya kegiatan-kegiatan dari program Pendidikan dan Ketrampilan ?
9. Apakah ada sosialisasi rutin tentang pentingnya pendidikan di Desa ini ?
10. Apakah ada hambatan-hambatan selama ini khususnya di Program Pendidikan dan Ketrampilan itu sendiri ?

